



BUPATI BONE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2024-2054

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk lainnya sehingga perlu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh – sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang dapat dijadikan landasan dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup, pelestarian fungsi lingkungan hidup pada saat ini dan yang akan datang di Kabupaten Bone;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE

Dan

BUPATI BONE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2024-2054.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
8. Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
9. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
10. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu di wilayah Kabupaten Bone.
11. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.
12. Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan Daya Dukung Lingkungan Hidup dan daya tampung lingkungan hidup.
13. Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
14. Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

15. Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem.
16. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
17. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas lantai dasar bangunan terhadap luas lahan/sebidang tanah (persil) yang dikuasai.
19. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah rangka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
20. Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
21. Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
22. Peran Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
23. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam secara lestari.
24. Pemanfaatan Sumber Daya Alam adalah penggunaan Sumber Daya Alam bagi peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi-fungsinya sebagai sumber dan pendukung kehidupan, yang meliputi fungsi ekologi, ekonomi, dan sosial budaya, serta kebutuhan generasi yang akan datang.
25. Pencadangan Sumber Daya Alam adalah upaya menjaga dan mempertahankan ketersediaan, potensi dan mutu Sumber Daya Alam dengan mempertimbangkan keadilan intra dan antar generasi.
26. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau pemerintah daerah berupa ketentuan mengenai standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas usaha dan/atau kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan.
27. Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan, pengamatan dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.

28. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat IKLH adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kualitas suatu ruang lingkungan hidup.
29. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

## BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. Ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. Kearifan Lokal;
- m. tata pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah.

### Bagian Kedua Maksud, Tujuan dan Sasaran

#### Pasal 3

RPPLH dimaksudkan untuk terpeliharanya fungsi lingkungan hidup dan terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

#### Pasal 4

Tujuan RPPLH yakni :

- a. melindungi Daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;

- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global untuk mewujudkan “Kabupaten yang berkelanjutan”;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.

#### Pasal 5

Sasaran RPPLH yakni :

- a. terwujudnya rencana pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. terwujudnya rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. terwujudnya rencana pengendalian, pemantauan serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. terwujudnya rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 6

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

- a. RPPLH;
- b. penetapan IKLH;
- c. koordinasi dan kerjasama;
- d. peran masyarakat;
- e. rewiu;
- f. pengawasan dan pengendalian;
- g. pembiayaan;
- h. ketentuan peralihan;
- i. ketentuan penutup.

### BAB IV RPPLH

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 7

- (1) RPPLH memuat rencana mengenai:
  - a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
  - b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
  - c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas arahan kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program.
- (3) Kebijakan, strategi implementasi, dan indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen RPPLH yang meliputi:
  - a. BAB.I pendahuluan;
  - b. BAB.II kondisi dan indikasi daya dukung dan daya tampung wilayah;
  - c. BAB.III permasalahan dan target lingkungan hidup; dan
  - d. BAB.IV arahan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam:
  - a. RPJPD; dan
  - b. RPJMD
- (5) Dokumen RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 8

- (1) RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditetapkan untuk kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

#### Bagian Kedua

#### Target Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

#### Pasal 9

- (1) Target Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berlandaskan pada isu strategis:
  - a. alih fungsi lahan pertanian;
  - b. kelangkaan air;
  - c. sampah;
  - d. pencemaran air;
  - e. banjir;
  - f. penurunan kualitas udara;
  - g. kurangnya RTH;
  - h. limbah domestik;
  - i. permukiman kumuh; dan
  - j. perubahan iklim.
- (2) Target Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam pencapaian target tahun 2054 yang meliputi:

- a. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;
- b. pemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari;
- c. terpenuhinya luasan RTH paling sedikit 30% dari luas wilayah perkotaan;
- d. meningkatnya kualitas lingkungan hidup Daerah;
- e. meningkatkan kualitas estetika kota;
- f. meningkatkan pengelolaan limbah domestik rumah tangga;
- g. mengurangi pencemaran air tanah dan air sungai;
- h. peningkatan kualitas udara;
- i. peningkatan persentase daerah bebas banjir;
- j. meningkatnya pemantauan emisi gas rumah kaca;
- k. meningkatkan sistem transportasi massal yang ramah lingkungan;
- l. meningkatnya pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan Daerah;
- m. meningkatnya pengembangan RTH;
- n. meningkatkan revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya;
- o. meningkatnya kapasitas masyarakat dalam Perubahan Iklim;
- p. meningkatnya adaptasi Perubahan Iklim melalui Kearifan Lokal yang telah ada;
- q. meningkatnya infrastruktur hijau sesuai kerentanan Daerah;
- r. mengurangi eksploitasi air tanah di wilayah perkotaan; dan
- s. peningkatan indeks peduli lingkungan masyarakat Daerah.

### Bagian Ketiga

#### Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

##### Pasal 10

- (1) Pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi:
  - a. melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki Daya Dukung Lingkungan Hidup tinggi (jasa ekosistem penyedia pangan kategori tinggi);
  - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia petani serta meningkatkan kesejahteraan petani;
  - c. melindungi dan memulihkan fungsi-fungsi kawasan dengan Jasa Lingkungan Hidup pengatur dan penyimpanan air tinggi;
  - d. meminimalkan/menekan peningkatan berbagai kebutuhan sumberdaya air; dan
  - e. perluasan jaringan PDAM sebagai sumber air bersih/minum.
- (2) Pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi:
  - a. menetapkan hutan kota dan RTH kota menjadi kawasan lindung;
  - b. mengembangkan RTH baru yang dapat dilakukan dengan mengembalikan fungsi ruang yang seharusnya termasuk dalam kategori lindung seperti sempadan sungai, sempadan pantai dan saluran listrik udara;



- c. menerapkan ketentuan KDH pada setiap kavling tanah untuk dapat memenuhi kebutuhan RTH;
  - d. penerapan ketentuan KDH dilaksanakan dengan diimbangi mekanisme monitoring, evaluasi maupun penerapan sanksi;
  - e. peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan;
  - f. meningkatkan jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan;
  - g. meningkatkan jumlah usaha yang memiliki persetujuan lingkungan;
  - h. meningkatkan pantauan pada pemrakarsa dalam menaati dokumen lingkungan;
  - i. meningkatkan layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi;
  - j. meningkatkan layanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;
  - k. meningkatkan fasilitas kesehatan terakreditasi milik pemerintah; dan
  - l. mengoptimalkan cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan.
- (3) Pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan melalui strategi:
- a. peningkatkan volume sampah yang bisa terangkut ke TPA;
  - b. peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan;
  - c. peningkatan volume sampah yang dikelola secara 3R (*reduce, reuse & recycle*);
  - d. sosialisasi pengelolaan limbah rumah tangga kepada masyarakat;
  - e. pembentukan dan optimalisasi bank sampah desa/kelurahan;
  - f. pengadaan lomba kreativitas bank sampah setiap tahun;
  - g. pemberian insentif pada bank sampah yang memiliki pengelolaan sampah domestik yang baik;
  - h. menurunkan produksi limbah cair secara signifikan di air permukaan;
  - i. mewujudkan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta Jasa Lingkungan Hidupnya;
  - j. meningkatkan Indeks kualitas air;
  - k. menurunkan secara signifikan pencemaran bahan kimia dan semua jenis limbah yang tidak ramah lingkungan di udara;
  - l. meningkatkan Indeks kualitas udara;
  - m. mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim;
  - n. meningkatkan cakupan pemulihan kerusakan Daerah Aliran Sungai; dan
  - o. membangun infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh untuk menunjang pengendalian banjir;
- (4) Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan melalui strategi:
- a. meningkatkan kelengkapan pemantauan emisi gas rumah kaca dengan pemasangan alat pengukur yang memadai;
  - b. meningkatkan akurasi data emisi gas rumah kaca melalui pengukuran yang berkelanjutan;
  - c. meningkatkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
  - d. meningkatkan persentase pengguna sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;

- e. meningkatkan kajian dan penelitian terkait dengan pengembangan energi alternatif;
- f. meningkatkan penggunaan energy alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- g. menyediakan RTH dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
- h. meningkatkan luas RTH menuju kota hijau;
- i. meningkatkan kajian dan penelitian terkait sistem pemanenan air hujan yang sesuai dan optimal;
- j. meningkatkan pemanfaatan sistem pemanenan air hujan di masyarakat;
- k. memperkuat kapasitas masyarakat terhadap perubahan iklim;
- l. meningkatkan kapasitas perangkat daerah di masyarakat terhadap perubahan iklim;
- m. meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana melalui kearifan lokal yang telah ada;
- n. meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap risiko bencana di daerahnya;
- o. meningkatkan pengembangan infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah;
- p. mempertahankan infrastuktur hijau untuk daerah yang rentan;
- q. meminimalisir eksploitasi air tanah di wilayah perkotaan;
- r. meningkatkan tata kelola pemanfaatan air tanah di wilayah perkotaan;
- s. menjadikan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan; dan
- t. meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan bagi masyarakat perkotaaan.

## BAB V PENETAPAN IKLH

### Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan IKLH di Daerah.
- (2) Penetapan IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH.
- (3) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan hingga mencapai kategori baik.
- (4) Pencapaian kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara bertahap.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI KOORDINASI DAN KERJA SAMA

### Bagian Kesatu Koordinasi

### Pasal 12

- (1) Bupati mengoordinasikan pelaksanaan RPPLH di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.

Bagian Kedua  
Kerja Sama

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam melaksanakan RPPLH.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. daerah lain;
  - b. pihak ketiga; dan/atau
  - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PERAN MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak melakukan peran dalam proses pelaksanaan RPPLH.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Peran Masyarakat dalam proses pelaksanaan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengawasan sosial;
  - b. pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, dan pengaduan;
  - c. pendampingan tenaga ahli dan pemberian bantuan teknis; dan/atau
  - d. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
REVIU

Pasal 15

- (1) Bupati wajib melaksanakan reviu terhadap RPPLH setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pembaharuan data dan informasi dokumen RPPLH.
- (2) Pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan dengan gubernur melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan RPPLH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pemberian pendapat, saran, dan usul dari instansi terkait maupun Perangkat Daerah teknis;
  - b. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - c. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penegakan hukum lingkungan; dan/atau
  - d. melaksanakan pengawasan terhadap penerima persetujuan lingkungan, perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pelaksanaan sosialisasi terhadap pemangku kepentingan tentang RPPLH;
  - b. mengoordinasikan pemantauan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
  - c. penyampaian informasi; dan/atau
  - d. pelaporan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, bidang perencanaan, pertanian, perumahan dan permukiman, infrastruktur dan tata ruang, peternakan, perkebunan, dan bencana alam.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada Perangkat Daerah dapat diberikan:
- a. pendampingan anggaran;
  - b. pendampingan tenaga ahli; dan/atau
  - c. pendampingan berupa bantuan teknis.

#### Pasal 17

Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup sebagai koordinator melakukan pengawasan dan pengendalian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 19

Rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, wajib menyesuaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal, 27 Desember 2023

Pj. BUPATI BONE,

  
ANDI ISLAMUDDIN

Diundangkan di Watampone  
pada tanggal, 27 Desember 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

  
ANDI MUHAMMAD GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 8  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN B.HK.08.136.23.

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
TAHUN 2024-2054

I. PENJELASAN UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan salah satu hak asasi yang dimiliki oleh setiap manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga lingkungan hidup perlu terus dijaga kualitasnya agar tetap dapat menunjang pembangunan berkelanjutan.

Sebagaimana daerah lainnya di Indonesia, Kabupaten Bone saat ini sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan. Namun demikian kegiatan pembangunan di segala bidang tersebut, sedikit banyak telah memberikan kontribusi terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh, konsisten dan konsekuen.

Diperlukan suatu kebijakan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, sehingga seluruh kegiatan pembangunan maupun masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan, dapat dicegah, sedangkan akibat kegiatan yang telah terjadi maupun kondisi alam yang rawan menyebabkan terganggunya fungsi lingkungan hidup dapat ditangani secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daerah diharuskan menyusun RPPLH Kabupaten yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Kegiatan penyusunan RPPLH dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, penetapan ekoregion, dan penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

RPPLH memuat rencana pengelolaan sumberdaya alam yang meliputi pencadangan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemantauan, pendayagunaan, pelestarian, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Peran strategis RPPLH juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana disebutkan bahwa seluruh kebijakan yang tercantum dalam dokumen RPPLH harus menjadi dasar dan dimuat dalam RPJPD dan RPJMD sebagai dokumen perencanaan daerah.

Dengan kedudukannya sebagai pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah, maka RPPLH menjadi instrumen pengendali terhadap penyusunan rencana pembangunan dan implementasinya. Untuk itu RPPLH juga dilengkapi dengan penetapan IKLH yang menjadi acuan

untuk menentukan capaian kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan daerah lain” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan pihak ketiga” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra terdiri atas:

1. perseorangan;
2. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan lembaga di luar negeri” adalah kerja usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan pemerintah daerah di luar negeri” adalah usaha bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “organisasi kemasyarakatan” adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

##### Ayat (3)

###### Huruf a

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam pengawasan sosial” adalah pelibatan masyarakat dalam pengawasan kualitas lingkungan hidup.

###### Huruf b

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam pemberian saran, pendapat, usul” adalah pelibatan masyarakat dalam pemberian saran, pendapat, atau usul terkait pengendalian dan



pengelolaan lingkungan hidup dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha.

#### Huruf c

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam pendampingan tenaga ahli” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki informasi dan/atau keahlian yang relevan untuk memberikan pendampingan dalam perencanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap substansi kebijakan, rencana, dan/atau program atau usaha/kegiatan terkait upaya pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pendampingan tenaga ahli dibutuhkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, jika pendampingan dilakukan pada masyarakat hukum adat, pendampingan dilakukan dengan memperhatikan Kearifan Lokal masing-masing masyarakat adat.

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam pemberian bantuan teknis” adalah pelibatan masyarakat yang memiliki kemampuan keahlian teknis tertentu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan serta evaluasi kebijakan, rencana, program serta kegiatan/usaha terkait upaya pengendalian dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Huruf d

Yang dimaksud “Peran Masyarakat dalam penyampaian informasi dan/atau pelaporan” adalah pelibatan masyarakat yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan, rencana, dan / atau program atau usaha/kegiatan dalam penyampaian keberatan dan/atau pengaduan atau pelaporan kepada lembaga penegak hukum atau instansi yang berwenang. Pengajuan keberatan terhadap tindakan-tindakan yang dapat merusak atau menurunkan kualitas Lingkungan Hidup. Penyampaian pengaduan atau pelaporan dapat dilakukan apabila menemukan tindakan-tindakan yang merusak Lingkungan Hidup.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 15

Cukup jelas.

#### Pasal 16

Cukup jelas.

#### Pasal 17

Cukup jelas.

#### Pasal 18

Cukup jelas.

#### Pasal 19

Cukup jelas.

#### Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 8.

**PEMERINTAH KABUPATEN BONE**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
Jl. H. Andi Mappanyukki No.4, Watampone Kode Pos 92733



**2024**

**DOKUMEN RENCANA PERLINDUNGAN  
DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN  
HIDUP (RPPLH)  
*KABUPATEN BONE 2024-2054***



# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	I
<b>DAFTAR ISI</b> .....	II
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	VI
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	XII
<b>DAFTAR DIAGRAM</b> .....	XIV
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	XV
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Peran dan Posisi RPPLH.....	I-3
C. Maksud dan Tujuan .....	I-5
D. Sasaran .....	I-6
E. Dasar Hukum.....	I-7
F. Prinsip dan Kedudukan RPPLH dalam Perencanaan Pembangunan.....	I-8
<b>BAB 2</b>	
<b>KONDISI &amp; INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP</b>	
A. Letak Geografis dan Iklim .....	II-1
1. Luas Wilayah .....	II-1
2. Klimatologi .....	II-5
3. Geologi .....	II-6
4. Penggunaan Lahan .....	II-10
5. Jenis Tanah .....	II-11
6. Kemiringan Lereng .....	II-12
7. Topografi .....	II-13
B. Pemerintahan.....	II-19
C. Kependudukan.....	II-20
D. Ketenagakerjaan .....	II-23
E. Kemiskinan .....	II-25





F.	Pendidikan .....	II-26
G.	Kesehatan .....	II-35
H.	Peribadatan.....	II-37
I.	Pertanian Hortikultura .....	II-38
J.	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) .....	II-43
K.	Transportasi.....	II-46
L.	Pertambangan .....	II-48
M.	Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) .....	II-53
N.	Keanekaragaman Ekosistem .....	II-57
O.	Kejadian Bencana .....	II-62
P.	Upaya-Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone .....	II-64
Q.	Kinerja Layanan / Jasa Lingkungan .....	II-66
	1. Jasa Penyediaan Lingkungan .....	II-68
	2. Jasa Lingkungan Pengaturan .....	II-76
	3. Tingkat Ketahanan dan Potensi Kehati .....	II-98
	4. Analisis Daya Dukung Penyediaan Air Bersih .....	II-106
R.	Proyeksi Ketersediaan Air 30 Tahun Kedepan .....	II-126
S.	Proyeksi Ketersediaan Pangan 30 Tahun Kedepan .....	II-140
T.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bone, Tahun 2020 .....	II-147
U.	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bone 3 Tahun Terakhir .....	II-151
V.	Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bone 2021-2024 .....	II-152

### BAB 3

#### PERMASALAHAN, TARGET, DAN INDIKATOR RPPLH

A.	Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan.....	III-1
B.	Isu Strategis Nasional .....	III-1
C.	Karakteristik Ekoregion Provinsi Sulawesi Selatan.....	III-3
D.	Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan .....	III-3
E.	Isu Pokok Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan .....	III-6
F.	Analisis DPSIR Lingkungan Hidup Kabupaten Bone .....	III-6



1. Tata Guna Lahan .....	III-7
2. Kualitas Air .....	III-9
3. Kualitas Udara .....	III-10
4. Persampahan .....	III-12
5. Risiko Bencana .....	III-14
6. Tata Kelola Lingkungan .....	III-16
G. Isu Strategis Ekoregion Kabupaten Bone .....	III-21
1. Sampah .....	III-21
2. Pencemaran Air dan Penurunan Kuantitas Air .....	III-21
3. Banjir .....	III-22
4. Pencemaran udara .....	III-22
5. RTH .....	III-23
6. Limbah Domestik .....	III-23
7. Permukiman Kumuh .....	III-24
8. Perubahan Iklim .....	III-24
9. Alih Fungsi Lahan Pertanian .....	III-25
H. Indikator Keberhasilan .....	III-28
I. Target RPPLH Kabupaten Bone .....	III-29

#### **BAB 4**

### **KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE**

A. Strategi Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	IV-1
B. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	IV-3
C. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Lahan dan Air .....	IV-5
D. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup .....	IV-6
E. Rencana Pengendalian, Pemantauan, Serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Lahan dan Air .....	IV-11



F. Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Perubahan Iklim .....	IV-15
--	-------

## **BAB 5**

### **IMPLEMENTASI, MONITORING DAN EVALUASI**

A. Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone .....	V-1
B. Kerangka Regulasi, Kelembagaan, dan Pendanaan .....	V-30

## **BAB 6**

### **PENUTUP**

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Area dan Persentase terhadap Luas Area Kabupaten Bone, Tahun 2021 .....	II-2
Tabel 2.2	Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan di Bone, 2020 .....	II-5
Tabel 2.3	Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Setiap Bulan di Bone.....	II-5
Tabel 2.4	Kondisi Geologi di Bone, 2020 .....	II-6
Tabel 2.5	Penggunaan Lahan di Bone, 2020 .....	II-10
Tabel 2.6	Jenis Tanah di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-11
Tabel 2.7	Kemiringan Lereng di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-12
Tabel 2.8	Topografi di Kabupaten Bone Tahun,2020 .....	II-13
Tabel 2.9	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten, Bone 2020 .....	II-19
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bone 2017-2020 .....	II-20
Tabel 2.11	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-22
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bone,2020 .....	II-22
Tabel 2.13	Jumlah penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-23
Tabel 2.14	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone,2020 .....	II-24
Tabel 2.15	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bone, 2013-2020 .....	II-25





Tabel 2.16	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bone, 2013-2020.....	II-26
Tabel 2.17	Banyaknya Sekolah, Ruang Belajar, Kelas, Guru, dan Murid Menurut Jenis Sekolah, 2020 .....	II-27
Tabel 2.18	Banyaknya Sekolah, Ruang Belajar, Kelas, Guru dan Murid Pada Taman Kanak-Kanak Menurut Kecamatan, 2020 .....	II-27
Tabel 2.19	Banyaknya Sekolah, Ruang Belajar, Kelas, Guru dan Murid Pada Raudatul Athfal (RA) Menurut Kecamatan, 2020 .....	II-28
Tabel 2.20	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, Sekolah Dasar (SD) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-29
Tabel 2.21	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-29
Tabel 2.22	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-30
Tabel 2.23	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-31
Tabel 2.24	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, Sekolah Menengah Atas, menurut Kecamatan Di Kabupaten Bone.....	II-32
Tabel 2.25	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-33
Tabel 2.26	Banyaknya Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Tenaga Pengajar dan Mahasiswa Lulus di Kabupaten Bone....	II-34
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-34
Tabel 2.28	Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bone, 2019 dan 2020 .....	II-34



Tabel 2.29	Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-35
Tabel 2.30	Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-36
Tabel 2.31	Jumlah Sarana Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2020 .....	II-37
Tabel 2.32	Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-38
Tabel 2.33	Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Kuintal) di Kabupaten Bone, 2020 ....	II-39
Tabel 2.34	Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (m <sup>2</sup> ) di Kabupaten Bone, 2020 ....	II-40
Tabel 2.35	Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kg) di Kabupaten Bone, 2020 ....	II-42
Tabel 2.36	Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah (kuintal) di Kabupaten Bone, 2020 .....	II-43
Tabel 2.37	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kabupaten Bone, 2016-2020 .....	II-44
Tabel 2.38	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kabupaten Bone, 2016-2020 .....	II-45
Tabel 2.39	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) di Kabupaten Bone, 2016-2020 .....	II-46
Tabel 2.40	Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bone (Km), 2018-2020 ...	II-47
Tabel 2.41	Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bone (Km), 2017-2019 .....	II-47
Tabel 2.42	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bone (Km), 2018-2020 .....	II-47
Tabel 2.43	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Di Kabupaten Bone .....	II-48



Tabel 2.44	Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bone yang dipertahankan dan di pulihkan .....	II-53
Tabel 2.45	Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bone.....	II-63
Tabel 2.46	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air di Kabupaten Bone .....	II-68
Tabel 2.47	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Di Kabupaten Bone .....	II-72
Tabel 2.48	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Tata Aliran Air Di Kabupaten Bone.....	II-76
Tabel 2.49	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pengatur Iklim di Kabupaten Bone .....	II-75
Tabel 2.50	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor Di Kabupaten Bone.....	II-85
Tabel 2.51	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bone.....	II-89
Tabel 2.52	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Kabupaten Bone .....	II-94
Tabel 2.53	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Bone .....	II-99
Tabel 2.54	Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Bone .....	II-103
Tabel 2.55	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih Di Kabupaten Bone .....	II-107
Tabel 2.56	Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan Di Kabupaten Bone .....	II-119
Tabel 2.57	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2022 .....	II-127
Tabel 2.58	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2027.....	II-128
Tabel 2.59	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2032.....	II-130
Tabel 2.60	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2037 .....	II-132



Tabel 2.61	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2042 .....	II-134
Tabel 2.62	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2047 .....	II-136
Tabel 2.63	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih di Kabupaten Bone Tahun 2052 .....	II-138
Tabel 2.64	Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2022 .....	II-140
Tabel 2.65	Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2027 .....	II-141
Tabel 2.66	Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2032 .....	II-142
Tabel 2.67	Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2037 .....	II-143
Tabel 2.68	Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2042 .....	II-144
Tabel 2.69	Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2047 .....	II-145
Tabel 2.70	Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2052 .....	II-146
Tabel 2.71	Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bone 2018-2020 .....	II-151
Tabel 2.72	Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bone 2021-2024 .....	II-152
Tabel 3.1	Luas Jenis <i>landform</i> ekoregion di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan .....	III-3
Tabel 3.2	Hasil Kajian DPSIR <i>Framework</i> dalam Penyusunan RPPLH Kabupaten Bone .....	III-17
Tabel 3.3	Isu Strategis Lingkungan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone .....	III-26
Tabel 3.4	Target Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone 30 Tahun .....	III-30
Tabel 5.1	Program Kebijakan Rencana Pemanfaatan dan/atau	



	Pencadangan Sumberdaya Alam.....	V – 4
Tabel 5.2	Program Kebijakan Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup .....	V – 7
Tabel 5.3	Program Kebijakan Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Kelestarian Sumberdaya Alam	V – 12
Tabel 5.4	Program Kebijakan Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim .....	V – 23
Tabel 5.5	Fungsi Kelembagaan pada masing-masing Tahapan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	V – 33



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.2	Keterkaitan RPPLH dengan Dokumen Perencanaan.	I-5
Gambar 1.2	Kedudukan RPPLH dalam Sistem Perencanaan Pembangunan .....	I-10
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Bone.....	II-4
Gambar 2.2	Peta Klimatologi .....	II-8
Gambar 2.3	Peta Geologi Kabupaten Bone .....	II-9
Gambar 2.4	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Bone .....	II-15
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Bone .....	II-16
Gambar 2.6	Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bone .....	II-17
Gambar 2.7	Peta Topografi Kabupaten Bone .....	II-18
Gambar 2.8	Peta Potensi Wilayah Pertambangan Kabupaten Bone .....	II-52
Gambar 2.9	Peta DAS Kabupaten Bone.....	II-56
Gambar 2.10	Peta Jasa Ekosistem Genetik Kabupaten Bone .....	II-61
Gambar 2.11	Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Air .....	II-71
Gambar 2.12	Peta Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan .....	II-75
Gambar 2.13	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air Di Kabupaten Bone .....	II-80
Gambar 2.14	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim .....	II-84
Gambar 2.15	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor.....	II-88
Gambar 2.16	Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir .....	II-93
Gambar 2.17	Peta Jasa Lingkungan Pemurnian air dan Pengelolaan Limbah .....	II-85
Gambar 2.18	Peta Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik.....	II-102
Gambar 2.19	Peta Ketersediaan Air .....	II-110
Gambar 2.20	Peta Kebutuhan Air .....	II-111



Gambar 2.21	Peta Selisih Kebutuhan dan Ketersediaan air .....	II-112
Gambar 2.22	Peta Status Daya Dukung Penyediaan Air .....	II-114
Gambar 2.23	Peta Ketersediaan Pangan .....	II-121
Gambar 2.24	Peta Kebutuhan Pangan .....	II-122
Gambar 2.25	Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Di Kabupaten Bone .....	II-123
Gambar 2.26	Peta Status Daya Dukung Pangan .....	II-125
Gambar 3.1.	Analisis DPSIR Lingkungan Hidup.....	III-7



## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1	Presentasi Luas Per Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2020 .....	II-3
Diagram 2.2	Presentasi Luas Jenis Batuan di Kabupaten Bone Tahun 2020 .....	II-7
Diagram 2.3	Presentasi Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bone Tahun 2020 .....	II-10
Diagram 2.4	Presentasi Luas Jenis Tanah di Kabupaten Bone Tahun 2020 .....	II-12
Diagram 2.5	Presentasi Luas Kemiringan Lereng di Kabupaten Bone Tahun 2020 .....	II-13
Diagram 2.6	Presentasi Luas Topografi di Kabupaten Bone Tahun 2020 .....	II-14





## DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Presentasi Penduduk Miskin di Kabupaten Bone Tahun 2013-2020.....	II-21
Grafik 2.2	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bone Tahun 2013-2020.....	II-25
Grafik 2.3	Presentasi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Di Kabupaten Bone .....	II-70
Grafik 2.4	Presentasi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Di Kabupaten Bone.....	II-74
Grafik 2.5	Presentasi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air di Kabupaten Bone .....	II-79
Grafik 2.6	Presentasi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim Di Kabupaten Bone .....	II-83
Grafik 2.7	Presentasi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor di Kabupaten Bone .....	II-87
Grafik 2.8	Presentasi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bone .....	II-92
Grafik 2.9	Presentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Kabupaten Bone .....	II-96
Grafik 2.10	Presentase Luas Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik .....	II-101



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, lingkungan hidup merupakan salah satu urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Lingkungan hidup merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana termuat dalam Lampiran huruf k Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Salah satu sub bidang yang dibagi pada Lampiran huruf k tersebut adalah sub bidang Perencanaan Lingkungan Hidup bahwa Pemerintah Kabupaten/ Kota memiliki kewenangan untuk menyusun RPPLH Kabupaten/Kota. Ketentuan sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut terkait dengan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur bahwa perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui beberapa tahapan meliputi inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH.

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Bone terutama prasarana wilayah baik jalan maupun permukiman mengakibatkan tingginya permintaan bahan/material pembangunan. Salah satunya adalah kebutuhan tanah urug/galian C. Belum lagi kerusakan lahan pertanian akibat penambangan galian golongan C. Penambangan bahan galian C





terutama pasir, tanah dan batu secara tidak terkendali mengakibatkan kerusakan lahan produktif disekitarnya. Dari sekian banyak pelaku usaha penambangan bahan galian C masih sedikit yang melengkapi usahanya dengan program perencanaan penambangan dan program reklamasi. Ditambah lagi lemahnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang ada di Kabupaten Bone baik terhadap yang sudah memiliki izin lingkungan maupun yang belum memiliki izin, dimana masih banyak terdapat penambang liar, sehingga di perlukan regulasi untuk mengatur dan mengendalikan dampak usaha serta kegiatan yang berpotensi memicu terjadinya kerusakan dan degradasi kualitas lingkungan di Kabupaten Bone.

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun secara hirarki yang terdiri atas RPPLH Nasional, RPPLH Provinsi dan RPPLH Kabupaten/Kota. RPPLH Kabupaten/Kota disusun berdasarkan RPPLH provinsi, inventarisasi tingkat pulau/kepulauan, dan inventarisasi tingkat ekoregion. RPPLH disusun oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Penyusunan RPPLH memperhatikan beberapa aspek yang meliputi keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat, dan perubahan iklim. Sedangkan, RPPLH yang disusun Bupati diatur dengan Peraturan Daerah dan memuat rencana yang meliputi tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam; pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup; pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.



RPPLH yang telah diatur dalam bentuk Peraturan Daerah tersebut menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bone memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan “PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN BONE TAHUN 2021-2051”.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bone mengacu pada Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.

#### **B. Peran dan Posisi RPPLH**

Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan



berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

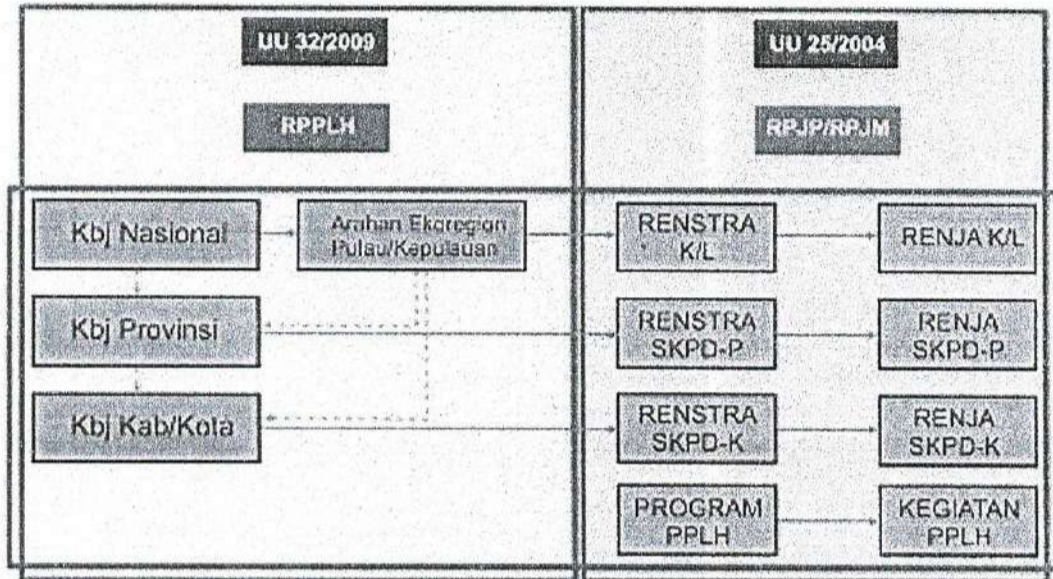
Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral. RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya alam lainnya yang lebih spesifik.

Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup



mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.



Gambar 1.1. Keterkaitan RPPLH dengan Dokumen Perencanaan  
(Sumber: RPPLH Nasional, 2015)

### C. Maksud dan Tujuan

Dokumen RPPLH Kabupaten Bone Tahun 2021-2051 sebagai dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan baik RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang), RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), maupun rencana pembangunan sektor lainnya sebagai upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan di Kabupaten Bone.

Adapun Tujuan Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2021-2051 adalah:

1. Melindungi wilayah Kabupaten Bone dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;



3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan dan turut serta mengantisipasi dampak pemanasan global untuk mewujudkan "Kabupaten yang berkelanjutan";
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

#### **D. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penyusunan RPPLH Kabupaten Bone Tahun 2021-2051 adalah sebagai berikut :

1. Dapat dilaksanakannya pengelolaan sumber daya alam secara berkesinambungan melalui pemanfaatan dan pencadangan serta mitigasi terhadap jasa ekosistem pada wilayah yang berdaya dukung tinggi-sangat tinggi dan atau berdaya dukung sedang serta melakukan perlindungan terhadap wilayah berdaya dukung rendah-sangat rendah, sehingga kondisi lingkungan tetap terjaga dan bahkan dapat semakin baik dalam kurun waktu 30 tahun mendatang;
2. Diperolehnya hasil yang berkesinambungan dari ekoregion dan ekosistem dalam bentuk jasa ekosistem sumberdaya alam yang ada;
3. Diperolehnya model indek kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dalam kurun waktu 30 tahun; dan



4. Dicapainya indek kualitas lingkungan hidup di daerah paling rendah dengan predikat cukup baik sampai dengan baik pada akhir kurun waktu 30 (tiga puluh) tahun mendatang.

#### **E. Dasar Hukum**

Dasar hukum Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bone Tahun 2021-2051 antara lain :

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Perubahannya.
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang entang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Surat Edaran Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 Tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah





Kabupaten Bone Tahun 2005-2025.

- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012-2032.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

## **F. Prinsip dan Kedudukan RPPLH dalam Perencanaan Pembangunan**

### **1. Prinsip RPPLH**

Prinsip dalam penyusunan dokumen RPPLH Kabupaten Bone ini adalah:

- 1) Pembangunan Berkelanjutan: Pembangunan Ekonomi dan Sosial tidak mengorbankan Lingkungan Hidup dan mengintegrasikan perlindungan lingkungan dari lingkungan paling kecil (lokal dan regional);
- 2) Pembangunan Rendah Karbon: membangun kota-kota rendah karbon dan hemat energi, dan menciptakan solusi terbaik antara pembangunan ekonomi dan perlindungan ekologi;
- 3) Partisipasi Publik: melibatkan publik dalam seluruh proses dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring dan evaluasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 4) Kerjasama antar Daerah; mengutamakan kerja sama antar daerah dalam satu ekoregion dan antar ekoregion sebagai keniscayaan untuk mendorong keberhasilan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

### **2. Kedudukan RPPLH**

Kedudukan RPPLH, sesuai yang diatur dalam Pasal 10 (ayat) 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, RPPLH dalam sistem perencanaan pembangunan adalah menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah. Mengingat materi muatan RPJP maupun RPJM



sangat luas, maka RPPLH menjadi satu keharusan terutama dengan materi muatan RPJP dan RPJMD yang berkenaan dengan perlindungan lingkungan hidup.

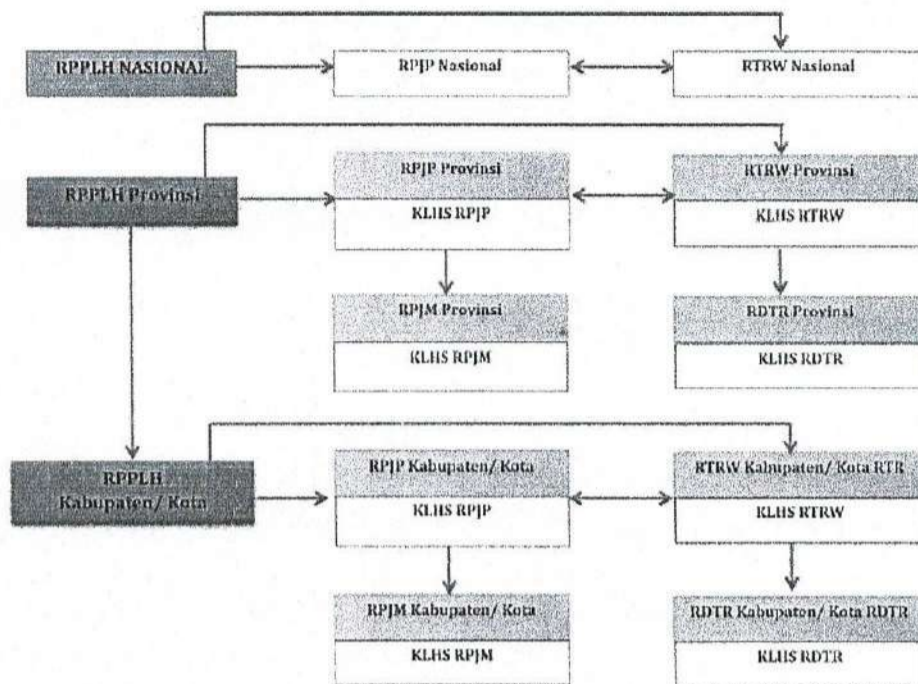
Sementara itu pada dasarnya perencanaan pembangunan di Indonesia dijabarkan dalam dua sistem rencana yaitu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Rencana Penataan Ruang. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasikan rencana-rencana pembanguna dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sedangkan Rencana Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang berupa rencana umum dan rencanan rinci. Rencana pembngunan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Penataan Ruang dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa RPPLH sebenarnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Penataan Ruang terutama terkait dengan adanya rencana pemanfaatan ruang. Rencana penataan ruang atau RTRW adalah mengatur bagaimana memanfaatkan ruang atau dalam artian luas adalah lingkungan, RPPLH memberikan informasi, arahan maupun acuan sebagaimana seharusnya lingkungan dimanfaatkan/dikelola dengan baik agar tetap terjaga kualitasnya.

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga mengatur, RTRW Kabupaten/Kota disusun salah satunya dengan memperhatikan RPJP Kabupaten/Kota yang notabene dilandasi oleh RPPLH. Dengan kata lain, RPPLH seharusnya menjadi pertimbangan dalam penyusunan RTRW Kabupaten/Kota sehingga pemanfaatan ruang yang direncanakan didasarkan sesuai dengan karakteristik ekoregionnya. Ditinjau dari sistem perundang-undangan nasional,



RPPLH Kabupaten/Kota memiliki kedudukan yang setara dengan RPJPD, RPJMD, RTRW kabupaten/kota karena RPPLH diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Gambar 1.2. Kedudukan RPPLH dalam Sistem Perencanaan Pembangunan  
(Sumber: RPPLH Nasional, 2015)



## **BAB II KONDISI & INDIKASI DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP**

### **A. Letak Geografis dan Iklim**

Kabupaten Bone, merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 175 Km di sebelah Barat Kota Makassar (Ibu kota Propinsi Sulawesi Selatan). Secara astronomis, Kabupaten Bone terletak antara 4°13'- 5°06' Lintang Selatan dan 119°42'- 120°40' Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah Utara: Kabupaten Wajo dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Timur : Teluk Bone
- Sebelah Selatan : Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Gowa
- Sebelah Barat : Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Barru.

### **1. LUAS WILAYAH**

Wilayah administratif Kabupaten Bone terbagi dalam 27 Kecamatan dan 372 Desa/Kelurahan (44 Kelurahan dan 328 Desa) dengan luas 4.579,87 Km<sup>2</sup>. Adapun Kecamatan Bontocani merupakan kecamatan terluas dengan luas 45.641,04 Km<sup>2</sup>, sedangkan Kecamatan yang luasannya terkecil adalah di Kecamatan Tanete Riattang dengan luas 2.760,11 Km<sup>2</sup>.



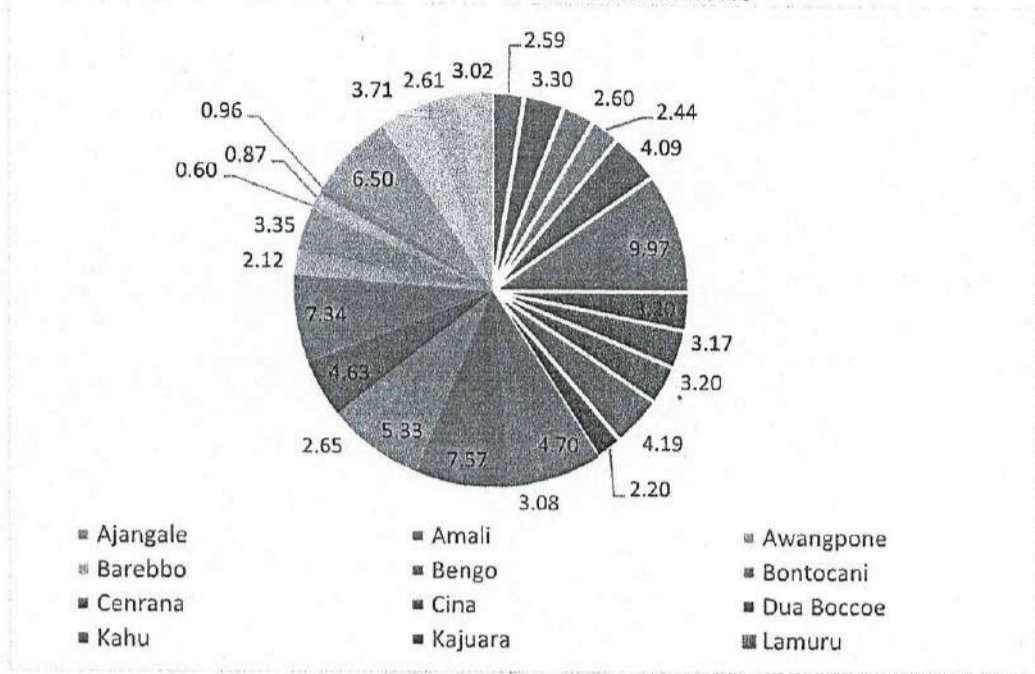
Tabel-2.1 Luas Area dan Persentase terhadap Luas Area

No	Kecamatan	Luas Area (Km <sup>2</sup> )	Persentase terhadap luas area (%)
1	Ajangale	11.876,92	2.59
2	Amali	15.134,55	3.30
3	Awangpone	11.910,23	2.60
4	Barebbo	11.174,62	2.44
5	Bengo	18.735,10	4.09
6	Bontocani	45.641,04	9.97
7	Cenrana	14.659,26	3.20
8	Cina	14.520,97	3.17
9	Dua Boccoe	14.650,22	3.20
10	Kahu	19.197,03	4.19
11	Kajuara	10.067,64	2.20
12	Lamuru	21.522,47	4.70
13	Lappa Riaja	14.099,79	3.08
14	Libureng	34.651,23	7.57
15	Mare	24.395,40	5.33
16	Palakka	12.151,00	2.65
17	Patimpeng	21.194,30	4.63
18	Ponre	33.627,12	7.34
19	Salomekko	9.726,77	2.12
20	Sibulue	15.345,55	3.35
21	Tanete Riattang	2.760,11	0.60
22	Tanete Riattang Barat	3.983,97	0.87
23	Tanete Riattang Timur	4.400,68	0.96
24	Tellu Limpoe	29.777,51	6.50
25	Tellu Siattinge	16.999,54	3.71
26	Tonra	11.951,89	2.61
27	Ulaweng	13.831,65	3.02
<b>Jumlah</b>		<b>457.986,57</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Hasil Olah Data GIS Tahun 2021



Diagram 2.1 Presentasi Luas per Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2020



Sumber: Hasil Olah Data GIS Tahun 2021





## 2. KLIMATOLOGI

Keadaan iklim Kabupaten Bone adalah identik dengan keadaan iklim wilayah lain yang ada di Pulau Sulawesi secara keseluruhan. Curah Hujan rata – rata pada tahun 2020 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yaitu 260,33 mm/tahun.

Tabel-2.2 Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan di Bone, 2020

No	Bulan	Curah Hujan (mm <sup>3</sup> )	Hari Hujan
1	Januari	203	22
2	Februari	154	17
3	Maret	178	17
4	April	275	19
5	Mei	596	21
6	Juni	508	21
7	Juli	502	21
8	Agustus	48	8
9	September	126	11
10	Oktober	149	6
11	November	255	14
12	Desember	130	13

Sumber/Source: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2021

Tabel-2.3 Kecepatan Angin dan penyinaran matahari Setiap Bulan di Bone, 2020

No	Bulan	Kelembaban (%)	Penyinaran Matahari (%)
1	Januari	-	-
2	Februari	86	46
3	Maret	87	39
4	April	86	44
5	Mei	88	28
6	Juni	87	30
7	Juli	88	36





No	Bulan	Kelembaban (%)	Penyinaran Matahari (%)
8	Agustus	83	64
9	September	81	-
10	Oktober	77	71
11	November	80	60
12	Desember	-	-

Sumber/Source: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2021

### 3. GEOLOGI

Kabupaten Bone di dominasi oleh jenis batuan breksi, lava, konglomerat dan tufa. Untuk lebih jelasnya, kondisi geologi di Kabupaten Bone dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-2.4 Kondisi Geologi di Bone, 2020

No	Jenis Batuan	Luasan (Ha)	Presentasi
1	Basal	34.43	0.01
2	Batu Gamping	55.055,61	12.02
3	Batuan Metamorf	111,22	0.02
4	Batuan Sedimen Laut Berselingan Dengan Batuan Gunung Api	7.147,66	1.56
5	Batupasir, Konglomerat, Tufa, Batulanau, Batulempung, Batu Gamping, Napal	166.601,02	36.38
6	Batupasir, Serpih, Batu Lempung, Konglomerat, Breksi, Tufa	7.534,67	1.65
7	Breksi, Lava, Konglomerat, Tufa	68.017,99	14.85
8	Breksi, Lava, Tufa	1.762,30	0.38
9	Diorit	1.358,95	0.30
10	Granodiorit	3.496,62	0.76
11	Hasil Erupsi Parasit	2.957,31	0.65
12	Kerikil, Pasir, Lempung, Lumpur, Batugamping Korall	28.330,67	6.19
13	Konglomerat, Lava, Breksi, Endapan Lahar, Tufa	1.449,86	0.32
14	Lava, Breksi, Tufa, Batupasir, Batulempung, Napal	53.214,49	11.62

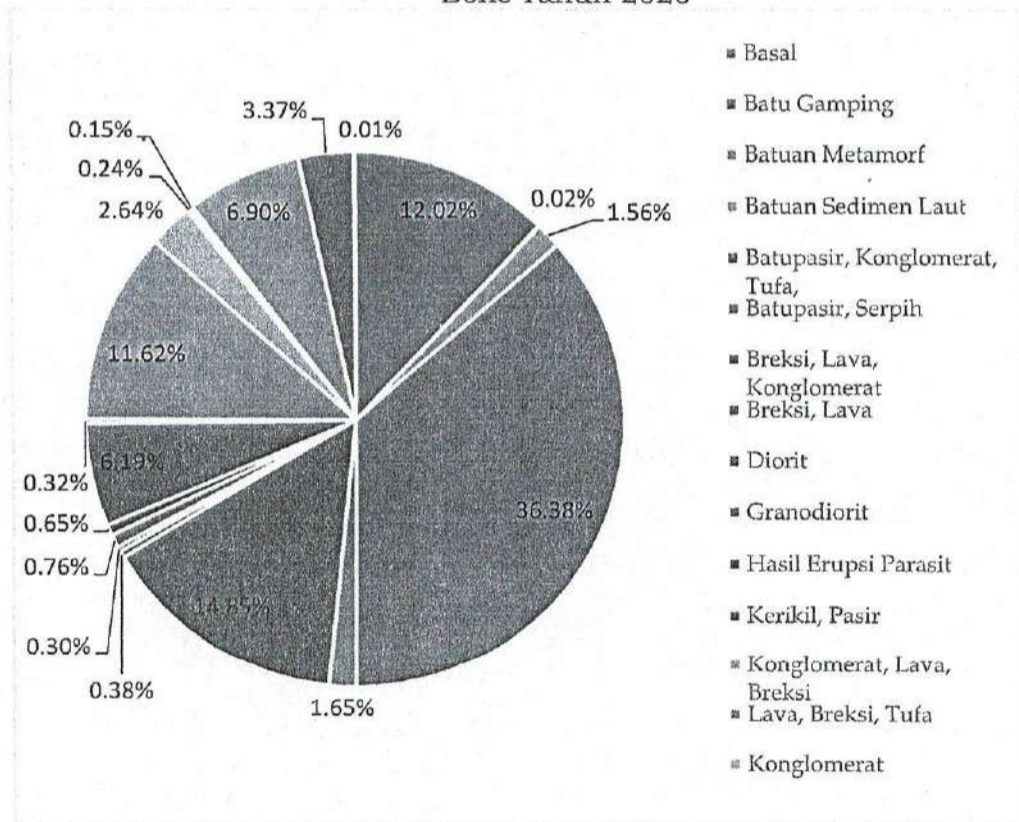


No	Jenis Batuan	Luasan (Ha)	Presentasi
15	Lava, Breksi, Tufa, Konglomerat	12.090,96	2.64
16	Batuan Gunung Api	1.083,61	0.24
17	Breksi, Lahar, Tufa	70,60	0.15
18	Tefrit Leusit : Lava, Breksi	31.610,98	6.90
19	Batu Gamping	15.426,62	3.37
	<b>Total</b>	<b>457.986,57</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Hasil Olah Data GIS Tahun 2021

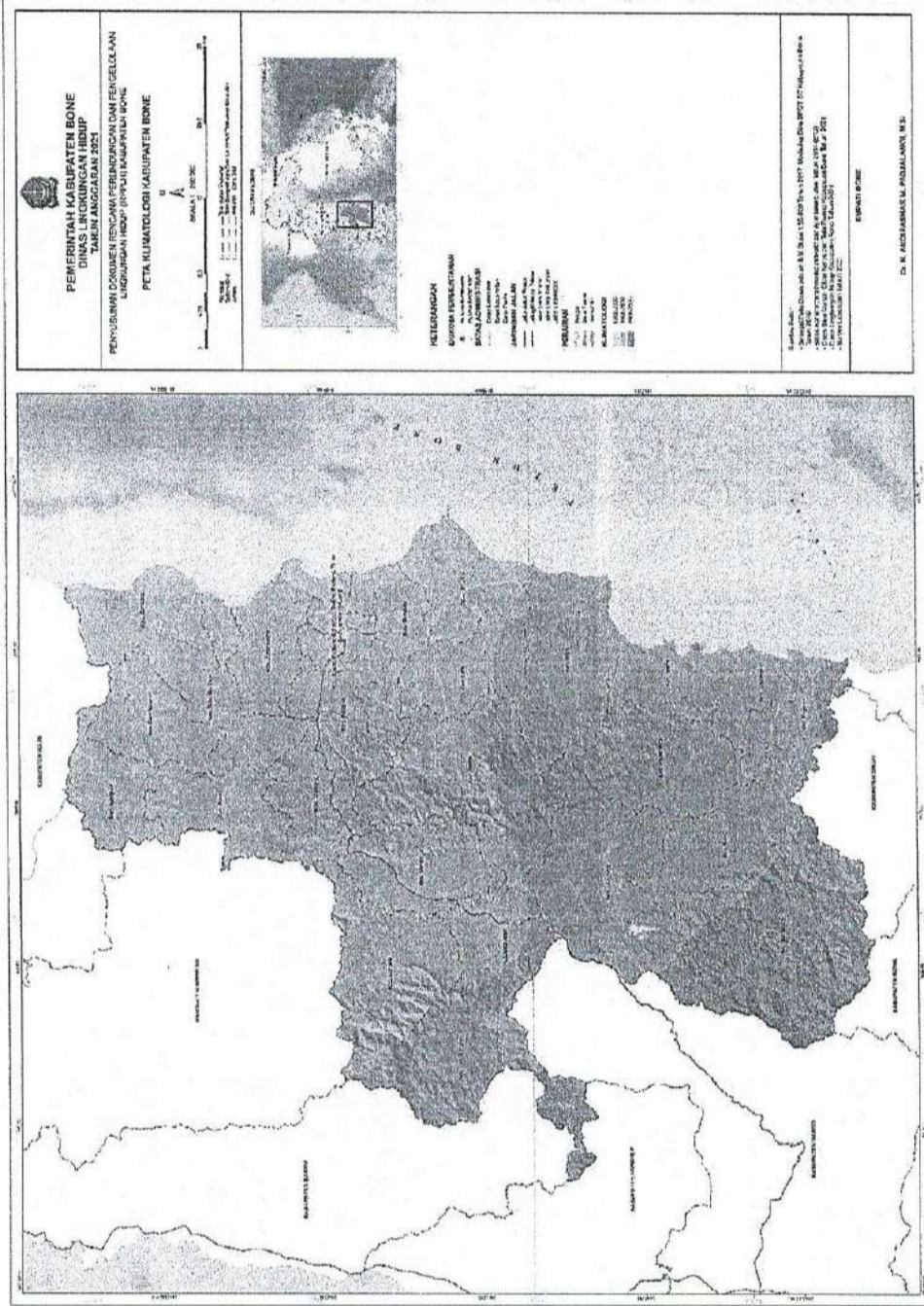
Berdasarkan **Tabel 2.4.**, jenis batuan di Kabupaten Bone didominasi oleh jenis batuan breksi, lava, konglomerat dan tufa yang tersebar seluas 68017.99 Ha, disusul dengan batuan gamping yang tersebar seluas 55055.61 Ha. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit di Kabupaten Bone adalah jenis batuan Basal yang tersebar seluas 34,43 Ha.

Diagram 2.2 Presentasi Luas Jenis Batuan di Kabupaten Bone Tahun 2020





Gambar 2.2. Peta Klimatologi Kabupaten Bone







#### 4. PENGGUNAAN LAHAN

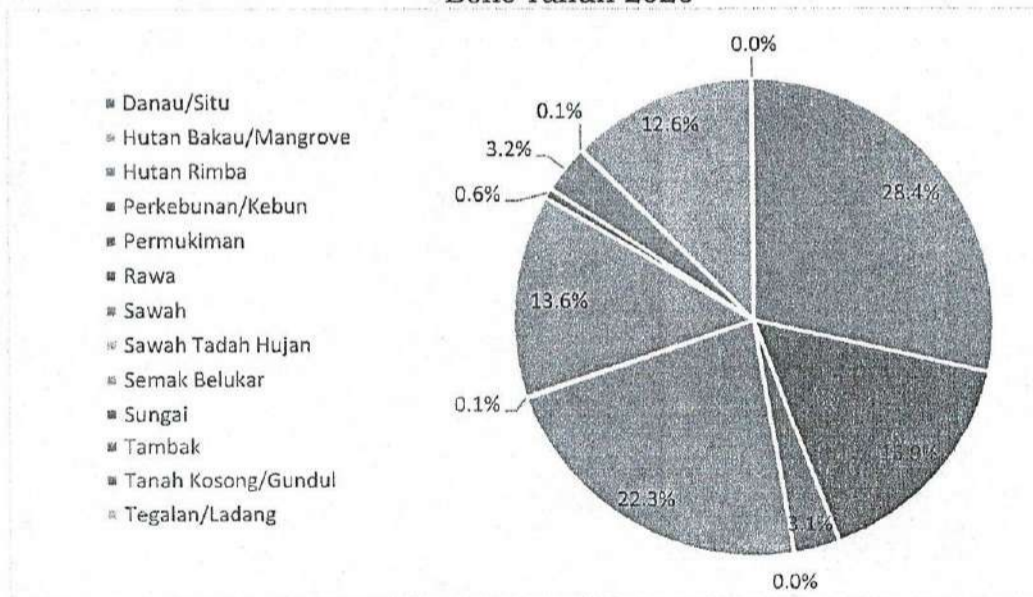
Penggunaan lahan di Kabupaten Bone di dominasi oleh wilayah hutan rimba seluas 130.149,77 Ha. Penggunaan lahan di Kabupaten Bone dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-2.5 Penggunaan Lahan di Bone, 2020

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentasi
1	Danau/Situ	30,30	0.01
2	Hutan Bakau/Mangrove	12,16	0.00
3	Hutan Rimba	130.149,77	28.42
4	Perkebunan/Kebun	72.646,86	15.86
5	Permukiman	14.281,59	3.12
6	Rawa	2,73	0.00
7	Sawah	102.297,87	22.34
8	Sawah Tadah Hujan	355,37	0.08
9	Semak Belukar	62.450,80	13.64
10	Sungai	2.905,81	0.63
11	Tambak	14.867,55	3.25
12	Tanah Kosong/Gundul	341,85	0.07
13	Tegalan/Ladang	57.643,90	12.59
<b>Total</b>		<b>457.986,57</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Hasil Olah Data GIS Tahun 2021

Diagram 2.3 Presentasi Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bone Tahun 2020





## 5. JENIS TANAH

Kabupaten Bone di dominasi oleh jenis tanah Mediteran Merah Kuning, Latosol seluas 198.278,13 Ha. Sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning, Litosol hanya seluas 3.937,65 Ha. Untuk lebih jelasnya, kondisi jenis tanah di Kabupaten Bone dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

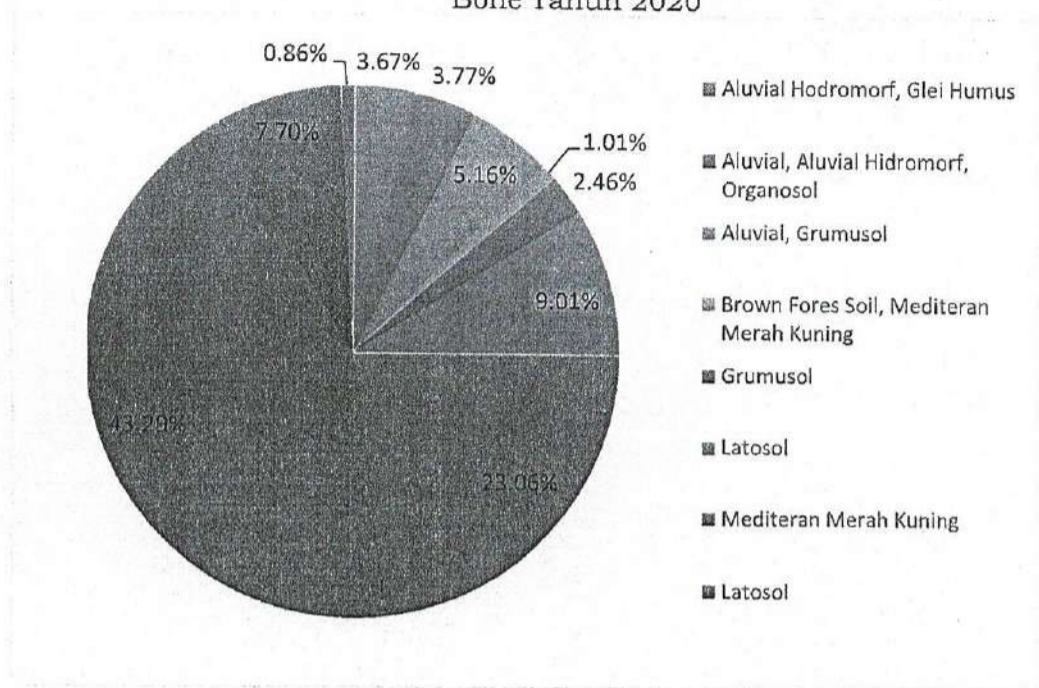
Tabel-2.6 Jenis Tanah di Kabupaten Bone, 2020

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Presentasi
1	Aluvial Hodromorf, Glei Humus	16.811,73	3.67
2	Aluvial, Aluvial Hidromorf, Organosol	17.265,09	3.77
3	Aluvial, Grumusol	23.634,14	5.16
4	Brown Fores Soil, Mediteran Merah Kuning	4.634,00	1.01
5	Grumusol, Mediteran Merah Kuning	11.280,21	2.46
6	Latosol, Litosol/Regosol	41.263,86	9.01
7	Mediteran Merah Kuning, Litosol, Mediteran Merah Kuning	105.620,06	23.06
8	Mediteran Merah Kuning, Latosol	198.278,13	43.29
9	Mediteran Merah Kuning, Rendzina	35.261,70	7.70
10	Podsolik Merah Kuning, Podsolik Merah Kuning, Litosol	3.937,65	0.86
<b>Total</b>		<b>457.986,57</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Hasil Olah Data GIS Tahun 2021



Diagram 2.4 Presentasi Luas Jenis Tanah di Kabupaten Bone Tahun 2020



## 6. KEMIRINGAN LERENG

Kemiringan lereng terluas berada di kemiringan 5 - 15% seluas 157.581,23 Ha. Untuk lebih jelasnya, kondisi kemiringan lereng di Kabupaten Bone dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

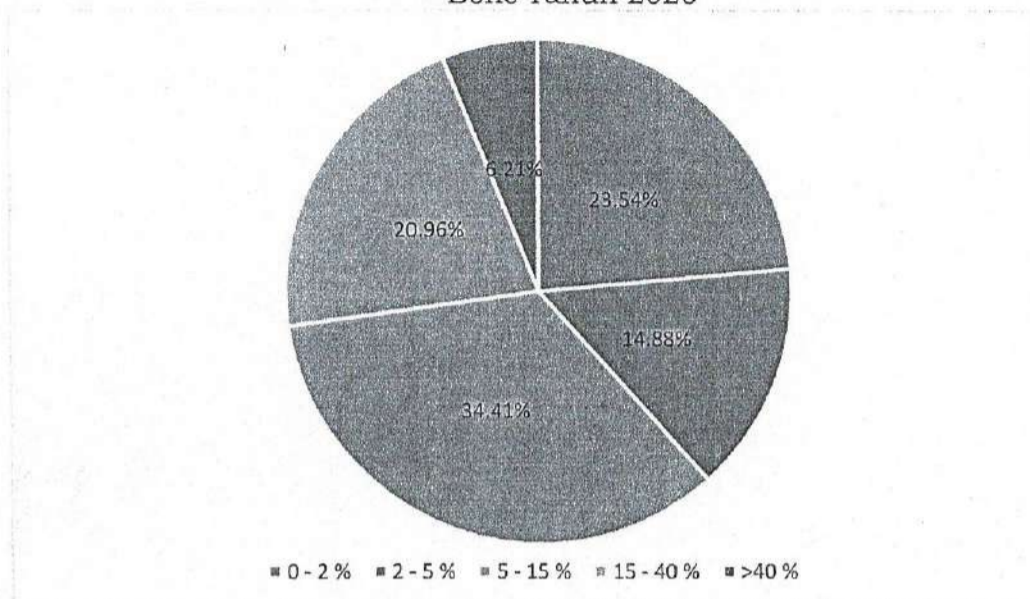
Tabel-2.7 Kemiringan Lereng di Kabupaten Bone, 2020

No	Kemiringan Lereng	Luas (Ha)	Presentasi
1	0 - 2 %	107.800,48	23.54
2	2 - 5 %	68.163,85	14.88
3	5 - 15 %	157.581,23	34.41
4	15 - 40 %	95.993,50	20.96
5	>40 %	28.447,51	6.21
<b>Total</b>		<b>457.986,57</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Hasil Olah Data GIS Tahun 2021



Diagram 2.5 Presentasi Luas Kemiringan Lereng di Kabupaten Bone Tahun 2020



## 7. TOPOGRAFI

Topografi terluas berada di 0 – 200 mdpl seluas 294.236,52 Ha, kemudian disusul 200 – 400 mdpl seluas 74.453,51 Ha. Untuk lebih jelasnya, kondisi topografi di Kabupaten Bone dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel-2.8 Topografi di Kabupaten Bone Tahun 2020

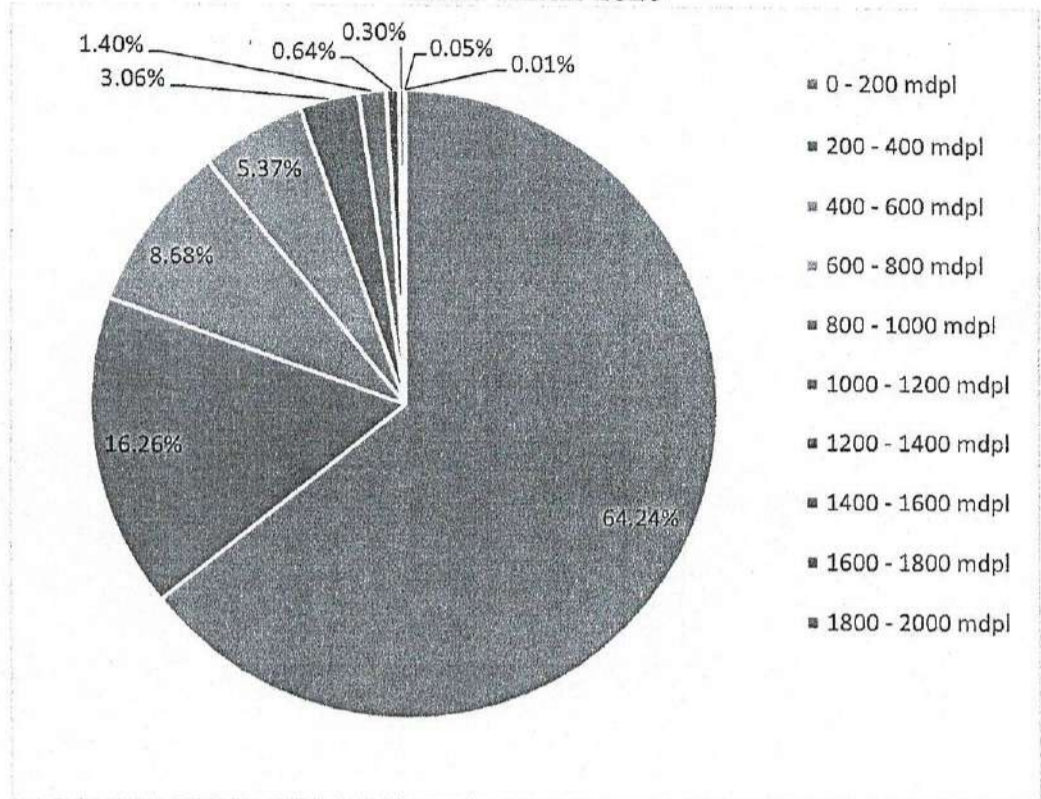
No	Topografi	Luas (Ha)	Presentasi
1	0 - 200 mdpl	294.236,52	64.25
2	200 - 400 mdpl	74.453,51	16.26
3	400 - 600 mdpl	39.760,93	8.68
4	600 - 800 mdpl	24.582,00	5.37
5	800 - 1000 mdpl	14.014,93	3.06
6	1000 - 1200 mdpl	6.413,96	1.40
7	1200 - 1400 mdpl	2.914,51	0.64
8	1400 - 1600 mdpl	1.366,35	0.30
9	1600 - 1800 mdpl	215,06	0.05
10	1800 - 2000 mdpl	28,80	0.01
<b>Total</b>		<b>457.986,57</b>	<b>100.00</b>

Sumber: Hasil Olah Data GIS Tahun 2021





Diagram 2.6 Presentasi Luas Topografi di Kabupaten Bone Tahun 2020













## B. Pemerintahan

Pada tahun 2020, wilayah administrasi Pemerintah Daerah Bone terbagi dalam 27 kecamatan yang terdiri dari 372 Desa/Kelurahan (44 Kelurahan dan 328 Desa). Dari 27 kecamatan yang ada, Kecamatan Kahu, Libureng dan Sibulue merupakan tiga kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak, masing-masing mempunyai 20 Desa/Kelurahan.

Tabel-2.9 Jumlah Desa/kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Bontocani	11
2.	Kahu	20
3.	Kajuara	18
4.	Salomekko	8
5.	Tonra	11
6.	Patimpeng	10
7.	Libureng	20
8.	Mare	18
9.	Sibulue	20
10.	Cina	12
11.	Barebbo	18
12.	Ponre	9
13.	Lappariaja	9
14.	Lamuru	12
15.	Tellulimpoe	11
16.	Bengo	9
17.	Ulaweng	15
18.	Palakka	15
19.	Awangpone	18
20.	Tellu Siattinge	17
21.	Amali	15
22.	Ajangale	14



No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
23	Dua Boccoe	22
24	Cenrana	16
25	Tanete Riattang Barat	8
26	Tanete Riattang	8
27	Tanete Riattang Timur	8
<b>Jumlah</b>		<b>372</b>

Sumber: Kabupaten Bone Dalam Angka, 2021

### C. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Bone pada tahun 2020 sebanyak 810.775 jiwa yang terdiri dari 391.682 jiwa penduduk laki-laki dan 401.093 jiwa penduduk perempuan, dengan penduduk terbanyak berada di Kecamatan Tanete Riattang yaitu sebesar 52.335 jiwa.

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per kilometer persegi. Kepadatan penduduk dapat dijadikan salah satu indikator penyebaran penduduk di suatu wilayah. Kepadatan penduduk di Kabupaten Bone pada tahun 2020 sekitar 175,87 jiwa/Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Tanete Riattang yaitu sekitar 2.199,87 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sedangkan kepadatan terendah berada di Kecamatan Bontocani yaitu sekitar 38,29 jiwa/Km<sup>2</sup>.

Tabel-2.10 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bone, 2017 - 2020

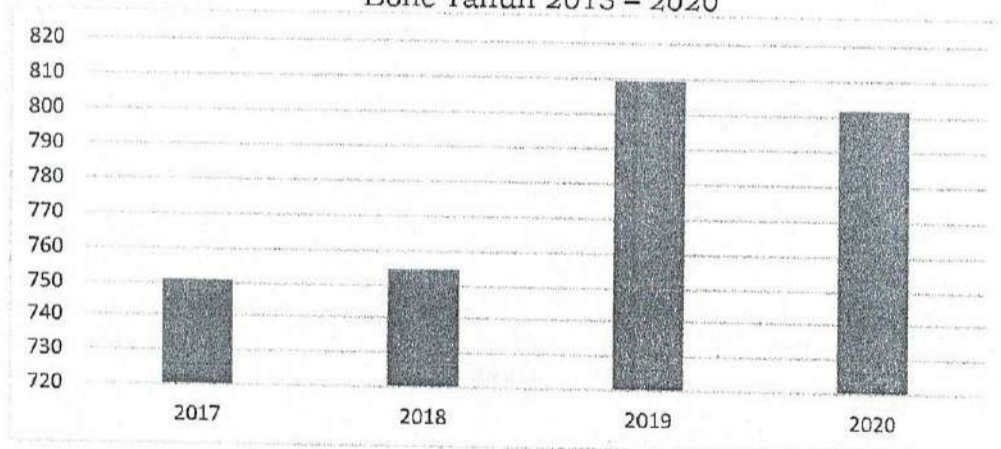
No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)			
		2017	2018	2019	2020
1	Bontocani	15.769	15.817	17.861	17.741
2	Kahu	38.947	39.124	40.733	40.663
3	Kajuara	36.688	36.929	35.526	36.897
4	Salomekko	15.617	15.691	16.660	16.638
5	Tonra	13.765	13.874	14.983	15.064
6	Patimpeng	16.702	16.822	18.183	18.117



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Ribu)			
		2017	2018	2019	2020
7	Libureng	30.010	30.107	31.697	31.943
8	Mare	26.956	27.168	29.199	28.817
9	Sibulue	34.418	34.621	35.652	35.418
10	Cina	26.587	26.719	28.564	28.438
11	Barebbo	27.743	27.898	30.200	29.806
12	Ponre	13.966	14.055	15.218	15.101
13	Lappariaja	23.911	23.993	27.647	26.970
14	Lamuru	25.059	25.145	26.610	26.252
15	Tellulimpoe	14.143	14.185	16.451	16.064
16	Bengo	25.512	25.542	27.810	27.009
17	Ulaweng	24.762	24.791	27.574	26.937
18	Palakka	22.713	22.783	26.054	25.548
19	Awangpone	29.495	29.599	34.233	33.773
20	Tellu Siattinge	40.135	40.180	46.099	45.711
21	Amali	20.755	20.778	21.793	21.257
22	Ajangale	27.474	27.504	28.835	28.547
23	Dua Boccoe	30.242	30.275	34.241	33.154
24	Cenrana	24.263	24.366	26.760	26.574
25	Tanete Riattang Barat	49.143	49.821	49.962	50.699
26	Tanete Riattang	52.677	53.161	54.131	52.335
27	Tanete Riattang Timur	43.574	43.946	45.774	46.302
<b>Total</b>		<b>751.026</b>	<b>754.894</b>	<b>809.441</b>	<b>801.775</b>

Sumber : BPS Kabupaten Bone Dalam Angka 2018,2019,2020,2021

Grafik 2.1 Persentasi Penduduk Miskin di Kabupaten Bone Tahun 2013 – 2020







Tabel-2.11 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan jenis kelamin di Kabupaten Bone, 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
0-4	29.243	28.475	57.718
5-9	29.754	29.030	58.784
10-14	35.235	33.233	68.468
15-19	37.729	35.939	73.668
20-24	35.912	34.629	70.541
25-29	33.041	32.500	65.541
30-34	28.214	29.314	57.528
35-39	26.905	28.583	55.488
40-44	26.482	28.570	55.052
45-49	25.333	27.384	52.717
50-54	21.819	24.322	46.141
55-59	17.832	21.265	39.097
60-64	14.964	18.496	33.460
65-69	11.679	14.860	26.539
70-75	8.858	10.756	19.614
75+	8.682	12.737	21.419
<b>Jumlah/ Total</b>	<b>391.682</b>	<b>410.093</b>	<b>801.775</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.12 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
1	Bontocani	17.741	38,29	100,8
2	Kahu	40.663	214,58	95,5
3	Kajuara	36.897	297,24	97,1
4	Salomekko	16.638	195,95	98,4
5	Tonra	15.064	75,20	96,3
6	Patimpeng	18.117	138,86	95,8
7	Libureng	31.943	92,79	97,6
8	Mare	28.817	109,36	97,1
9	Sibulue	35.418	227,33	94,0
10	Cina	28.438	192,80	95,8
11	Barebbo	29.806	261,00	93,5
12	Ponre	15.101	51,54	97,9



No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk per km <sup>2</sup>	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
13	Lappariaja	26.970	195,43	97,9
14	Lamuru	26.252	126,21	96,5
15	Tellulimpoe	16.064	50,50	104,5
16	Bengo	27.009	164,69	95,8
17	Ulaweng	26.937	166,62	95,3
18	Palakka	25.548	221,54	93,1
19	Awangpone	33.773	305,09	91,8
20	Tellu Siattinge	45.711	286,95	93,5
21	Amali	21.257	178,44	90,0
22	Ajangale	28.547	205,37	92,3
23	Dua Boccoe	33.154	228,81	92,5
24	Cenrana	26.574	185,06	95,9
25	Tanete Riattang Barat	50.699	944,47	96,2
26	Tanete Riattang	52.335	2199,87	94,1
27	Tanete Riattang Timur	46.302	947,26	98,7
<b>Jumlah</b>		<b>301.972</b>	<b>175.87</b>	<b>95.5</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

#### D. Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bone pada tahun 2020 adalah 352.006 jiwa, sedangkan jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 229.144 jiwa. Jumlah penduduk menurut jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel-2.13 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone, 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
<b>Angkatan Kerja</b>	<b>195.523</b>	<b>156.483</b>	<b>352.006</b>
Bekerja	188.934	151.812	340.746
Pengangguran	6.589	4.671	11.260



Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Terbuka			
<b>Bukan Angkatan Kerja</b>	<b>76.588</b>	<b>152.556</b>	<b>229.144</b>
Sekolah	15.459	18.963	34.422
Mengurus Rumah Tangga	48.456	122.718	171.174
Lainnya	12.673	10.875	23.548
<b>Jumlah</b>	<b>272.111</b>	<b>309.039</b>	<b>581.150</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.14 Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kabupaten Bone, 2020

Status Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Berusaha sendiri	43.841	29.733	73.574
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	72.003	22.339	94.342
Berusaha dibantu buruh tetap buruh dibayar	9.649	1.278	10.927
Buruh/Karyawan/Pegawai	36.454	40.309	76.763
Pekerja bebas	7.839	8.740	16.579
Pekerja Keluarga	19.148	49.413	68.561
<b>Jumlah</b>	<b>188.934</b>	<b>151.812</b>	<b>340.746</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa status pekerjaan terbanyak yang ada di Kabupaten Bone adalah Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar dengan jumlah penduduk sebanyak 94.342 jiwa.



### E. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang cukup kompleks karena berkaitan dengan berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dll.

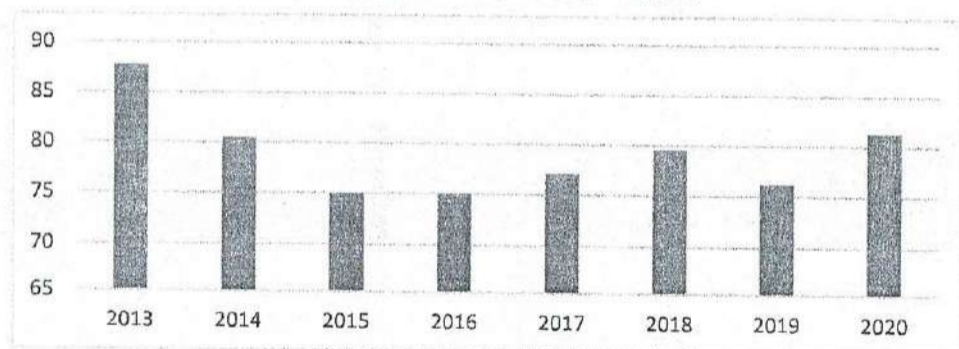
Garis kemiskinan Kabupaten Bone dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone berjumlah 81.33 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin sebanyak 10.68 %.

Tabel-2.15 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Bone, 2013-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
2013	233.943	87.7	11.92
2014	244.415	80.46	10.88
2015	252.392	75.01	10.12
2016	260.552	75.09	10.07
2017	272.555	77.13	10.28
2018	309.076	79.57	10.55
2019	325.422	76.25	10.05
2020	345.009	81.33	10.68

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Grafik 2.2 Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Bone Tahun 2013 - 2020





Tabel-2.16 Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks  
Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Bone, 2013-2020

Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin
2013	1.75	0.47
2014	1.5	0.37
2015	1.73	0.4
2016	1.51	0.31
2017	1.56	0.39
2018	1.44	0.3
2019	1.35	0.29
2020	1.59	0.36

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

## F. Pendidikan

Peningkatan partisipasi pendidikan merupakan sinyal yang baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai penggerak utama pembangunan. Namun, hal ini harus diikuti dengan peningkatan sarana fisik pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai.

Pendidikan merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian utama khususnya dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu berperan aktif dan memberikan kontribusi dalam pembangunan.

Pada tahun 2019 jumlah sekolah di Kabupaten Bone sebanyak 520 sekolah yang terdiri dari 139 Taman Kanak-kanak (TK), 31 Raudatul Athfal (RA), 235 Sekolah Dasar (SD), 14 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 49 Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMTP), 49 Madrasah Tsanawiyah (MTs), 16 Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA), 12 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan 17 Madrasah Aliyah (MA).



Tabel-2.17 Banyaknya Sekolah, Ruang Belajar, Kelas, Guru, dan Murid Menurut Jenis Sekolah, 2020

Jenis Sekolah	Sekolah	Murid	Guru
TK	477	18.428	1.495
RA	61	2.107	191
SD	674	69.535	5.637
MI	89	8.757	939
SMP	123	25.063	2.024
MTS	95	12.944	1.342
SMA	36	19.513	1.179
SMK	22	6.415	468
Aliyah (MA)	48	8.536	778

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.18 Banyaknya Sekolah, Ruang Belajar, Kelas, Guru dan Murid Pada Taman Kanak-Kanak Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Bontocani	11	344	28
Kahu	43	1.396	111
Kajuara	24	1.013	71
Salomekko	14	522	40
Tonra	15	497	51
Patimpeng	12	515	28
Libureng	18	562	55
Mare	28	914	89
Sibulue	25	1.061	85
Cina	20	723	67
Barebbo	26	1.035	90
Ponre	4	98	10
Lappariaja	10	361	28
Lamuru	9	251	22
Tellulimpoe	1	114	5
Bengo	10	307	33
Ulaweng	13	663	38
Palakka	11	507	39
Awangpone	21	730	64
Tellu Siattinge	18	782	47
Amali	16	559	39
Ajangale	18	688	50
Dua Boccoe	13	490	37
Cenrana	14	552	33
Tanete Riattang	32	1.367	130



Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Barat			
Tanete Riattang	30	1.379	117
Tanete Riattang Timur	21	998	88
<b>Jumlah</b>	<b>477</b>	<b>18.428</b>	<b>1.495</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.19 Banyaknya Sekolah, Ruang Belajar, Kelas, Guru dan Murid Pada Raudatul Athfal (RA) Menurut Kecamatan, 2020

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Bontocani	1	15	3
Kahu	2	50	5
Kajuara	4	160	9
Salomekko	-	-	-
Tonra	1	47	1
Patimpeng	2	43	5
Libureng	3	120	12
Mare	-	-	-
Sibulue	1	28	5
Cina	2	56	6
Barebbo	-	-	-
Ponre	1	26	2
Lappariaja	6	177	17
Lamuru	3	70	7
Tellulimpoe	-	-	-
Bengo	7	184	22
Ulaweng	1	46	2
Palakka	2	39	5
Awangpone	3	103	9
Tellu Siattinge	3	61	10
Amali	1	24	3
Ajangale	1	17	4
Dua Boccoe	1	37	3
Cenrana	2	54	5
Tanete Riattang Barat	4	104	6
Tanete Riattang	5	349	29
Tanete Riattang Timur	5	297	21
<b>Jumlah</b>	<b>61</b>	<b>2.107</b>	<b>191</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021



Tabel-2.20 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, Sekolah Dasar (SD)  
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Bontocani	23	1908	144
Kahu	28	3.011	263
Kajuara	30	3.761	277
Salomekko	13	1.654	121
Tonra	15	1.486	133
Patimpeng	13	1.540	112
Libureng	30	2.798	275
Mare	29	2.982	266
Sibulue	32	3.258	288
Cina	27	2.779	226
Barebbo	29	2.577	272
Ponre	21	1.287	135
Lappariaja	17	1.822	153
Lamuru	21	1.853	152
Tellulimpoe	14	1.494	81
Bengo	19	2.031	168
Ulaweng	27	2.110	196
Palakka	21	2.294	184
Awangpone	30	2.637	254
Tellu Siattinge	39	3.774	294
Amali	23	1.485	148
Ajangale	28	2.461	181
Dua Boccoe	40	2.822	265
Cenrana	33	2.568	184
Tanete Riattang Barat	14	3.644	214
Tanete Riattang	33	5.508	392
Tanete Riattang Timur	25	3.991	259
<b>Jumlah</b>	<b>674</b>	<b>69.535</b>	<b>5.637</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.21 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru  
Madrasah Ibtidaiyah (MI) Menurut Kecamatan di Kabupaten  
Bone, 2020

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Bontocani	3	18	8
Kahu	11	926	98





Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Kajuara	2	204	22
Salomekko	3	244	25
Tonra	-	-	-
Patimpeng	3	308	32
Libureng	3	93	17
Mare	-	-	-
Sibulue	3	329	62
Cina	1	120	8
Barebbo	3	304	41
Ponre	2	169	20
Lappariaja	6	686	60
Lamuru	6	599	51
Tellulimpoe	-	-	-
Bengo	4	350	50
Ulaweng	1	297	27
Palakka	5	88	10
Awangpone	6	716	90
Tellu Siattinge	4	300	36
Amali	5	316	53
Ajangale	4	199	27
Dua Boccoe	2	209	26
Cenrana	1	75	7
Tanete Riattang Barat	6	1.154	85
Tanete Riattang	3	432	35
Tanete Riattang Timur	3	621	49
<b>Jumlah</b>	<b>90</b>	<b>8.757</b>	<b>939</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.22 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Bontocani	6	547	53
Kahu	4	1.518	98
Kajuara	4	1.272	86
Salomekko	3	620	50
Tonra	2	444	38
Patimpeng	4	633	55



Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Libureng	8	935	87
Mare	5	1.195	103
Sibulue	6	1.075	107
Cina	4	924	79
Barebbo	4	1.182	92
Ponre	6	402	56
Lappariaja	4	986	75
Lamuru	4	389	45
Tellulimpoe	6	457	38
Bengo	4	572	48
Ulaweng	3	919	59
Palakka	6	867	79
Awangpone	4	1.013	80
Tellu Siattinge	4	1.235	88
Amali	5	531	62
Ajangale	5	788	68
Dua Boccoe	4	673	45
Cenrana	4	670	55
Tanete Riattang Barat	4	596	55
Tanete Riattang	6	3.162	217
Tanete Riattang Timur	4	1.458	106
<b>Jumlah</b>	<b>123</b>	<b>25.063</b>	<b>2.024</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.23 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTs) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Bontocani	3	164	22
Kahu	8	749	88
Kajuara	4	1.039	57
Salomekko	4	235	44
Tonra	2	216	21
Patimpeng	2	185	16
Libureng	4	640	73
Mare	1	293	17
Sibulue	5	614	63
Cina	2	275	28



Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Barebbo	3	238	40
Ponre	2	202	24
Lappariaja	4	955	108
Lamuru	6	657	49
Tellulimpoe	-	-	-
Bengo	2	98	21
Ulaweng	3	190	28
Palakka	-	-	-
Awangpone	5	450	60
Tellu Siattinge	7	721	98
Amali	3	238	23
Ajangale	3	505	55
Dua Boccoe	6	1.003	88
Cenrana	5	447	53
Tanete Riattang Barat	4	506	36
Tanete Riattang	4	1.780	186
Tanete Riattang Timur	3	544	44
<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>12.944</b>	<b>1.342</b>

*Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021*

Tabel-2.24 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, Sekolah Menengah Atas, Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Bontocani	2	365	21
Kahu	2	1.067	64
Kajuara	1	851	49
Salomekko	1	257	22
Tonra	1	669	46
Patimpeng	1	427	29
Libureng	2	1.011	57
Mare	1	1.067	59
Sibulue	1	892	40
Cina	1	762	46
Barebbo	-	-	-
Ponre	1	277	16
Lappariaja	1	1.026	47
Lamuru	1	514	32
Tellulimpoe	1	188	16
Bengo	1	497	24
Ulaweng	1	1.103	50



Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Palakka	2	323	25
Awangpone	1	545	42
Tellu Siattinge	1	715	33
Amali	1	381	29
Ajangale	1	631	41
Dua Boccoe	1	527	37
Cenrana	2	711	37
Tanete Riattang Barat	4	2.585	180
Tanete Riattang	2	1.336	83
Tanete Riattang Timur	2	786	54
<b>Jumlah</b>	<b>36</b>	<b>19.513</b>	<b>1.179</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.25 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Bontocani	-	-	-
Kahu	1	27	9
Kajuara	1	427	24
Salomekko	1	61	12
Tonra	-	-	-
Patimpeng	1	73	9
Libureng	1	583	35
Mare	1	624	34
Sibulue	-	-	-
Cina	1	56	6
Barebbo	1	392	33
Ponre	1	130	20
Lappariaja	-	-	-
Lamuru	-	-	-
Tellulimpoe	-	-	-
Bengo	-	-	-
Ulaweng	-	-	-
Palakka	-	-	-
Awangpone	1	242	13
Tellu Siattinge	1	35	6
Amali	-	-	-
Ajangale	1	172	10
Dua Boccoe	-	-	-
Cenrana	-	-	-



Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru
Tanete Riattang Barat	2	179	18
Tanete Riattang	5	2.215	146
Tanete Riattang Timur	3	1.199	93
<b>Jumlah</b>	<b>22</b>	<b>6.415</b>	<b>468</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.26 Banyaknya Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Tenaga Pengajar dan Mahasiswa Lulus di Kabupaten Bone

Tahun	Perguruan Tinggi	Mahasiswa		Tenaga Pengajar		Mahasiswa Lulus	
		Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan	Laki - laki	Perempuan
2014	4	727	1108	107	38	730	338
2015	4	690	1076	109	40	699	277
2016	3	1063	1565	91	47	405	680
2017	5	955	1738	123	64	353	627
2018	3	1176	1804	75	39	250	398

Sumber/ Source : STISIP Muhammadiyah Bone, STKIP Muhammadiyah Bone, STIKES Muhammadiyah STAI DDI Bone, dan STIKIP Veteran Bone

Tabel-2.27 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Bone, 2020

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI	97,22	105,97
SMP/MTs	84,49	91,81
SMA/SMK/MA	51,77	70,86

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.28 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Melek Huruf Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Bone, 2019 dan 2020

Kelompok Umur	2019	2020
15-19	100.00	100.00
20-24	99.25	100.00
25-29	99.39	98.41
30-34	98.17	99.13



Kelompok Umur	2019	2020
35-39	94.39	97.03
40-44	97.20	95.74
45-49	94.55	92.19
50+	77.23	78.04
<b>Jumlah</b>	<b>91.09</b>	<b>91.20</b>

*Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021*

### G. Kesehatan

Pada tahun 2020 jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten Bone antara lain: 4 Rumah Sakit, 38 Puskesmas, 30 Apotek, 11 Klinik dan 787 Posyandu. Selain ketersediaan fasilitas kesehatan, diperlukan jumlah tenaga kesehatan yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pada tahun 2019 terdapat sebanyak 23 dokter spesialis, 46 dokter umum, 21 dokter gigi, 42 tenaga medis, 30 farmasi, 142 perawat, 181 bidan dan 29 tenaga kesehatan lainnya.

Tabel-2.29 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Apotek	Klinik	Posyandu	Pustu
Bontocani	-	-	1	-	-	30	2
Kahu	-	-	2	1	-	43	4
Kajuara	-	-	1	3	-	36	6
Salomekko	-	-	1	-	-	21	2
Tonra	-	-	1	1	-	22	2
Patimpeng	-	-	1	-	-	23	4
Libureng	-	-	2	2	2	49	2
Mare	-	-	2	-	-	40	1
Sibulue	-	-	2	-	-	30	3
Cina	-	-	1	1	1	40	-
Barebbo	-	-	2	-	-	30	2
Ponre	-	-	2	-	-	14	4
Lappariaja	-	-	1	2	-	12	4
Lamuru	-	-	1	-	-	26	4
Tellulimpoe	-	-	1	-	-	29	2
Bengo	-	-	1	2	1	24	1



Kecamatan	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas	Apotek	Klinik	Posyandu	Pustu
Ulaweng	-	-	1	1	-	22	2
Palakka	-	-	2	-	-	34	2
Awangpone	-	-	2	-	-	42	3
Tellu Siattinge	-	-	2	-	-	65	4
Amali	-	-	1	-	-	-	4
Ajangale	-	-	2	2	-	34	3
Dua Boccoe	-	-	2	1	-	45	6
Cenrana	-	-	1	1	-	36	5
Tanete Riattang Barat	2	-	1	4	2	7	1
Tanete Riattang	2	-	1	6	4	20	-
Tanete Riattang Timur	-	-	1	3	1	13	2
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>787</b>	<b>75</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.30 Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lainnya
Bontocani	1	3	11	-	1
Kahu	6	14	21	-	2
Kajuara	1	5	16	-	1
Salomekko	5	6	5	-	2
Tonra	5	6	9	-	1
Patimpeng	2	8	8	-	3
Libureng	4	11	16	-	-
Mare	4	10	17	-	2
Sibulue	4	7	21	-	3
Cina	1	11	15	-	1
Barebbo	4	13	17	-	3
Ponre	5	6	7	-	2
Lappariaja	3	6	9	-	1
Lamuru	2	5	8	-	-
Tellulimpoe	2	-	8	-	1
Bengo	1	7	7	-	-
Ulaweng	1	9	12	-	1
Palakka	1	7	12	-	1



Kecamatan	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Keperawatan	Tenaga Kebidanan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Kesehatan Lainnya
Awangpone	5	10	19	-	2
Tellu Siattinge	2	5	17	-	1
Amali	-	4	11	-	-
Ajangale	3	3	14	-	2
Dua Boccoe	2	4	22	-	-
Cenrana	2	7	13	-	1
Tanete Riattang Barat	2	22	15	-	2
Tanete Riattang	4	18	6	-	3
Tanete Riattang Timur	4	12	10	-	2
<b>Jumlah</b>	<b>76</b>	<b>219</b>	<b>346</b>	<b>-</b>	<b>38</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

#### H. Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan tempat untuk menjalankan ibadah bagi umat yang beragama secara berjamaah untuk memenuhi kebutuhan rohani. Jumlah sarana peribadatan di daerah ini dari tahun ke tahun mengalami perkembangan seiring dengan penambahan pemeluk agama sebagai konsekuensi penambahan jumlah penduduk.

Pada tahun 2020 jumlah fasilitas peribadatan yang ada di Kabupaten Bone masjid sebanyak 1.450, musholah sebanyak 140 unit, gereja sebanyak 10 unit, dan vihara sebanyak 1 unit. Jumlah sarana peribadatan di Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel-2.31 Jumlah Sarana Peribadatan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone Tahun 2020

Kecamatan	Masjid	Musholah	Gereja	Vihara
Bontocani	49	-	-	-
Kahu	103	2	-	-





Kecamatan	Masjid	Musholah	Gereja	Vihara
Kajuara	67	-	-	-
Salomekko	33	11	-	-
Tonra	37	-	-	-
Patimpeng	57	7	-	-
Libureng	86	-	1	-
Mare	55	-	1	-
Sibulue	74	-	-	-
Cina	46	10	-	-
Barebbo	43	13	-	-
Ponre	42	2	-	-
Lappariaja	51	1	1	-
Lamuru	36	6	-	-
Tellulimpoe	36	-	-	-
Bengo	41	10	1	-
Ulaweng	40	10	-	-
Palakka	47	-	-	-
Awangpone	53	15	-	-
Tellu Siattinge	71	3	-	-
Amali	43	-	-	-
Ajangale	41	2	-	-
Dua Boccoe	71	5	-	-
Cenrana	43	9	-	-
Tanete Riattang Barat	60	-	2	1
Tanete Riattang	69	30	4	-
Tanete Riattang Timur	53	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.450</b>	<b>140</b>	<b>10</b>	<b>1</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

### I. Pertanian Hortikultura

Luas panen tanaman pertanian sayuran yang memiliki lahan paling luas adalah tanaman bawang merah, berada di Kecamatan Ajangale dengan luas 282 Ha. Kemudian disusul tanaman cabai besar berada di Kecamatan Bontocani seluas 134 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel-2.32 Luas Panen Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Ha) di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Kacang Panjang	Cabai Besar	Bawang Merah	Tomat	Cabai Rawit	Kangkung
Bontocani	37	134	6	28	62	18
Kahu	19	15	-	34	32	14
Kajuara	14	16	-	9	9	22



Kecamatan	Kacang Panjang	Cabai Besar	Bawang Merah	Tomat	Cabai Rawit	Kangkung
Salomekko	11	6	-	9	8	12
Tonra	25	10	-	10	13	24
Patimpeng	19	12	-	13	15	17
Libureng	12	31	-	9	16	11
Mare	25	13	-	13	10	13
Sibulue	10	10	-	21	13	16
Cina	18	6	-	10	9	17
Barebbo	23	18	3	35	15	40
Ponre	17	6	-	15	9	24
Lappariaja	12	10	-	12	14	19
Lamuru	12	7	1	21	12	15
Tellulimpoe	7	6	5	17	10	10
Bengo	13	12	-	9	10	28
Ulaweng	13	7	-	11	9	16
Palakka	22	8	1	16	16	29
Awangpone	13	12	-	12	13	19
Tellu Siattinge	14	7	-	20	6	15
Amali	15	8	3	14	13	16
Ajangale	14	12	282	20	16	16
Dua Boccoe	8	3	-	11	7	10
Cenrana	6	2	-	5	7	13
Tanete Riattang Barat	11	7	2	12	6	32
Tanete Riattang	6	4	1	4	7	23
Tanete Riattang Timur	6	2	-	4	3	15
<b>Jumlah</b>	<b>402</b>	<b>394</b>	<b>304</b>	<b>394</b>	<b>360</b>	<b>504</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Produksi tanaman sayuran terbanyak yaitu tanaman bawang merah yang berada di Kecamatan Ajangale dengan produksi 24.873 kuintal, kemudian disusul cabai besar di Kecamatan Bontocani dengan produksi 5.556 kuintal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel-2.33 Produksi Tanaman Sayuran Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (Kuintal) di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Kacang Panjang	Cabai Besar	Bawang Merah	Tomat	Cabai Rawit	Kangkung
Bontocani	1.808	5.556	523	1.143	1.981	646
Kahu	801	694	-	1.222	1.228	546



Kecamatan	Kacang Panjang	Cabai Besar	Bawang Merah	Tomat	Cabai Rawit	Kangkung
Kajuara	649	804	-	292	410	757
Salomekko	473	269	-	253	337	420
Tonra	1.173	442	-	327	487	829
Patimpeng	872	500	-	463	644	547
Libureng	471	1.324	-	398	669	412
Mare	1.120	525	-	532	463	458
Sibulue	492	469	-	847	497	579
Cina	743	244	-	400	342	570
Barebbo	1.029	731	253	1.428	618	1.324
Ponre	806	284	-	633	356	827
Lappariaja	554	389	-	358	482	574
Lamuru	490	282	85	852	520	534
Tellulimpoe	357	207	426	647	413	392
Bengo	583	439	-	347	298	898
Ulaweng	629	287	-	357	249	563
Palakka	893	682	87	661	630	995
Awangpone	591	563	-	365	433	654
Tellu Siattinge	673	294	-	795	286	499
Amali	649	346	259	505	577	528
Ajangale	609	500	24.873	730	485	552
Dua Boccoe	377	116	-	440	328	367
Cenrana	295	72	-	129	236	532
Tanete Riattang Barat	440	286	170	449	244	1.061
Tanete Riattang	254	169	85	141	247	834
Tanete Riattang Timur	284	49	-	134	123	530
<b>Jumlah</b>	<b>18.115</b>	<b>16.523</b>	<b>26.761</b>	<b>14.848</b>	<b>13.583</b>	<b>17.428</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Luas panen tanaman biofarmaka yang terluas yaitu tanaman kunyit seluas 1.250.380 m<sup>2</sup> berada di Kecamatan Lamuru dan di Kecamatan Ajangale dengan luas 690.700 m<sup>2</sup>. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel-2.34 Luas Panen Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (m<sup>2</sup>) di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Jahe	Lengkuas	Kencur	Kunyit	Temulawak
Bontocani	3.050	600	-	200	-
Kahu	-	-	-	-	-



Kecamatan	Jahe	Lengkuas	Kencur	Kunyit	Temulawak
Kajuara	1.200	3500	-	2.150	-
Salomekko	-	1.405	-	820	-
Tonra	-	-	-	-	-
Patimpeng	1.200	550	-	1.180	-
Libureng	620.000	1.200	-	600	-
Mare	-	3.550	-	100	-
Sibulue	11.500	10.300	-	11.645	-
Cina	-	700	-	465	-
Barebbo	1.075	13.170	-	14.150	-
Ponre	200	6.380	-	6.450	-
Lappariaja	-	17.107	-	19.150	-
Lamuru	110.000	15.550	4.535	1.250.380	-
Tellulimpoe	-	-	-	-	-
Bengo	1.930	880	-	7.975	-
Ulaweng	-	-	-	-	-
Palakka	9.600	66.200	108	8.000	1.198
Awangpone	-	53.440	-	8.358	-
Tellu Siattinge	10.730	35.500	4.341	1.750	1.852
Amali	46.200	18.561	-	690.700	13.895
Ajangale	14.671	3.741	-	15.162	-
Dua Boccoe	-	250	-	-	-
Cenrana	-	5.000	-	2.000	-
Tanete Riattang Barat	-	19.450	-	3.455	-
Tanete Riattang	330	190	80	1.900	-
Tanete Riattang Timur	100	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>831.786</b>	<b>277.224</b>	<b>9.064</b>	<b>2.046,590</b>	<b>16.945</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Produksi tanaman biofarmaka terbanyak yaitu tanaman kunyit yang berada di Kecamatan Lamuru dengan produksi 5.980,437 Kg dan di Kecamatan Amali dengan produksi 2.098,001 Kg. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel-2.35 Produksi Tanaman Biofarmaka Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman (kg) di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Jahe	Lengkuas	Kencur	Kunyit	Temulawak
Bontocani	5.080	3.396	-	612	-
Kahu	-	-	-	-	-
Kajuara	1.309	14.917	-	2.416	-
Salomekko	-	3.101	-	608	-
Tonra	-	-	-	-	-
Patimpeng	540	864	-	991	-
Libureng	1.891,916	7.872	-	648	-
Mare	-	6.307	-	96	-
Sibulue	23.505	69.799	-	15.950	-
Cina	-	2.014	-	1.014	-
Barebbo	2.333	66.167	-	23.227	-
Ponre	232	49.029	-	15.609	-
Lappariaja	-	63.334	-	66.772	-
Lamuru	253.200	85.200	10.165	5.980,437	-
Tellulimpoe	-	-	-	-	-
Bengo	3.561	4.946	-	25.199	-
Ulaweng	-	-	-	-	-
Palakka	23.612	349.831	167	23.318	1.773
Awangpone	-	225.880	-	37.509	-
Tellu Siattinge	12.447	125.670	7.938	5.058	2.519
Amali	105.534	100.891	-	2.098,001	22.372
Ajangale	33.312	15.629	-	37.223	-
Dua Boccoe	-	1.106	-	-	-
Cenrana	-	10.750	-	4.715	-
Tanete Riattang Barat	-	59.593	-	14.269	-
Tanete Riattang Barat	198	465	150	5.681	-
Tanete Riattang Timur	42	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.356,821</b>	<b>1.266,761</b>	<b>18.420</b>	<b>8.365,353</b>	<b>26.664</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Produksi buah-buahan terbanyak yaitu buah duku yang berada di Kecamatan Barebbo sebanyak 35.191 kuintal, kemudian disusul buah manga yang berada di Kecamatan Barebbo sebanyak 29.191kuintal. sedangkan produksi paling sedikit yaitu buah salak yang berada di Kecamatan Bontocani



dengan jumlah produksi 5 kuintal. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel-2.36 Produksi Buah-buahan Menurut Kecamatan dan Jenis Buah (kuintal) di Kabupaten Bone, 2020

Kecamatan	Mangga	Durian	Duku	Pisang	Pepaya	Salak	Sukun
Bontocani	4.107	282	249	6.754	695	5	712
Kahu	4.759	101	26	8.926	1.092	10	1.279
Kajuara	2.323	62	237	6.143	554	-	188
Salomekko	6.809	18	-	3.768	498	-	145
Tonra	6.093	1.681	2.848	7.557	1.597	-	317
Patimpeng	6.121	21	68	3.073	560	-	1--
Libureng	6.599	53	151	4.290	1.474	-	395
Mare	10.271	469	176	5.741	569	-	79
Sibulue	14.493	4.251	5.142	14.905	1.991	26	328
Cina	3.869	20	130	4.950	571	8	148
Barebbo	29.191	1.912	35.191	10.023	894	14	1.340
Ponre	6.710	2.879	11.291	9.731	1.505	-	1.365
Lappariaja	8.408	22	55	12.933	1.040	-	4.022
Lamuru	13.059	-	166	18.426	1.259	-	949
Tellulimpoe	3.850	16	65	9.476	380	10	302
Bengo	6.410	-	-	8.485	1.071	21	1.652
Ulaweng	15.515	1.351	3.220	28.734	862	-	8.112
Palakka	7.144	1.531	2.662	6.627	1.559	-	1.785
Awangpone	9.215	-	-	13.877	2.686	-	476
Tellu	4.436	-	72	19.352	1.455	-	6.256
Siattinge							
Amali	7.461	-	-	17.778	2.077	-	3.239
Ajangale	7.469	-	-	11.044	1.332	-	700
Dua Boccoe	7.624	-	-	17.484	1.491	-	9.138
Cenrana	1.748	-	-	6.612	194	-	78
Tanete	2.167	-	-	2.433	33	-	-
Riattang Barat							
Tanete Riattang	5.778	-	-	8.075	72	-	74
Tanete Riattang Timur	500	1.718	2.156	4.703	90	-	27
<b>Jumlah</b>	<b>202.129</b>	<b>16.387</b>	<b>63.905</b>	<b>271.900</b>	<b>27.601</b>	<b>94</b>	<b>43.206</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

#### J. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha di Kabupaten Bone cenderung meningkat dari tahun 2016 - 2020. Pada tahun 2016 jumlah PDRB atas dasar



harga berlaku sebesar 26.254,40 tahun 2017 sebesar 29.319,72 tahun 2018 sebesar 33.120,53 tahun 2019 sebesar 36.034,84 dan pada tahun 2020 sebesar 36.560,64 dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan yang terbesar dari lapangan usaha lainnya. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kabupaten Bone dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel-2.37 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kabupaten Bone, 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	12.977,64	14.526,69	16.341,50	17.009,67	17.207,35
Pertambangan dan Penggalian	985,69	1.066,13	1.204,47	1.316,94	1.364,42
Industri Pengolahan	1.791,53	2.017,32	2.101,73	2.513,48	2.509,90
Pengadaan Listrik dan Gas	20,11	23,81	26,11	27,42	28,52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,73	9,32	10,20	10,92	11,95
Konstruksi	2.565,22	2.888,21	3.364,25	3.833,84	3.958,63
Perdagangan Besar dan Eceran	2.999,74	3.403,62	4.009,76	4.541,98	4.463,79
Transportasi dan Pergudangan	608,30	648,18	735,72	836,26	755,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	129,81	148,76	170,45	190,43	177,78
Informasi dan Komunikasi	382,90	432,32	495,85	547,14	613,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	811,43	895,77	1.000,25	1.066,15	1.099,06
Real Estat	965,44	1.037,96	1.122,74	1.211,28	1.275,79
Jasa Perusahaan	15,95	17,94	20,34	22,90	21,59
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	1.127,27	1.218,45	1.400,98	1.659,98	1.684,56
Jasa Pendidikan	558,99	639,95	720,94	798,99	898,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	220,70	249,09	282,89	320,36	371,51



Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Jasa Lainnya	84,94	96,21	112,35	127,07	118,22
<b>Jumlah</b>	<b>26.254,40</b>	<b>29.319,72</b>	<b>33.120,53</b>	<b>36.034,84</b>	<b>36.560,64</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.38 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) di Kabupaten Bone, 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8.457,26	9.164,71	9.972,95	10.305,18	10.207,02
Pertambangan dan Penggalian	507,05	563,00	624,83	682,79	695,39
Industri Pengolahan	1.225,64	1.315,92	1.347,70	1.571,69	1.541,61
Pengadaan Listrik dan Gas	22,59	23,89	25,41	26,45	27,87
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,41	7,79	8,46	9,01	9,79
Konstruksi	1.665,83	1.815,31	1.968,53	2.157,57	2.201,28
Perdagangan Besar dan Eceran	2.206,71	2.436,76	2.726,07	2.992,50	2.905,24
Transportasi dan Pergudangan	413,91	442,96	493,69	550,42	482,20
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	94,56	105,76	119,38	130,02	117,28
Informasi dan Komunikasi	372,03	410,73	459,37	502,21	560,59
Jasa Keuangan dan Asuransi	522,87	550,05	585,16	602,64	618,20
Real Estat	571,17	598,21	626,06	664,39	698,26
Jasa Perusahaan	11,42	12,33	13,54	14,98	13,68
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	754,19	793,69	885,47	1.027,01	1.024,89
Jasa Pendidikan	429,19	470,40	517,06	556,41	613,88
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	177,88	194,12	213,08	234,30	263,90
Jasa Lainnya	58,48	64,92	73,29	80,44	72,67
<b>Jumlah</b>	<b>17.498,18</b>	<b>18.970,53</b>	<b>20.660,07</b>	<b>22.108,04</b>	<b>22.053,74</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021





Tabel-2.39 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah) di Kabupaten Bone, 2016-2020

Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10,49	8,37	8,82	3,33	-0,95
Pertambangan dan Penggalian	10,50	11,04	10,98	9,28	1,85
Industri Pengolahan	9,08	7,37	2,42	16,62	-1,91
Pengadaan Listrik dan Gas	14,11	5,77	6,36	4,08	5,37
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,61	5,08	8,67	6,80	8,38
Konstruksi	7,43	8,97	8,44	9,60	2,03
Perdagangan Besar dan Eceran	10,31	10,42	11,87	9,77	-2,92
Transportasi dan Pergudangan	3,17	7,02	11,45	11,49	-12,39
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,71	11,84	12,89	8,91	-9,80
Informasi dan Komunikasi	10,84	10,40	11,84	9,32	11,63
Jasa Keuangan dan Asuransi	13,11	5,20	6,38	2,99	2,58
Real Estat	2,47	4,73	4,66	6,12	5,10
Jasa Perusahaan	7,13	7,99	9,86	10,62	-8,71
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Jaminan Sosial Wajib	-1,13	5,24	11,56	15,99	-0,21
Jasa Pendidikan	7,31	9,60	9,92	7,61	10,33
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,67	9,13	9,77	9,96	12,63
Jasa Lainnya	8,90	11,01	12,89	9,75	-9,66
<b>Jumlah</b>	<b>9,01</b>	<b>8,41</b>	<b>8,91</b>	<b>7,01</b>	<b>-0,25</b>

Sumber/Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

#### K. Transportasi

Sarana transportasi yang ada di darat, laut, dan udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam aspek sosial ekonomi melalui fungsi distribusi antara daerah satu dengan daerah yang lain. Hal tersebut tentunya bertujuan untuk mempermudah penduduk antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya untuk dapat ikut merasakan hasil produksi yang rata maupun hasil dari pembangunan yang ada.

Distribusi barang, manusia, dll akan menjadi lebih mudah dan cepat bila sarana transportasi yang ada berfungsi



sebagaimana mestinya sehingga transportasi dapat menjadi salah satu sarana untuk mengintegrasikan berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bone.

Tabel-2.40 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Bone (Km), 2018-2020

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019	2020
Negara	316,53	316,53	316,53
Provinsi	98,70	98,70	98,70
Kabupaten/Kota	1.559,51	1.559,51	1.559,51
Desa	922,14	922,14	922,14
<b>Jumlah</b>	<b>2.896,88</b>	<b>2.896,88</b>	<b>2.896,88</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.41 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Bone (Km), 2017-2019

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019	2020
Aspal	786,64	770,04	856,96
Kerikil	701,33	719,50	624,25
Tanah	46,41	17,50	17,50
Lainnya	25,14	50,47	60,80
<b>Jumlah</b>	<b>1.559,51</b>	<b>1.559,51</b>	<b>1.559,51</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021

Tabel-2.42 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Bone (Km), 2018-2020

Tingkat Kewenangan Pemerintahan	2018	2019	2020
Baik	686,72	445,76	681,77
Sedang	236,26	401,62	247,26
Rusak	267,96	300,27	153,27
Rusak Berat	368,57	411,86	477,22
<b>Jumlah</b>	<b>1.559,51</b>	<b>1.559,51</b>	<b>1.559,51</b>

Sumber/ Source: BPS Kabupaten Bone Tahun 2021



## L. Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Bone cukup banyak, hal ini disebabkan oleh luas wilayah dan kondisi bentang alam Kabupaten Bone yang sangat kompleks yaitu mulai dari pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, garis pantai, sungai, danau, dan laut. Berdasarkan data dari Hasil Integrasi Data KSP dan RBI Skala 1:50.000 Tahun 2017, jenis pertambangan di Kabupaten Bone terdiri atas Batubara, Batu Gamping, Logam, Granit, dan Marmer dengan luas kawasan pertambangan sebesar 372.777,15 Ha.

Tabel-2.43 Potensi Pertambangan di Kabupaten Bone

No	Jenis Tambang	Lokasi Kecamatan	Luas (Ha)
1	Batu Gamping	Amali	4.345,54
		Awangpone	509,05
		Barebbo	3.017,73
		Bengo	4.051,10
		Bontocani	11.718,74
		Cina	1.782,72
		Dua Boccoe	1.034,94
		Kahu	769,05
		Lamuru	6.130,46
		Lappa Riaja	1.491,78
		Libureng	384,22
		Palakka	5.140,70
		Patimpeng	254,48
		Ponre	1.785,48
		Tanete Riattang Barat	28,93
Tellu Limpoe	610,53		
Tellu Siattinge	2.439,24		
Ulaweng	10.272,04		
		<b>Luas</b>	<b>55.766,73</b>
2	Batubara	Ajangale	10.582,22
		Amali	10.697,55
		Awangpone	11.307,80
		Barebbo	7.953,79
		Bengo	11.227,89
		Cenrana	3.512,25



No	Jenis Tambang	Lokasi Kecamatan	Luas (Ha)
		Cina	8.440,11
		Dua Boccoe	11.325,53
		Kahu	9.040,88
		Kajuara	2.639,22
		Lamuru	5.399,96
		Lappa Riaja	5.858,00
		Libureng	15.746,81
		Mare	2.760,80
		Palakka	6.026,52
		Patimpeng	4.684,47
		Ponre	3.234,34
		Salomekko	1.069,99
		Sibulue	8.611,46
		Tanete Riattang	2.760,11
		Tanete Riattang Barat	3.955,04
		Tanete Riattang Timur	4.173,24
		Tellu Limpoe	238,44
		Tellu Siattinge	13.176,62
		Ulaweng	2.702,09
		<b>Luas</b>	<b>167.125,14</b>
<b>3</b>	<b>Granit</b>	Bontocani	2.027,38
		Kahu	1.240,27
		<b>Luas</b>	<b>3.267,65</b>
<b>4</b>	<b>Logam</b>	Barebbo	460,90
		Bengo	4.345,41
		Bontocani	27.236,71
		Cina	6.623,27
		Kahu	2.370,25
		Kajuara	2.954,44
		Lamuru	1.816,22
		Lappa Riaja	978,96
		Libureng	4.825,16
		Mare	16.939,18
		Palakka	1.794,56
		Patimpeng	17.710,15
		Ponre	29.819,06
		Salomekko	6.306,91
		Tellu Limpoe	591,03
		Tonra	6.739,10
		Ulaweng	1.274,60



No	Jenis Tambang	Lokasi Kecamatan	Luas (Ha)
		<b>Luas</b>	<b>132.785,91</b>
5	Marmer	Bontocani	12.621,63
		Kahu	920,09
		Libureng	289,99
		<b>Luas</b>	<b>13.831,72</b>
<b>Total Luas Pertambangan</b>			<b>372.777,15</b>

Sumber : Hasil Integrasi Data KSP dan RBI Skala 1:50.000 Tahun 2017

Potensi pertambangan paling luas yaitu jenis pertambangan batubara dengan luas 167.125,14 Ha, sedangkan jenis pertambangan paling kecil yaitu pertambangan granit dengan luas 3.267,65 Ha.

Bedasarkan data Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, beberapa jenis pertambangan yang dikelola oleh sembilan perusahaan dan memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bone. Jenis pertambangan yang telah dikelola seluas 21.057,22 Ha, dengan jenis pertambangan yang paling luas yaitu pertambangan tembaga yang berada di Kecamatan Libureng dengan luas 9.983,09 Ha.



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

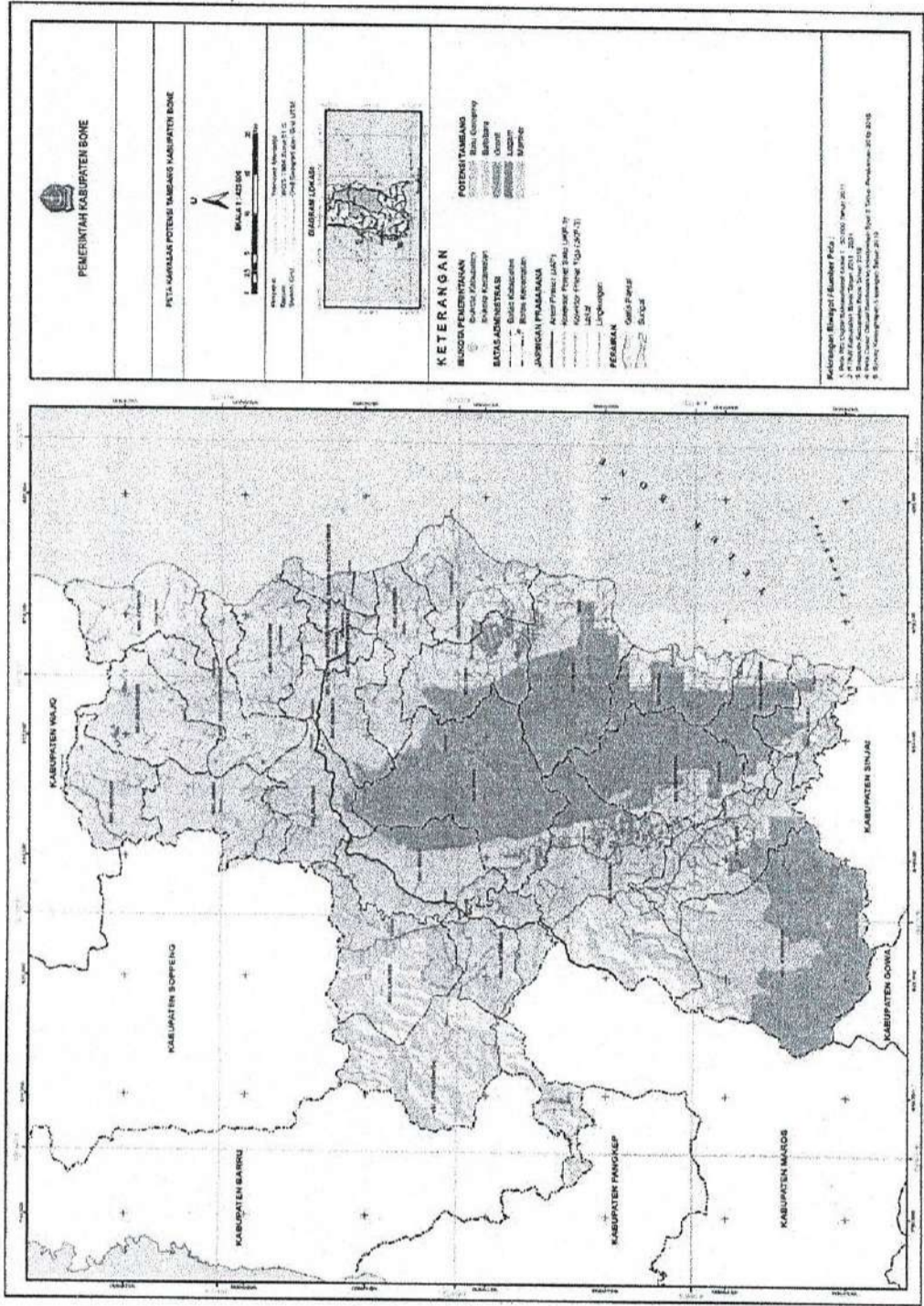
Perusahaan Pertambangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Bone

No	Perusahaan	No. SK Perusahaan	Jenis Pertambangan	Lokasi Kecamatan	Luas (Ha)
1	Alaska Dwipa Perdana	306 tahun 2012	Mangan	Ponre	197,36
2	Batu Mulia Sulawesi	0474/P2T-BKPM/9.29.P/VII/12/2015	Besi	Bonto Cani	383,90
3	Duta Basma Inti	469 Tahun 2010	Batubara	Lamuru	17,68
4	Jatropa Bangkit Perkasa	251 tahun 2012	Mangan	Salomekko & Kajuara	1.994,93
5	Korin Anugrah Minerals	172 tahun 2012	Mangan	Ponre	2.016,41
6	Merdeka Mineral Indonesia	433 Tahun 2012	biji besi	Bontocani	6.079,03
7	Pasir Walanae	1/I.03H.P/P2T/12/2017	Batubara	Lamuru	202,78
8	Pasir Walanae Mineral	4/I.03h/PTSP/2018	Batubara	Lamuru	182,05
9	Wijaya Eka Sakti	589 tahun 2014	Tembaga	Libureng	9.983,09
<b>Luas Pertambangan</b>					<b>21.057,22</b>

Sumber : Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019



Gambar 2.8. Peta Potensi Wilayah Pertambangan Kabupaten Bone





### M. Kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS)

Luas Daerah Aliran sungai di Kabupaten Bone yaitu 409.706,55 Ha yang terdiri dari 8 (delapan) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Baleng, DAS Bila Walanae, DAS Labalang, DAS Lonrong, DAS Marek, DAS Matuju, DAS Salomeko, dan DAS Tangka. DAS Bila Walanae merupakan daerah aliran sungai yang memiliki daerah paling luas yaitu 254.378,10 Ha, sedangkan daerah aliran sungai yang paling kecil yaitu DAS Labalang dengan luas 4.689,15 ha.

Berdasarkan hasil olah data terkait daerah aliran sungai di Kabupaten Bone maka dapat diketahui daerah aliran sungai yang dipulihkan daya dukungnya yaitu terdiri atas DAS Bila Walanae, DAS Marek, DAS Matuju, dan DAS Tangka dengan luas 323.962,15 Ha, sedangkan daerah aliran sungai yang dipertahankan daya dukungnya yaitu DAS Baleng, DAS Labalang, DAS Lonrong, dan DAS Salomeko dengan luas 85.744,40 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel-2.44 Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Bone yang dipertahankan dan dipulihkan

No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kecamatan	Luas (Ha)	Keterangan
1	Baleng	Awangpone	4.477,17	Dipertahankan
		Barebbo	1.489,52	
		Palakka	8.983,13	
		Ponre	4.239,01	
		Tanete Riattang	215,17	
		Tanete Riattang Barat	2.501,44	
		Ulaweng	692,76	
	<b>Jumlah</b>	<b>22.598,21</b>		
2	Bila Walanae	Ajangale	11.876,92	Dipulihkan
		Amali	15.134,55	
		Awangpone	1.788,94	





No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kecamatan	Luas (Ha)	Keterangan
		Bengo	18.731,23	
		Bontocani	35.814,15	
		Cenrana	12.140,50	
		Dua Boccoe	14.650,22	
		Kahu	13.258,13	
		Lamuru	21.522,47	
		Lappa Riaja	14.099,79	
		Libureng	32.746,22	
		Patimpeng	8.159,81	
		Ponre	8.327,56	
		Tellu Limpoe	25.028,12	
		Tellu Siattinge	12.279,98	
		Ulaweng	8.819,52	
		<b>Jumlah</b>	<b>254.378,10</b>	
<b>3</b>	<b>Labalang</b>	Kajuara	27,77	Dipertahankan
		Patimpeng	147,41	
		Salomekko	4.123,26	
		Tonra	390,71	
		<b>Jumlah</b>	<b>4.689,15</b>	
<b>4</b>	<b>Lonrong</b>	Barebbo	4.288,05	Dipertahankan
		Bengo	3,87	
		Cina	10.137,75	
		Ponre	13.339,52	
		Sibulue	10.235,47	
		<b>Jumlah</b>	<b>38.004,66</b>	
<b>5</b>	<b>Marek</b>	Cina	4.302,47	Dipulihkan
		Libureng	1.905,01	
		Mare	19.930,06	
		Patimpeng	8.862,00	
		Ponre	7.720,82	
		Sibulue	2.438,25	
		Tonra	1.005,82	
		<b>Jumlah</b>	<b>46.164,43</b>	
<b>6</b>	<b>Matuju</b>	Awangpone	4.492,04	Dipulihkan
		Palakka	1.468,07	
		Ponre	0,21	

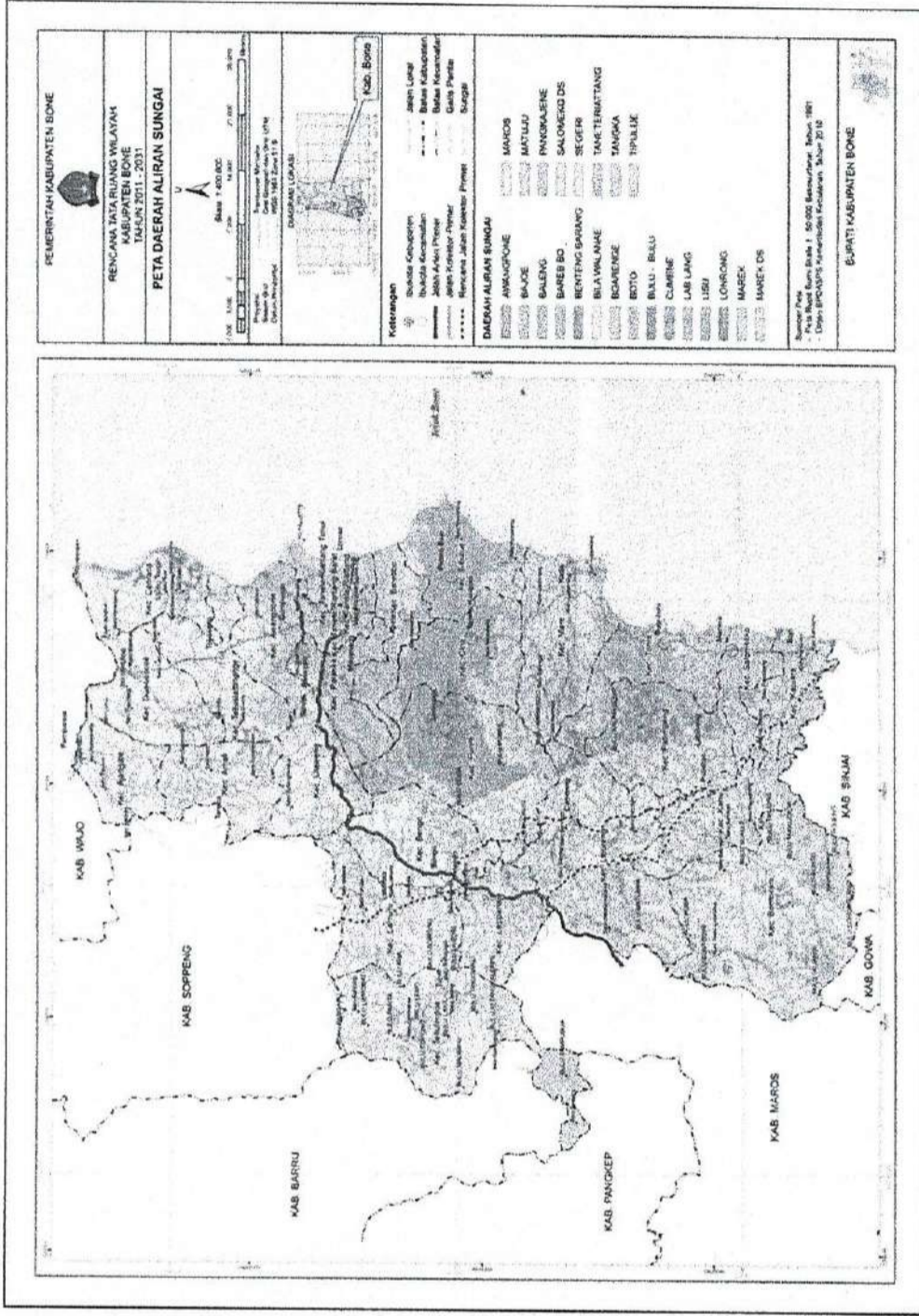


No	Daerah Aliran Sungai (DAS)	Kecamatan	Luas (Ha)	Keterangan
		Tellu Siattinge	3.305,83	
		Ulaweng	4.319,37	
		<b>Jumlah</b>	<b>13.585,52</b>	
7	Salomeko	Bontocani	3.194,31	Dipertahankan
		Kahu	5.208,12	
		Kajuara	5.901,27	
		Patimpeng	2.663,41	
		Salomekko	3.485,28	
		<b>Jumlah</b>	<b>20.452,38</b>	
8	Tangka	Bontocani	6.626,51	Dipulihkan
		Kahu	730,79	
		Kajuara	2.476,81	
		<b>Jumlah</b>	<b>9.834,10</b>	
		<b>Jumlah Luas DAS Dipulihkan</b>	<b>323.962,15</b>	
		<b>Jumlah Luas DAS Dipertahankan</b>	<b>85.744,40</b>	
		<b>Total Luas DAS</b>	<b>409.706,55</b>	

Sumber: Hasil Olah Data GIS Tahun 2021



Gambar 2.9. Peta DAS Kabupaten Bone





## N. Keanekaragaman Ekosistem

Kabupaten Bone memiliki beragam ekosistem baik yang merupakan ekosistem alami maupun ekosistem buatan, baik yang merupakan ekosistem kering (hutan, perkebunan, perladangan, pekarangan) maupun ekosistem lahan basah (laut, pantai, rawa, waduk, sangai dan sawah). Keanekaragaman hayati di dalam seluruh ekosistem yang ada juga sangat tinggi baik keanekaragaman hayati yang masih liar maupun yang telah dibudidayakan. Untuk memudahkan dalam menggambarkan kekayaan sumberdaya hayati maka keanekaragaman ekosistem di kabupaten ini dikelompokkan menjadi empat kelompok ekosistem yaitu :

- ✓ Ekosistem hutan
- ✓ Agroekosistem
- ✓ Ekosistem lahan basah (perairan tawar umum : sungai, danau, waduk, rawa)
- ✓ Ekosistem pesisir dan laut

### 1) Ekosistem Hutan

Luas Hutan di Kabupate Bone sekitar  $\pm$  130.149,77 Ha, yang terdiri dari Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, Hutan Wisata Alam, Hutan Produksi, dan Hutan Konversi. Tipe hutan yang berada di wilayah kabupaten ini sebagian besar merupakan tipe hutan tropis kering dataran rendah sampai dengan dataran tinggi. Di dalam ekosistem hutan ini, terdapat berbagai jenis tumbuhan yang dapat menghasilkan berbagai jenis hasil hutan nirkayu seperti : anggrek, terpentin, getah damar, madu, rotan, dan sebagainya. Selain itu juga terdapat berbagai jenis tumbuhan yang berkhasiat untuk pengobatan tradisional



seperti : berbagai jenis empon-empon (jahe, kunyit, laos, lempuyang, temu), dan berbagai jenis tumbuhan yang lain

## **2) Agroekosistem dan Keanekaragaman Hayati di Dalamnya**

Agroekosistem di wilayah Kabupaten Bone terdiri dari sawah, ladang/huma, kebun/tegalan, dan pekarangan. Flora atau tumbuhan yang berada di dalam agroekosistem ini sebagian besar merupakan tanaman budidaya, meskipun terdapat pula tumbuhan liarnya. Dari berbagai jenis tanaman budidaya yang terdapat atau diusahakan oleh masyarakat, beberapa jenis tanaman terutama dari tanaman buah-buahan, keanekaragaman varietas/spesies yang terdapat di dalam agroekosistem ini cukup banyak. Jenis tanaman manga, pisang, rambutan, durian, dan jambu.

Di dalam agroekosistem ini juga terdapat berbagai jenis ternak yang diusahakan oleh masyarakat di wilayah ini. Berbagai jenis ternak yang ada adalah sapi, kambing, domba, kuda, dan unggas (ayam dan itik). Jenis-jenis ternak besar digembalakan di habitat kebun/tegal, huma/ladang, dan di lahan-lahan kosong yang ada di wilayah ini (di pinggiran hutan), dan ada juga dibudidayakan dengan cara dikandangan di habitat pekarangan. Untuk itik digembalakan di sawah-sawah sementara ayam kampung dipelihara dengan dibiarkan mencari makan di habitat pekarangan. Khusus untuk ayam-ayam ras (pedaging, petelur) di pelihara dalam kandang.



### 3) Ekosistem Lahan Basah dan Keanekaragaman Hayati di Dalamnya

Ekosistem lahan basah yang dimaksud adalah ekosistem perairan tawar umum yang terdiri dari danau, sungai, waduk dan rawa. Luas danau/situ yang ada di Kabupaten Bone  $\pm$  30,30 Ha.

Ekosistem sungai yang paling besar adalah ekosistem Sungai Walanae. Sungai ini berhulu di Kecamatan Bontocani, mengalir melalui Kabupaten Soppeng hingga Danau Tempe di Kabupaten Wajo, kemudian mengalir lagi masuk ke Bone hingga bermuara di Teluk Bone. Sungai-sungai yang lain terdapat 18 sungai yang ada di Kabupaten Bone seperti Sungai Cenrana, Sungai Palakka, Sungai Pattiro, Sungai Jaling, Sungai Unyi, Sungai Maradda, Sungai Lerang, Sungai Pallengoreng, Sungai Bengo, Sungai Malinrung, Sungai Dekko, Sungai Melle, Sungai Lekoballo, Sungai Coppo Bulu, Sungai Tanete Buang, Sungai Mico, Sungai Paccing, dan Sungai Corowali.

Panjang Sungai Walannaie yang mengalir khusus di Kabupaten Bone  $\pm$  60 Km sementara untuk sungai-sungai yang lain antara 7 - 60 Km. Di dalam ekosistem lahan basah ini juga terdapat berbagai jenis ikan dan udang, baik dari jenis-jenis introduksi (eksotik) maupun jenis-jenis lokal. Beberapa jenis ikan yang terdapat di dalam ekosistem lahan basah ini adalah ikan mas, tawes, nilam, nila, gabus, sepat, sidat, wader, udang air tawar dan beberapa jenis lainnya. Beberapa jenis ikan air tawar yang endemik di perairan umum kabupaten Bone belum banyak dikaji.



#### 4) Ekosistem Pesisir dan Lautan dan Keanekaragaman Hayati di Dalamnya.

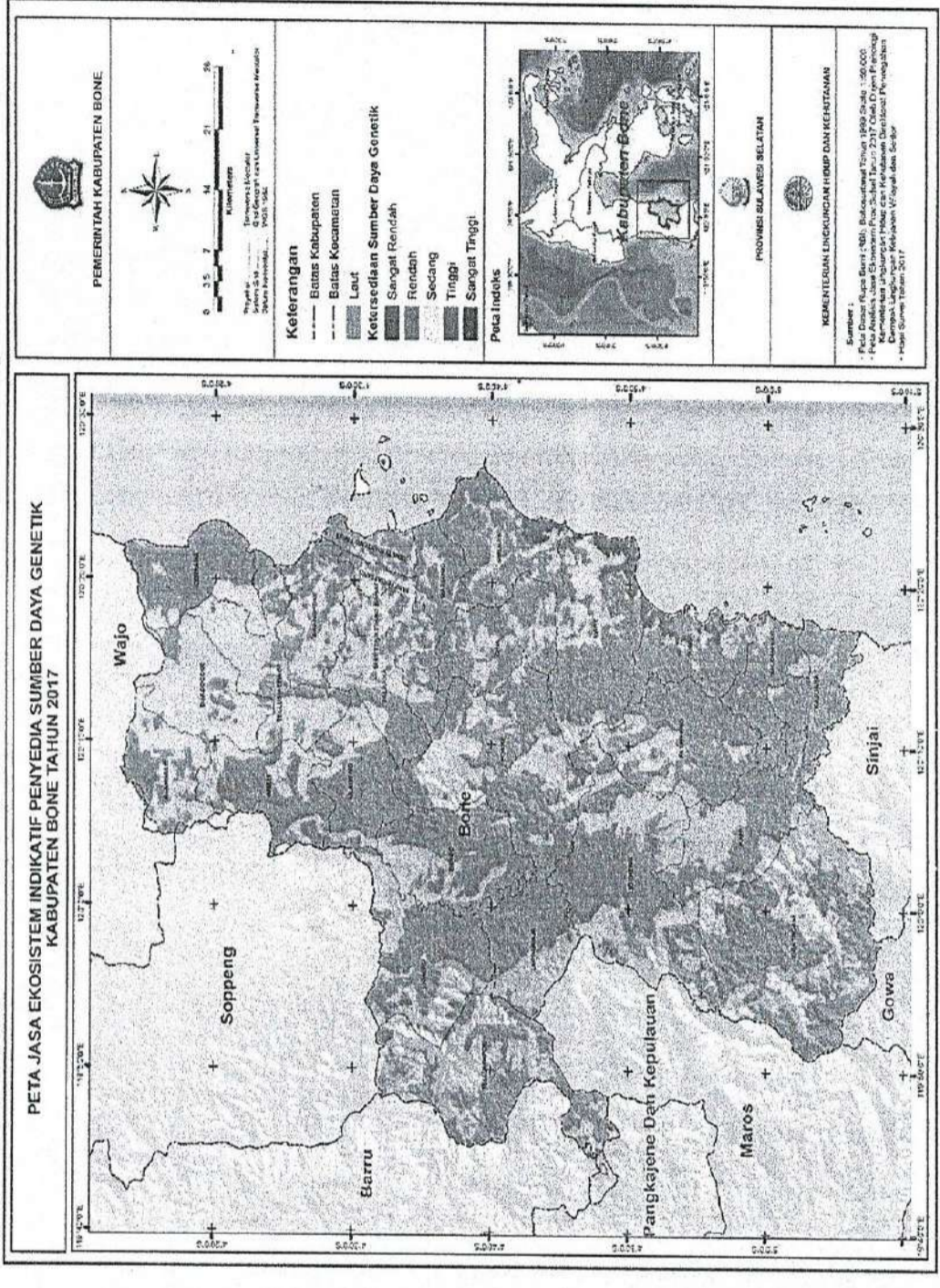
Wilayah kabupaten Gowa memiliki pesisir sepanjang ± 138 Km di bagian barat wilayah ini yang berbatasan dengan Teluk Bone. Sebagian besar disepanjang pesisir merupakan tambak-tambak baik untuk memelihara bandeng maupun udang. Ekosistem pesisir yang masih alami (berupa hutan mangrove dengan jenis vegetasi *Avicennia sp*, *Rhizophora sp*) di wilayah ini sangat terbatas. Keberadaan vegetasi mangrove terpencar-pencar di antara tambak-tambak yang ada.

Hasil utama perikanan di ekosistem pesisir ini adalah bandeng dan udang windu. Diekosistem pesisir ini juga masih dijumpai beberapa jenis burung pantai seperti elang laut (*Haliaeetus leucogaster*), bluwok (*Mysteria cinerea*), walet (*Collocalia esculenta*), pecuk ular (*Anhinga melanogaster*), dan cagak laut (*Ardea sumatrana*).

Keanekaragaman jenis ikan laut yang berada di Teluk Gowa di sekitar wilayah Kabupaten Bone dapat diketahui melalui hasil tangkapan oleh masyarakat nelayan di wilayah ini. Berbagai jenis ikan laut hasil tangkapan meliputi : ikan peperek, bambangan, kerapu, lencam, kurisi, gulama, cucut, pari, layang, selar, kuwe, ikan terbang, belanak, teri, japuh, tembang, lamuru, kembang, cakalang, udang putih, cumi-cumi, dan tenggiri.



Gambar 2.10. Peta Jasa Ekosistem Genetik Kabupaten Bone







### **O. Kejadian Bencana**

Kejadian bencana di Kabupaten Bone berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Tahun 2011 sampai Tahun 2021 yaitu sebanyak 1.060 kejadian dengan jumlah korban sebanyak 37.651 Jiwa. Adapun bencana yang paling sering terjadi yaitu bencana kebakaran sebanyak 715 kejadian, yang terdampak di 646 desa/kelurahan. Sedangkan jumlah korban yang paling banyak terdampak bencana terjadi pada Tahun 2021 dengan jumlah korban sebanyak 7.147 jiwa.



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

Tabel-2.45 Data Kejadian Bencana di Kabupaten Bone Tahun 2011 – 2021

No	Tahun	Jumlah Kejadian										Jumlah Desa/Kelurahan Terdampak					Jumlah Korban
		Keba karan	Puttting Beliuang	Banjir	Long sor	Gempa Bumi	Gagal Teknologi	Keke ringan	Keba karan	Puttting Beliuang	Banjir	Longsor	Gempa Bumi	Gagal Teknologi	Keke ringan		
1	2011	64	21	-	-	-	-	-	64	31	-	-	-	-	-	320	
2	2012	77	14	1	-	-	-	-	77	20	1	-	-	-	-	221	
3	2013	65	18	17	1	-	-	-	65	24	71	1	-	-	-	6.134	
4	2014	80	8	18	8	1	-	-	80	9	67	8	-	-	-	6.170	
5	2015	82	13	-	1	-	-	1	82	23	-	1	-	-	5	307	
6	2016	54	10	3	2	1	-	-	54	14	3	2	1	-	-	179	
7	2017	68	11	8	1	-	-	-	68	13	23	1	-	-	-	3.981	
8	2018	90	22	18	9	-	-	-	74	20	49	10	-	-	-	6.885	
9	2019	57	14	4	7	-	-	-	50	19	6	6	-	-	-	926	
10	2020	34	17	14	4	-	-	1	32	17	43	3	1	-	-	5.381	
11	2021	44	40	30	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.147	
<b>Jumlah</b>		715	188	113	40	2	1	1	646	190	263	32	1	5	-	37.651	

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022



#### **P. Upaya-Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Bone**

Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021, Beberapa kegiatan yang saat ini dilakukan dalam rangka upaya pengelolaan lingkungan hidup antara lain:

- 1) Meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup  
Untuk mencapai sasaran strategis ini maka telah dilakukan beberapa program atau kegiatan, di antaranya :
  - a) Program perencanaan lingkungan hidup
  - b) Penyusunan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten
  - c) Penyelenggaraan kajian lingkungan hidup streategis (KLHS) kabupaten
  - d) Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
  - e) Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten
  - f) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
  - g) Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
  - h) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten.
  - i) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
  - j) Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten.



- k) Koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemar.
  - l) Koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar.
  - m) Pengelolaan keanekaragaman hayati.
  - n) Pengelolaan ruang terbuka hijau.
  - o) Program pengelolaan persampahan.
  - p) Penyusunan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten .
  - q) Penanganan dan peningkatan sarana persampahan dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten.
  - r) Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.
- 2) Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan Lingkungan
- Untuk mencapai sasaran strategis ini maka telah dilakukan beberapa program atau kegiatan, di antaranya :
- a) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3).
  - b) Penyimpanan sementara limbah b3.
  - c) Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah b3.
  - d) Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)



- e) Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan / atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah.
- f) fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH.
- g) Pengawasan usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kabupaten.
- h) Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
- i) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten.
- j) Pendampingan gerakan peduli lingkungan hidup.
- k) Program penanganan pengaduan lingkungan hidup.
- l) Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) kabupaten.
- m) Pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH kabupaten.

#### **Q. Kinerja Layanan/Jasa Lingkungan**

Jasa lingkungan adalah manfaat yang diperoleh oleh manusia dari berbagai sumberdaya dan proses alam yang secara bersama-sama diberikan oleh suatu ekosistem yang dikelompokkan ke dalam empat macam manfaat yaitu manfaat penyediaan (*provisioning*), produksi pangan dan air; manfaat pengaturan (*regulating*) pengendalian iklim dan penyakit; manfaat pendukung (*supporting*), seperti siklus nutrien dan polinasi tumbuhan; serta manfaat kultural (*cultural*), spiritual dan rekreasional. Sistem klasifikasi jasa ekosistem tersebut



menggunakan standar dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005). Diasumsikan semakin tinggi jasa lingkungan suatu wilayah, maka semakin tinggi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Kajian ini terutama ditujukan untuk memperkirakan kinerja layanan atau fungsi ekosistem yang terutama didalamnya adalah yaitu :

- a. Layanan/fungsi penyedia (*provisioning services*) : Ekosistem memberikan jasa/produk darinya, seperti misalnya sumber daya alam, sumber daya genetika, air.
- b. Layanan/fungsi pengatur (*regulating services*) : Ekosistem memberikan manfaat melalui pengaturan proses alam, seperti misalnya pengendalian banjir, pengendalian erosi, dan pengaturan iklim.
- c. Layanan/fungsi budaya (*cultural services*) : Ekosistem memberikan manfaat non material yang memperkaya kehidupan manusia, seperti misalnya pengkayaan perasaan dan nilai spiritual, pengembangan tradisi dan adat istiadat, pengalaman batin, nilai-nilai estetika dan pengetahuan.
- d. Layanan/fungsi pendukung kehidupan (*supporting services*) : Ekosistem menyediakan dan/atau mendukung pembentukan faktor produksi primer yang diperlukan makhluk hidup, seperti misalnya produksi biomassa, produksi oksigen, nutrisi, dan air.

Kajian yang dilakukan terutama ditujukan untuk mengidentifikasi jenis-jenis layanan/fungsi suatu ekosistem serta gambaran kemampuan dan keberfungsianannya. Adapun hasil analisis penyediaan jasa lingkungan di Kabupaten Bone diperlihatkan pada uraian dibawah ini :



## 1. JASA PENYEDIAAN LINGKUNGAN

### a. Jasa Lingkungan Penyediaan Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air yaitu ketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentang lahan.

Tabel-2.46 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air Di Kabupaten Bone

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyediaan Air (Hektar)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Ajangale	3.627,53	2.753,40	5.303,75	26,21	5,92
Amali	6.017,22	7.702,17	919,79	6,94	334,50
Awangpone	2.787,38	2.937,96	6.120,75	24,74	60,66
Barebbo	277,82	4.153,61	6.723,76	3,92	75,23
Bengo	1.314,06	5.137,45	12.157,41	47,25	89,74
Bontocani	343,36	12.364,19	32.971,97	62,96	29,15
Cenrana	1.091,45	4.417,03	8.865,51	70,87	61,59
Cina	1.227,73	6.215,44	6.956,91	16,91	97,45
Duaboccoe	5.780,70	2.843,07	6.102,48	29,39	296,57
Kahu	139,43	4.991,97	13.965,18	17,18	179,74
Kajuara	562,89	2.320,23	6.946,31	140,15	-
Lamuru	729,84	4.418,48	16.504,78	144,09	40,34
Lappariaja	2.197,39	5.563,11	6.253,22	44,27	56,01
Libureng	1.133,76	12.492,24	20.568,28	188,34	22,81
Mare	425,91	7.803,61	15.906,86	75,30	139,94
Palakka	1.864,02	5.978,36	4.234,35	60,69	3,54



Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyediaan Air (Hektar)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Patimpeng	1.110,71	3.331,64	16.719,08	11,35	13,49
Ponre	1.907,27	6.827,84	24.760,10	52,82	21,56
Salomekko	1.091,36	3.074,05	5.475,91	21,50	27,75
Sibulue	52,44	1.965,27	13.220,76	23,89	63,95
Taneteriattang	138,27	964,08	1.632,22	3,84	18,48
Taneteriattang Barat	928,87	1.276,12	1.804,05	12,89	-
Taneteriattang Timur	-	752,07	3.649,14	-	5,92
Tellulimpoe	502,40	3.143,01	25.924,78	80,43	334,50
Tellusiattinge	7.375,76	3.838,96	5.686,67	6,59	60,66
Tonra	425,99	2.299,67	9.198,63	22,22	75,23
Ulaweng	3.951,69	4.345,23	5.554,75	1,21	89,74
<b>Total (ha)</b>	<b>47.005,24</b>	<b>123.910,23</b>	<b>284.127,40</b>	<b>1.195,94</b>	<b>1.829,96</b>
<b>Total (%)</b>	<b>10,26</b>	<b>27,05</b>	<b>62,03</b>	<b>0,26</b>	<b>0,40</b>

Sumber: Hasil Analisis TIM, Tahun 2021

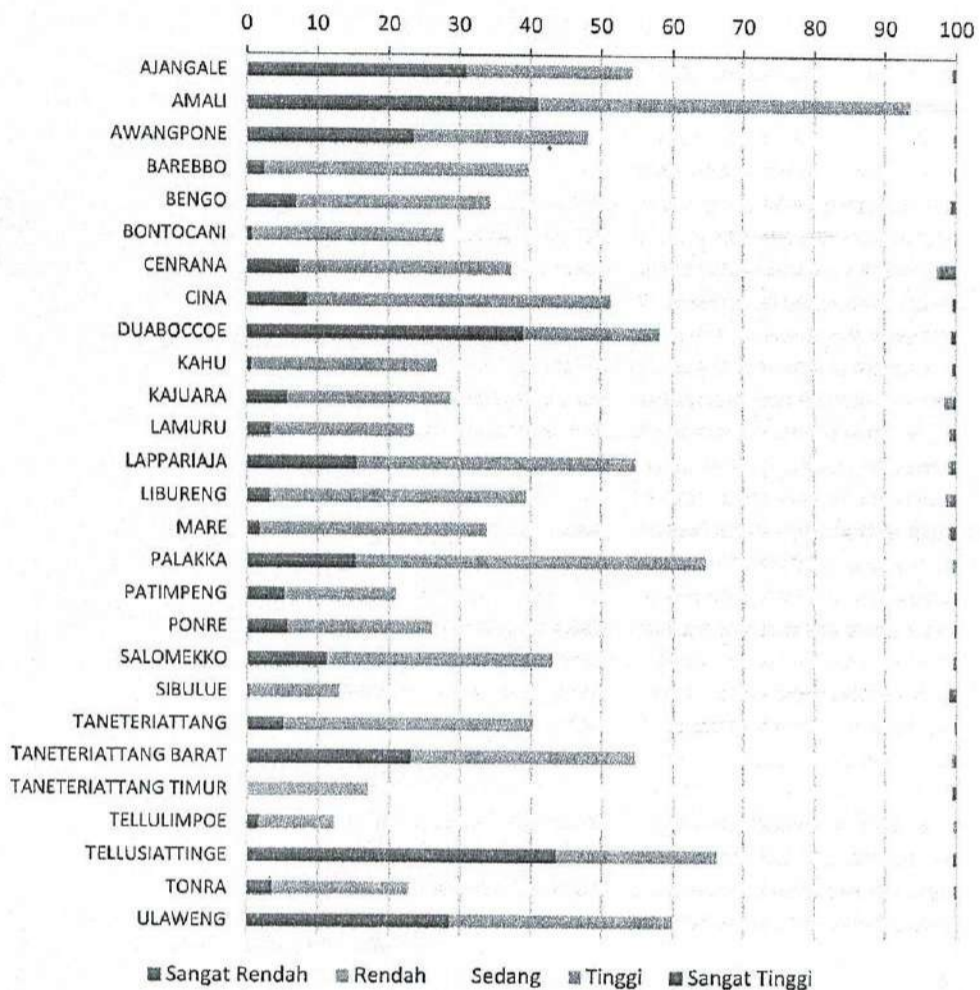
Berdasarkan hasil olah data diatas, Jasa Lingkungan Penyediaan Air di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi - sangat tinggi) sebesar 0,66%. Kategori sedang sebesar 62,03% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah - rendah) sebesar 37,31% dari total luas wilayah Kabupaten Bone. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone secara umum kemampuan jasa lingkungan menyediakan air yang dapat dimanfaatkan berada pada kategori sedang.

Berdasarkan hasil analisis kategori jasa lingkungan penyediaan air untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki jasa





lingkungan penyediaan air yang paling rendah terdapat pada Kecamatan Amali dan Pallakka. Sementara yang memiliki jasa lingkungan penyediaan air tinggi terdapat pada Kecamatan Kajuara dan Bontocani.



Grafik 2.3 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Air di Kabupaten Bone





### b. Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan

Jasa lingkungan memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan.

Tabel-2.47 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan Di Kabupaten Bone

Kecamatan	Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan (Hektar)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Ajangale	213,12	242,54	4.983,43	3.854,25	2.458,14
Amali	239,58	152,49	13.782,20	336,14	148,31
Awangpone	533,03	246,24	5.102,73	4.154,38	1.848,17
Barebbo	91,26	513,43	2.893,10	1.976,31	5.700,36
Bengo	376,41	117,27	12.256,00	4.989,47	1.026,28
Bontocani	343,36	34,74	43.157,63	1.727,10	485,57
Cenrana	150,19	300,39	4.324,25	3.310,39	6.694,14
Cina	57,80	619,64	4.429,45	5.259,91	4.110,86
Duaboccoe	335,12	188,53	7.269,16	3.134,70	3.903,36
Kahu	114,87	1.112,24	6.530,09	3.172,44	8.273,86
Kajuara	322,27	445,54	2.049,28	5.049,87	2.131,76
Lamuru	385,70	239,85	18.845,19	2.021,25	366,80
Lappariaja	238,83	350,03	11.072,89	545,35	1.948,33



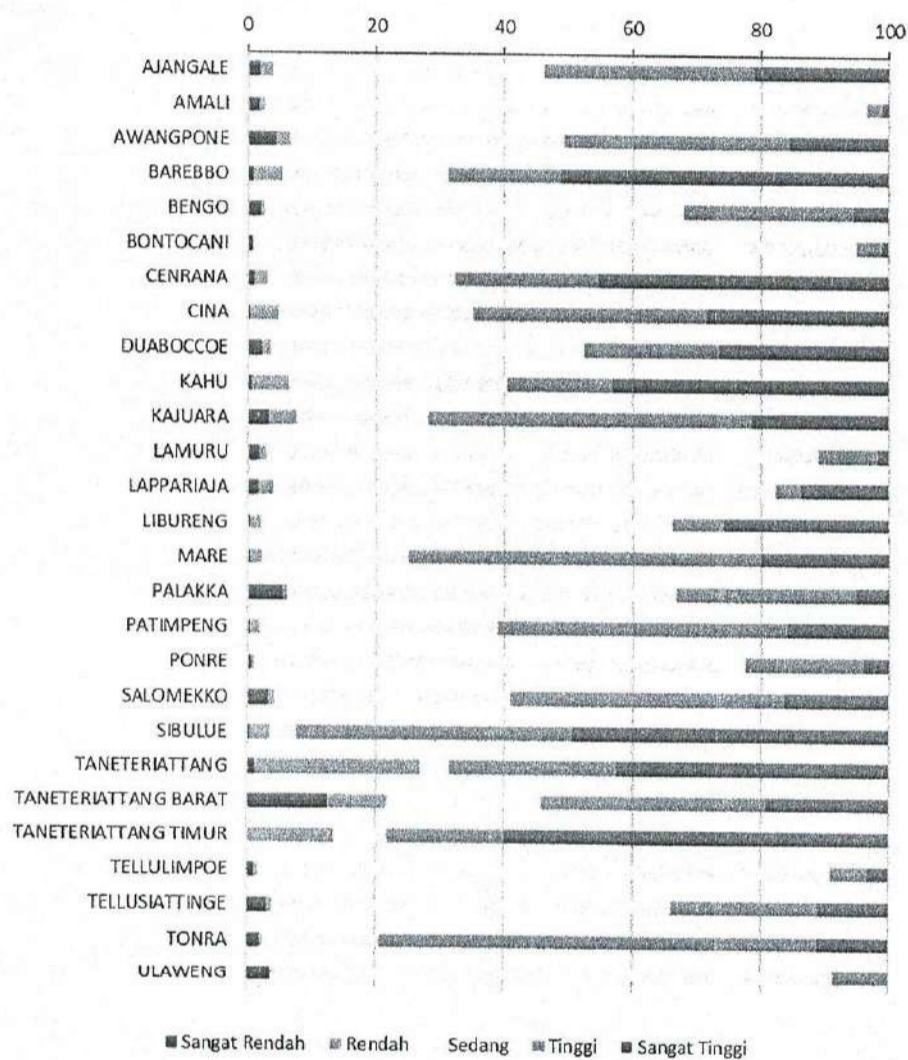
Libureng	110,81	618,64	22.222,73	2.790,88	8.936,13
Mare	99,71	452,50	5.550,53	13.424,48	4.864,20
Palakka	657,87	92,49	7.363,74	3.400,86	622,45
Patimpeng	86,32	324,02	7.856,51	9.586,48	3.359,80
Ponre	168,71	160,06	25.787,21	6.177,83	1.310,24
Salomekko	314,95	89,24	3.566,74	4.149,12	1.565,58
Sibulue	52,44	490,62	657,39	6.581,28	7.620,57
Taneteriatta ng	34,86	702,74	123,59	714,22	1.166,55
Taneteriatta ng Barat	505,57	368,91	971,35	1.421,13	768,46
Taneteriatta ng Timur	-	599,01	365,73	812,45	2.645,58
Tellulimpoe	329,79	156,92	26.550,30	1.669,70	971,66
Tellusiatting e	532,84	133,58	10.538,43	3.870,10	1.896,97
Tonra	238,78	66,28	2.162,76	8.153,19	1.343,99
Ulaweng	520,22	-	12.148,79	1.183,87	-
<b>Total (ha)</b>	<b>7.054,38</b>	<b>8.817,92</b>	<b>262.561,22</b>	<b>103.467,15</b>	<b>76.168,10</b>
<b>Total (%)</b>	<b>1,54</b>	<b>1,93</b>	<b>57,32</b>	<b>22,59</b>	<b>16,63</b>

Sumber: Hasil Analisis TIM, Tahun 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi - sangat tinggi) sebesar 39,22%. Kategori sedang sebesar 58,32% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah - rendah) sebesar 3,47% dari total luas wilayah Kabupaten Bone. Hal ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Bone jasa lingkungan penyediaan pangan umumnya berada pada kategori Sedang dan Tinggi.



Berdasarkan hasil analisis kategori jasa lingkungan penyediaan pangan untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki jasa lingkungan penyediaan pangan yang paling rendah terdapat pada Kecamatan Tanetteriattang dan Tanetteriattang Barat. Sementara yang memiliki jasa lingkungan penyediaan pangan tinggi terdapat pada Kecamatan Tanetteriattang Timur, Sibulue, Tonra dan Barebbo.



Grafik 2.4 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan di Kabupaten Bone





## 2. JASA LINGKUNGAN PENGATURAN

### a. Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air

Siklus hidrologi (*hydrology cycle*), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (*flow*). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknya hujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Tabel-2.48 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Tata Aliran Air Di Kabupaten Bone

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Air (Hektar)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Ajangale	453,30	7.485,97	3.745,40	26,21	40,60
Amali	366,96	11.848,24	2.423,97	19,53	-
Awangpone	1.029,70	7.954,46	2.396,39	490,63	13,37
Barebbo	341,99	3.635,56	7.177,64	-	19,26
Bengo	772,87	10.362,64	1.693,59	2.320,38	3.615,95
Bontocani	10.469,02	5.005,86	527,98	22.153,99	7.591,54
Cenrana	448,21	7.279,28	6.646,50	9,12	396,25



Cina	907,37	5.473,07	7.251,70	759,03	86,48
Duaboccoe	608,55	8.783,83	5.333,87	28,80	75,82
Kahu	4.855,93	12.920,61	494,35	932,61	-
Kajuara	1.946,46	6.421,28	1.461,69	155,59	13,70
Lamuru	1.206,69	5.088,18	1.155,68	13.037,15	1.371,09
Lappariaja	4.266,45	6.661,76	721,28	2.009,01	496,92
Libureng	10.884,29	17.442,01	849,64	3.558,17	1.945,08
Mare	1.233,23	13.169,12	4.883,30	4.928,67	177,10
Palakka	1.180,03	8.699,55	1.776,00	329,88	151,96
Patimpeng	1.476,17	8.521,22	876,86	10.037,76	301,12
Ponre	3.978,95	7.987,48	974,91	18.567,38	2.095,33
Salomekko	1.012,70	6.383,38	1.385,14	904,41	-
Sibulue	2.835,37	4.053,92	8.349,18	37,87	125,96
Taneteriatta ng	40,75	1.040,75	1.653,08	3,84	3,54
Taneteriatta ng Barat	572,98	2.103,86	1.332,19	12,89	13,49
Taneteriatta ng Timur	413,54	904,24	3.083,42	3,47	18,09
Tellulimpoe	1.702,78	3.262,93	164,53	23.760,44	787,68
Tellusiatting e	607,40	11.114,49	4.516,59	322,44	411,00
Tonra	2.260,93	5.228,22	-	4.460,66	15,18
Ulaweng	618,91	4.947,67	3.913,00	395,88	3.977,41
<b>Total (ha)</b>	<b>56.491,54</b>	<b>193.779,58</b>	<b>74.787,90</b>	<b>109.265,81</b>	<b>23.743,93</b>
<b>Total (%)</b>	<b>12,33</b>	<b>42,30</b>	<b>16,33</b>	<b>23,85</b>	<b>5,18</b>

Sumber: Hasil Analisis TIM, Tahun 2021

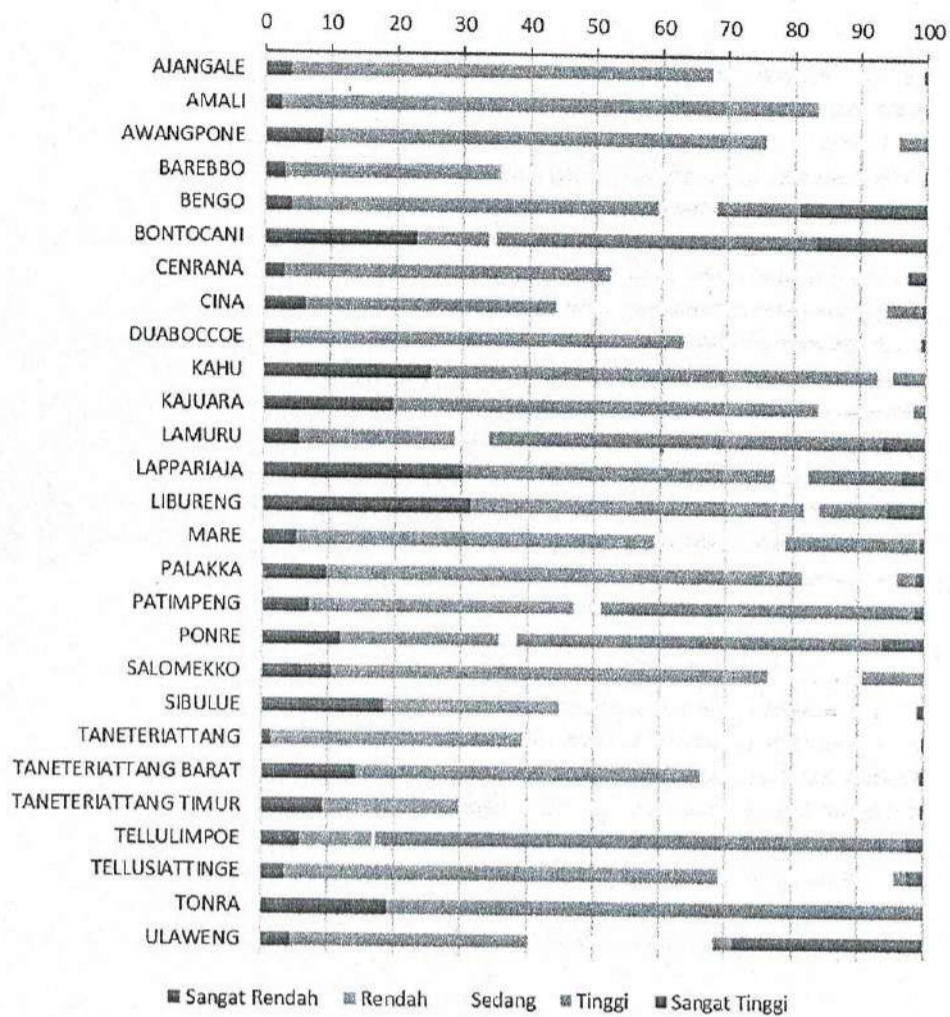
Berdasarkan hasil olah data, Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi - sangat





tinggi) sebesar 29,03%. Kategori sedang sebesar 16,33% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 54,63% dari total luas wilayah Kabupaten Bone. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Bone jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dalam infiltrasi air dan pelepasan air secara berkala berada pada kategori rendah.

Berdasarkan hasil analisis kategori jasa lingkungan pengaturan tata aliran air untuk setiap kecamatan di Kabupaten Bone menunjukkan bahwa kecamatan yang memiliki jasa lingkungan pengaturan tata aliran air yang paling rendah terdapat pada Kecamatan Kahu, Kajuara, dan Amali. Sementara yang memiliki jasa lingkungan pengaturan tata aliran air tertinggi terdapat pada Kecamatan Tellulimpoe, Lamuru, Bontocani.



Grafik 2.5 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Aliran Air di Kabupaten Bone





b. Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem ini memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca & penyerapan karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besar seperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi karbon dioksida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Tabel-2.49 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyediaan Pengatur Iklim Di Kabupaten Bone

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Iklim (Hektar)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Ajangale	242,54	4.282,67	7.200,05	26,21	-
Amali	-	396,73	14.242,45	19,53	-
Awangpone	732,75	2.793,19	7.867,99	25,10	465,53
Barebbo	745,24	6.997,42	3.427,88	3,92	-
Bengo	-	493,68	12.335,42	156,51	5.779,82
Bontocani	-	470,14	15.532,73	68,88	29.676,65
Cenrana	4.581,09	3.899,30	6.225,73	73,24	-
Cina	549,08	7.521,19	5.610,37	61,87	735,14
Duaboccoe	740,15	4.523,46	9.540,56	26,69	-
Kahu	-	1.227,11	17.043,79	106,92	825,69
Kajuara	-	1.817,64	8.011,78	169,29	-
Lamuru	-	625,54	6.825,00	205,69	14.202,56



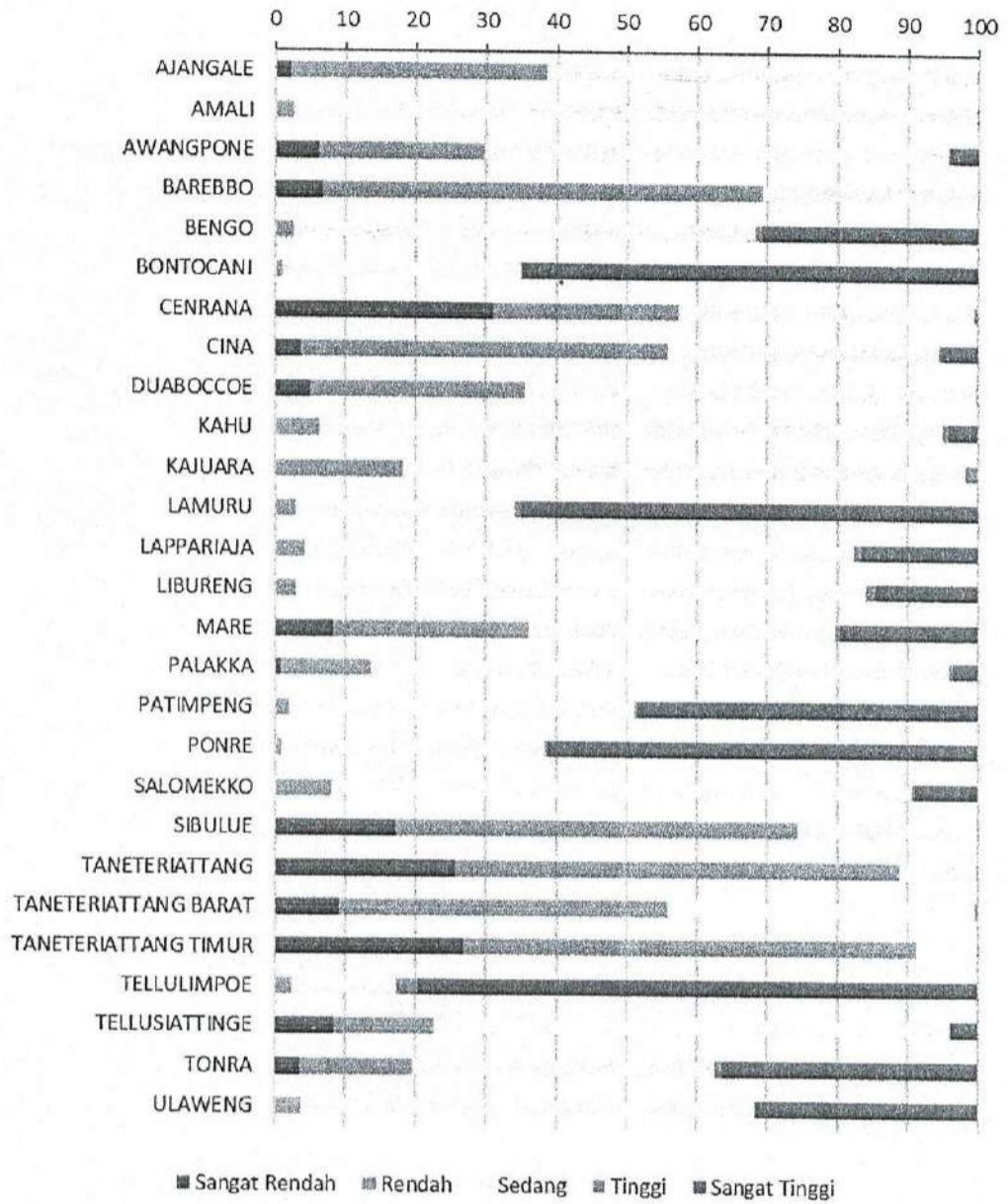
<b>Lappariaja</b>	-	588,86	11.060,63	141,71	2.364,22
<b>Libureng</b>	-	1.011,61	28.164,33	484,91	5.018,34
<b>Mare</b>	1.992,37	6.809,04	10.635,77	195,67	4.758,57
<b>Palakka</b>	92,49	1.556,45	10.006,63	60,69	421,16
<b>Patimpeng</b>	-	410,34	10.463,91	51,69	10.287,18
<b>Ponre</b>	-	328,77	12.612,57	108,84	20.553,87
<b>Salomekko</b>	-	786,96	7.994,26	44,31	860,10
<b>Sibulue</b>	2.638,80	8.812,39	3.937,14	13,98	-
<b>Taneteriattang</b>	702,74	1.730,49	304,88	3,84	-
<b>Taneteriattang Barat</b>	368,91	1.879,10	1.774,52	12,89	-
<b>Taneteriattang Timur</b>	1.187,69	2.847,06	384,53	3,48	-
<b>Tellulimpoe</b>	8,08	689,75	4.437,71	873,57	23.669,24
<b>Tellusiattinge</b>	1.419,93	2.420,62	12.461,88	6,59	662,90
<b>Tonra</b>	424,78	1.912,98	5.158,35	115,56	4.353,32
<b>Ulaweng</b>	-	520,22	8.959,37	1,21	4.372,08
<b>Total (ha)</b>	<b>16.426,64</b>	<b>67.352,71</b>	<b>242.220,25</b>	<b>3.062,80</b>	<b>129.006,36</b>
<b>Total (%)</b>	<b>3,59</b>	<b>14,70</b>	<b>52,88</b>	<b>0,67</b>	<b>28,16</b>

Sumber: Hasil Analisis TIM, Tahun 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi-sangat tinggi) sebesar 28,83%. Kategori sedang sebesar 52,88% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 18,29% dari total luas wilayah Kabupaten Bone. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Bone jasa ekosistem pengaturan iklim secara umum berada pada kategori sedang. Adapun kecamatan di Kabupaten Bone yang jasa ekosistem pengaturan iklimnya yang tinggi terdapat pada Kecamatan Tellulimpoe, Bontocani dan Lamuru. Hal ini karena pada daerah tersebut penutupan lahannya



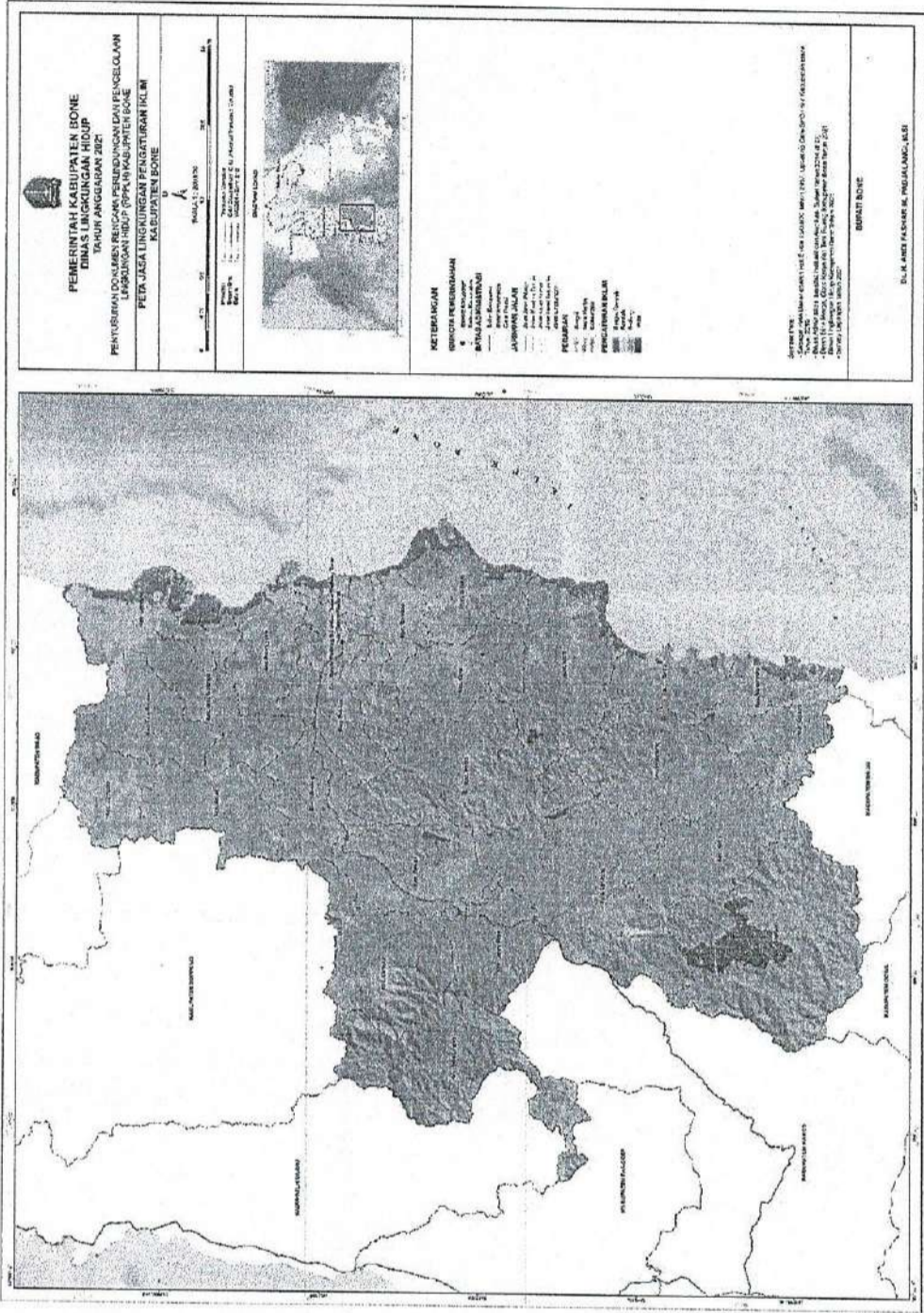
umumnya berupa hutan. Sementara yang rendah jasa pengaturan iklimnya terdapat pada Kecamatan Tenetteriattang dan Tanetteriattang Timur.



Grafikr 2.6 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kabupaten Bone



Gambar 2.14. Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim di Kabupaten Bone





c. Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya tanah longsor. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari longsor atau pergerakan tanah. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh longsor umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi perbukitan. Adapun distribusi luasan jasa lingkungan pengatur mitigasi bencana longsor di Kabupaten Bone diperlihatkan pada tabel dibawah ini.

Tabel-2.50 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor Di Kabupaten Bone

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Longsor (Hektar)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Ajangale	242,54	10.726,09	780,30	2,55	-
Amali	-	5.637,73	8.792,65	223,66	4,66
Awangpone	240,25	9.612,25	940,41	495,80	595,85
Barebbo	495,96	7.715,00	797,97	2.165,53	-
Bengo	-	8.226,88	4.230,43	528,31	5.779,82
Bontocani	-	4.475,73	10.753,50	842,51	29.676,65
Cenrana	270,53	8.097,93	1.371,75	4.319,40	719,75
Cina	549,08	10.007,69	2.151,96	1.033,79	735,14
Duaboccoe	188,53	12.942,01	1.042,78	657,55	-
Kahu	-	2.604,05	13.728,53	2.045,24	825,69
Kajuara	3,37	3.757,32	3.271,63	1.916,56	1.049,84





<b>Lamuru</b>	-	4.196,35	3.006,23	453,64	14.202,56
<b>Lappariaja</b>	-	2.269,78	8.177,62	1.343,81	2.364,22
<b>Libureng</b>	-	2.522,32	24.761,45	2.377,08	5.018,34
<b>Mare</b>	332,18	6.648,73	10.275,28	2.317,87	4.817,36
<b>Palakka</b>	92,49	6.739,62	1.815,13	3.068,25	421,92
<b>Patimpeng</b>	-	2.348,56	7.638,09	939,29	10.287,18
<b>Ponre</b>	-	3.016,23	7.771,88	2.262,07	20.553,87
<b>Salomekko</b>	-	4.853,25	3.142,38	447,13	1.242,87
<b>Sibulue</b>	371,85	7.411,81	2.805,73	4.630,14	182,77
<b>Taneteriattang</b>	702,74	1.983,38	55,84	-	-
<b>Taneteriattang Barat</b>	368,91	3.531,38	135,13	-	-
<b>Taneteriattang Timur</b>	544,33	2.494,74	174,83	1.006,42	202,44
<b>Tellulimpoe</b>	-	2.824,52	2.190,20	223,70	24.439,94
<b>Tellusiattinge</b>	133,58	12.272,47	2.424,31	1.451,50	690,06
<b>Tonra</b>	86,99	2.399,33	3.646,41	1.166,96	4.665,30
<b>Ulaweng</b>	-	3.562,55	4.375,73	1.542,51	4.372,08
<b>Total (ha)</b>	<b>4.623,31</b>	<b>152.877,71</b>	<b>130.258,15</b>	<b>37.461,29</b>	<b>132.848,30</b>
<b>Total (%)</b>	<b>1,01</b>	<b>33,37</b>	<b>28,44</b>	<b>8,18</b>	<b>29,00</b>

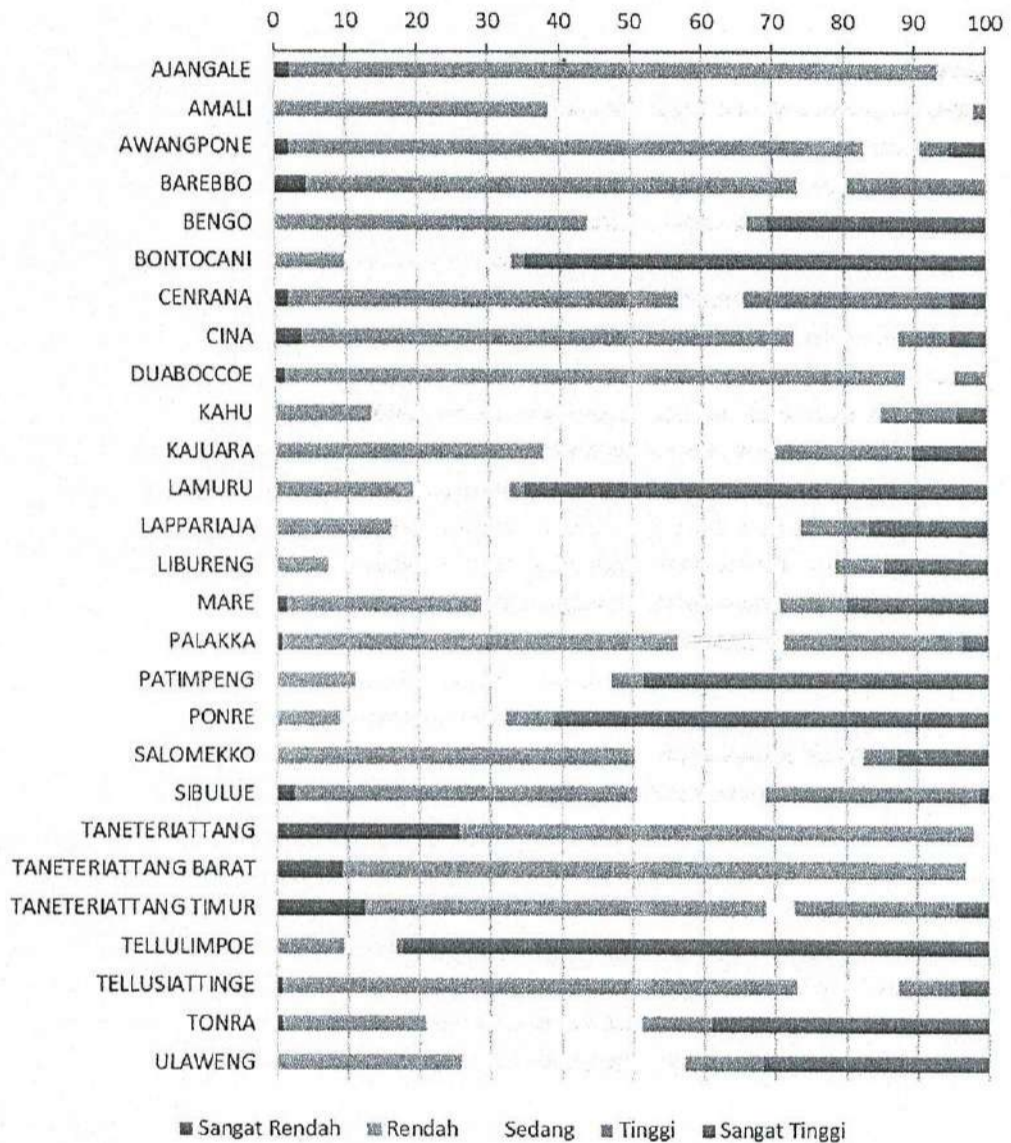
Sumber: Hasil Analisis TIM, Tahun 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana longsor di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 37,18%. Kategori sedang sebesar 28,44% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 34,38% dari total luas wilayah Kabupaten Bone.

Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Bone jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana longsor secara umum berada pada kategori rendah. Adapun kecamatan di Kabupaten Bone yang jasa ekosistem pengaturan



mitigasi bencana longsohnya yang tinggi terdapat pada Kecamatan Tellulimpoe, Lamuru dan Bontocani. Hal ini karena pada daerah tersebut penutupan lahannya umumnya berupa hutan. Sementara yang rendah jasa pengaturan mitigasi bencana longsohnya terdapat pada Kecamatan Ajangale, Duaboccoe dan Awangpone.



Grafik 2.7 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Longsor di Kabupaten Bone





d. Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir

Ruang lingkup jasa pengaturan pencegahan dan perlindungan terhadap bencana adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya dari banjir. Selain itu bentuk lahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan struktural dan denudasional dengan morfologi datar. Adapun distribusi luasan jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bone diperlihatkan pada tabel 2.49 dibawah ini.

Tabel-2.51 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir Di Kabupaten Bone

Kecamatan	Jasa Lingkungan Pengatur Mitigasi Bencana Banjir (Hektar)				
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi
Ajangale	2.660,08	6.712,75	2.275,34	103,30	-
Amali	-	4.622,01	9.020,92	1.003,18	12,59
Awangpone	2.037,99	6.551,88	2.668,61	160,19	465,89
Barebbo	6.122,57	1.664,78	1.450,89	1.932,30	3,92
Bengo	-	7.141,39	3.997,54	1.737,42	5.889,09
Bontocani	-	2.396,22	12.626,27	1.036,27	29.689,63
Cenrana	5.901,92	4.083,20	4.302,73	491,51	-
Cina	4.347,66	4.160,72	4.212,91	1.012,76	743,59
Duaboccoe	4.013,96	8.289,72	2.170,06	357,12	-
Kahu	-	10.226,24	3.316,28	4.745,55	915,42
Kajuara	7,40	6.317,02	814,55	2.825,59	34,16



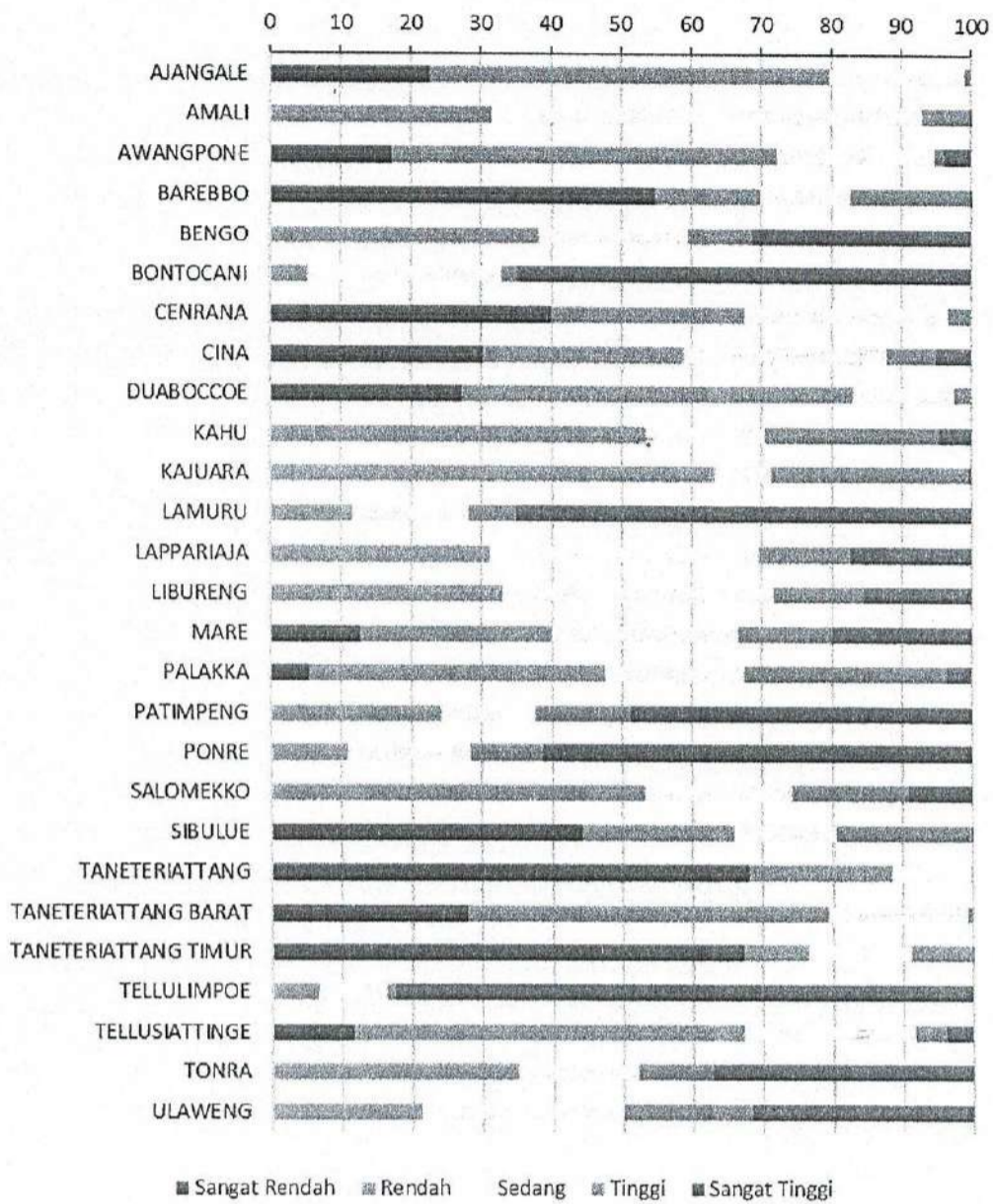
Lamuru	-	2.536,10	3.602,28	1.454,41	14.266,00
Lappariaja	-	4.407,98	5.435,40	1.850,38	2.461,67
Libureng	-	11.423,47	13.452,98	4.489,49	5.313,25
Mare	3.094,86	6.617,76	6.533,15	3.292,29	4.853,36
Palakka	663,96	5.111,08	2.411,65	3.513,56	437,17
Patimpeng	-	5.140,67	2.837,56	2.907,37	10.327,52
Ponre	-	3.674,05	5.849,65	3.470,10	20.610,25
Salomekko	-	5.151,88	2.036,17	1.614,66	882,91
Sibulue	6.820,62	3.331,41	2.260,33	2.975,96	13,98
Taneteriattang	1.865,75	557,18	311,65	7,38	-
Taneteriattang Barat	1.123,87	2.077,69	807,47	26,39	-
Taneteriattang Timur	2.969,37	410,18	655,20	384,55	3,47
Tellulimpoe	-	1.984,04	2.823,67	402,96	24.467,70
Tellusiattinge	1.966,60	9.412,66	4.200,21	729,55	662,90
Tonra	-	4.183,89	2.060,51	1.266,96	4.453,62
Ulaweng	-	2.930,48	3.990,50	2.559,45	4.372,45
<b>Total (ha)</b>	<b>43.596,61</b>	<b>131.116,48</b>	<b>106.124,47</b>	<b>46.350,67</b>	<b>130.880,54</b>
<b>Total (%)</b>	<b>9,52</b>	<b>28,62</b>	<b>23,17</b>	<b>10,12</b>	<b>28,57</b>

Sumber: Hasil Analisis TIM, Tahun 2021

Berdasarkan hasil olah data, jasa lingkungan pengaturan mitigasi bencana banjir di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 38,69%. Kategori sedang sebesar 23,17% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 38,14% dari total luas wilayah Kabupaten Bone. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Bone jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana banjir secara umum berada pada kategori tinggi dan rendah. Hal ini menunjukkan wilayah di Kabupaten Bone memiliki kemampuan mengendalikan banjir sebagian



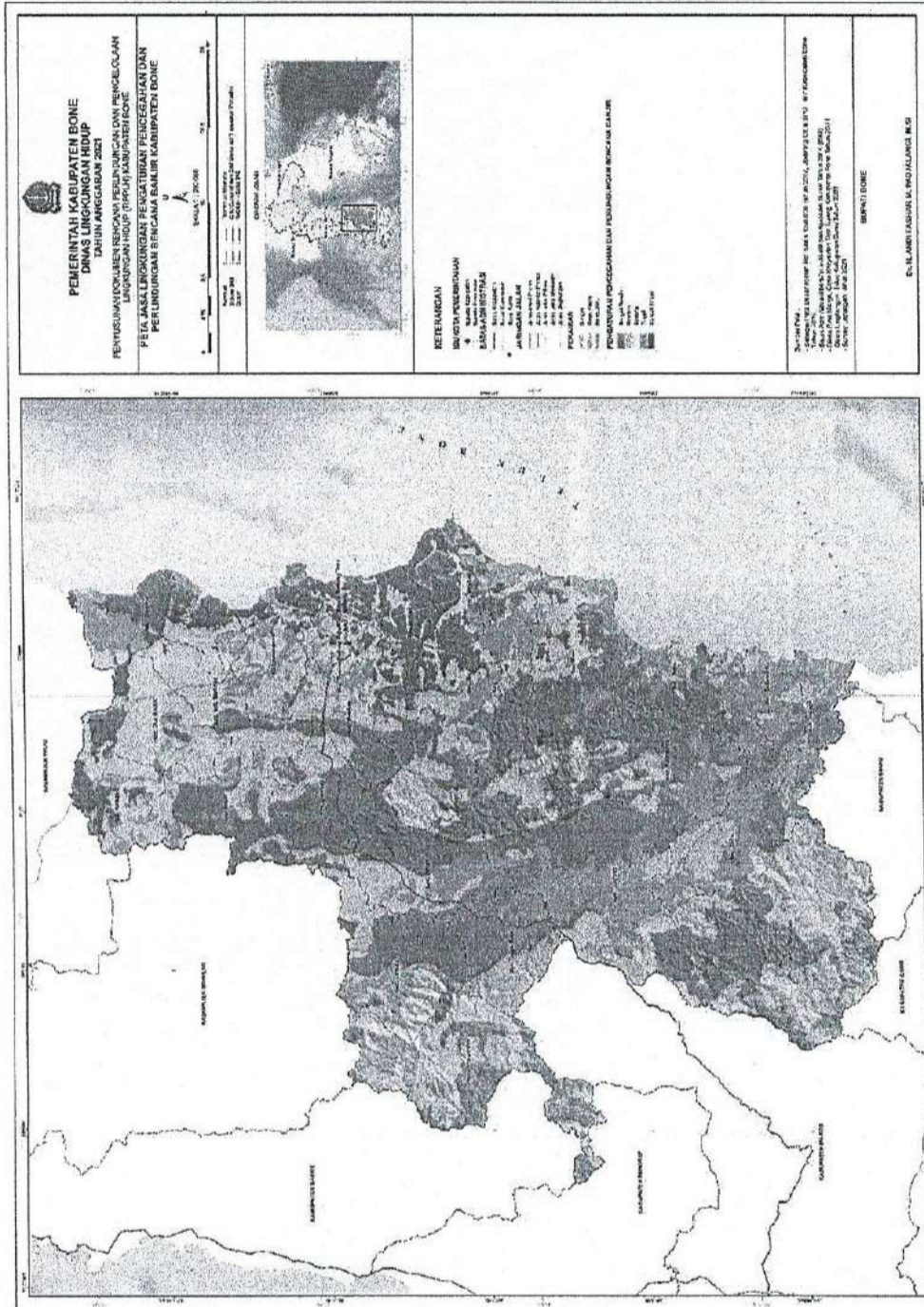
berada pada kemampuan tinggi, namun juga sebagian berada pada kemampuan rendah. Berdasarkan pada analisis ini semakin menegaskan bahwa sebagian wilayah di Kabupaten Bone berpotensi untuk terjadinya banjir dikarenakan kemampuan untuk melakukan pengaturan mitigasi bencana banjir rendah. Adapun kecamatan di Kabupaten Bone yang jasa ekosistem pengaturan mitigasi bencana banjirnya yang tinggi terdapat pada Kecamatan Tellulimpoe, Lamuru dan Bontocani. Hal ini karena pada daerah tersebut penutupan lahannya umumnya berupa hutan. Sementara yang rendah jasa pengaturan mitigasi bencana longsornya terdapat pada Kecamatan Tanetteriattang Timur, Tanetteriattang, dan Barebbo.



Grafik 2.8 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bone



Gambar 2.16. Peta Jasa Lingkungan Pengaturan Mitigasi Bencana Banjir di Kabupaten Bone







### e. Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah

Ekosistem yang memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurnian air secara alami (*self purification*) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri-alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

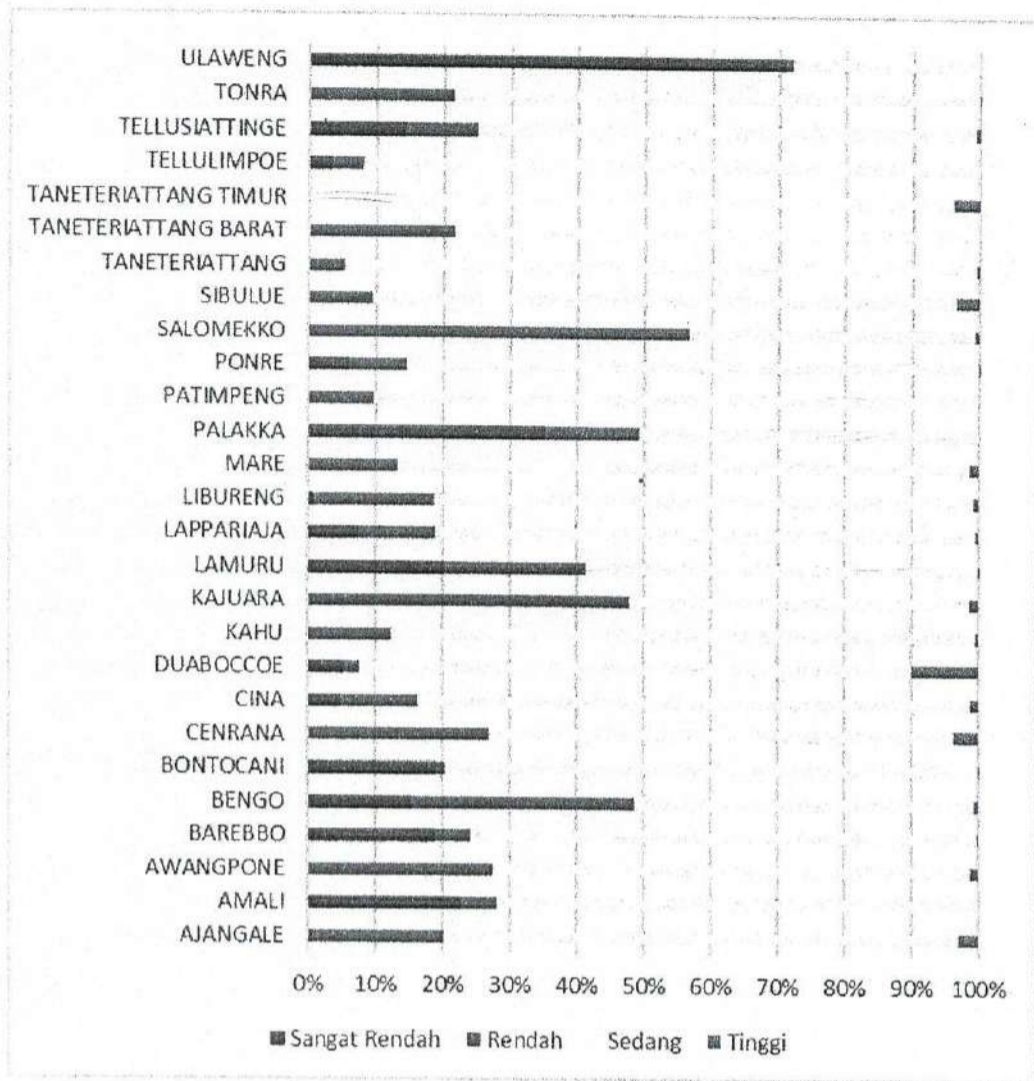
Tabel-2.52 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah Di Kabupaten Bone

Kecamatan	Luas Daya Dukung Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Air Limbah				Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
AJANGALE	77,13242436	2297,78586	9032,847133	343,7078732	11751,47329
AMALI	3336,088475	755,1174349	10567,50035	0	14658,70626
AWANGPONE	23,37990674	3221,478073	8442,17061	152,2446754	11839,27327
BAREBBO	2088,937143	607,1685661	8430,313137	37,33825971	11163,75711
BENGO	2868,880842	6257,015491	9533,733697	105,7998618	18765,42989
BONTOCANI	8691,454092	611,5272614	36427,72213	10,74141445	45741,44489
CENRANA	0	3937,15173	10184,41835	551,5491991	14673,11928
CINA	714,9872955	1648,843364	11924,76993	189,0555567	14477,65615
DUABOCCOE	771,1515965	370,7700104	12186,89998	1502,047104	14830,86869
KAHU	76,52751594	2301,784879	16754,90879	70,27046543	19203,49165
KAJUARA	0	4758,210802	5044,996211	136,593687	9939,8007
LAMURU	4422,04552	4616,695718	12786,22635	29,39050468	21854,35809
LAPPARIAJA	1048,815219	1600,550479	11437,78411	66,29522454	14153,44503
LIBURENG	288,3177605	6168,450522	27912,81784	307,983115	34677,56924
MARE	0	3182,35418	20728,7748	366,8499691	24277,97895
PALAKKA	4244,462773	1718,19128	6174,769233	0	12137,42329
PATIMPENG	0	2042,607307	19170,51871	0	21213,12602
PONRE	1942,595458	2896,612632	28739,81749	25,0187325	33604,04431
SALOMEKKO	0	5466,353954	4129,834313	51,95397593	9648,142243
SIBULUE	0	1444,671433	13338,81237	534,198784	15317,68258
TANETERIATTANG	0	143,5717389	2584,769353	13,61541274	2741,956505
TANETERIATTANG BARAT	0	869,6057268	3165,818674	0	4035,424401
TANETERIATTANG TIMUR	0	0	4154,600179	174,6571569	4329,257336
TELLULIMPOE	972,4592411	1397,591121	27289,7111	0	29659,76147
TELLUSIATTINGE	2376,792024	1819,201786	12625,27193	100,5147974	16921,78054
TONRA	0	2519,377351	9295,356351	5,907976668	11820,64168
ULAWENG	9795,740044	165,7416696	3891,392478	0	13852,87419
<b>Total (Ha)</b>	<b>43739,76733</b>	<b>62818,43037</b>	<b>345956,5556</b>	<b>4775,733746</b>	<b>457290,4871</b>
<b>Persen (%)</b>	<b>9,56</b>	<b>13,74</b>	<b>75,65</b>	<b>1,04</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021



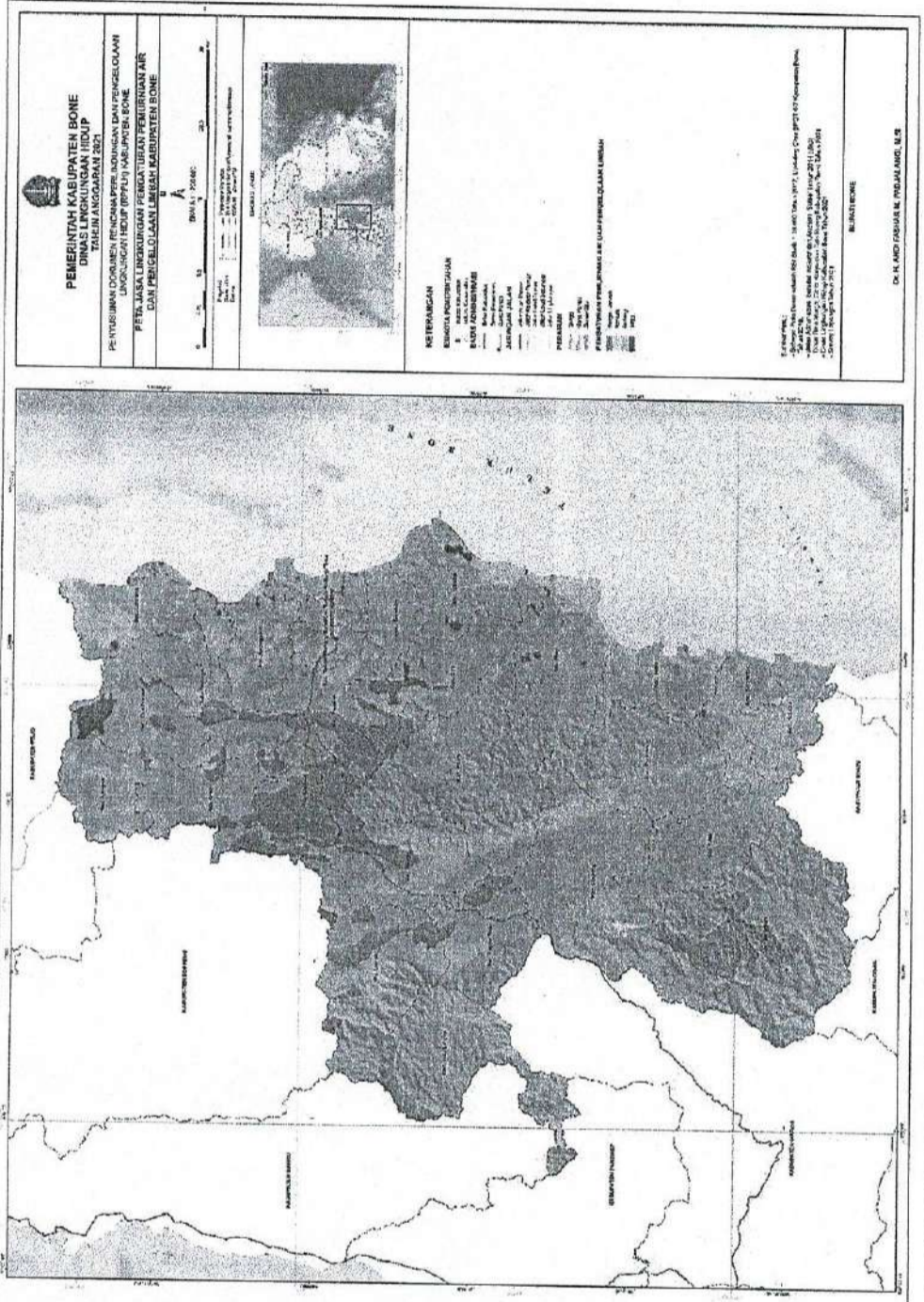
Berdasarkan hasil olah data, Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi - sangat tinggi) sebesar 1,04%. Kategori sedang sebesar 75,65% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah - rendah) sebesar 23,30% dari total luas wilayah Kabupaten Bone. Hal ini berarti bahwa di Kabupaten Bone jasa lingkungan pengaturan pemurnian air dan pengolahan limbah secara umum berada pada kategori sedang dan rendah. Adapun kecamatan di Kabupaten Bone yang jasa ekosistem pemurnian air dan limbah yang tinggi terdapat pada Kecamatan Duobaccoe. Hal ini karena pada daerah tersebut banyak terdapat aliran-aliran sungai. Sementara yang rendah jasa pengaturan pemurnian air dan pengolahan limbah terdapat pada Kecamatan Ulaweng.



Grafik 2.9 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Pengaturan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah di Kabupaten Bone



Gambar 2.17. Peta Jasa Lingkungan Pemurnian air dan Pengelolaan Limbah di Kabupaten Bone





### 3. TINGKAT KETAHANAN DAN POTENSI KEHATI

Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati merupakan hal yang sangat mendasar dan sangat penting dalam menunjang pengembangan Kabupaten Bone. Hal yang dikaji dalam melihat potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Bone adalah potensi keanekaragaman genetik. Semakin tinggi keanekaragaman hayati atau genetik, maka semakin tinggi daya dukungnya terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itu tingkat ketahanan dan potensi KEHATI di Kabupaten Bone berhubungan erat dengan Indikasi jasa penyedia sumber daya genetik dan indikasi jasa ekosistem pendukung habitat keanekaragaman hayati.

#### a. Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik

Beraneka ragam sumber daya genetik tersedia dalam satu wilayah ekosistem yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna, dimana keanekaragaman hayati yang tinggi akan diikuti dengan sumber daya genetik yang melimpah. Ketersediaan dan distribusi sumberdaya genetik ditentukan oleh tipe ekosistem, yaitu ekoregion bentang alam dan penutup lahan khususnya areal bervegetasi. Sumber daya genetik yang terlihat dari keanekaragaman hayati adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk didalamnya kelimpahan dan keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme



yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya. Keanekaragaman hayati berperan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, obat-obatan dan bahan bakar.

Tabel-2.53 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Bone

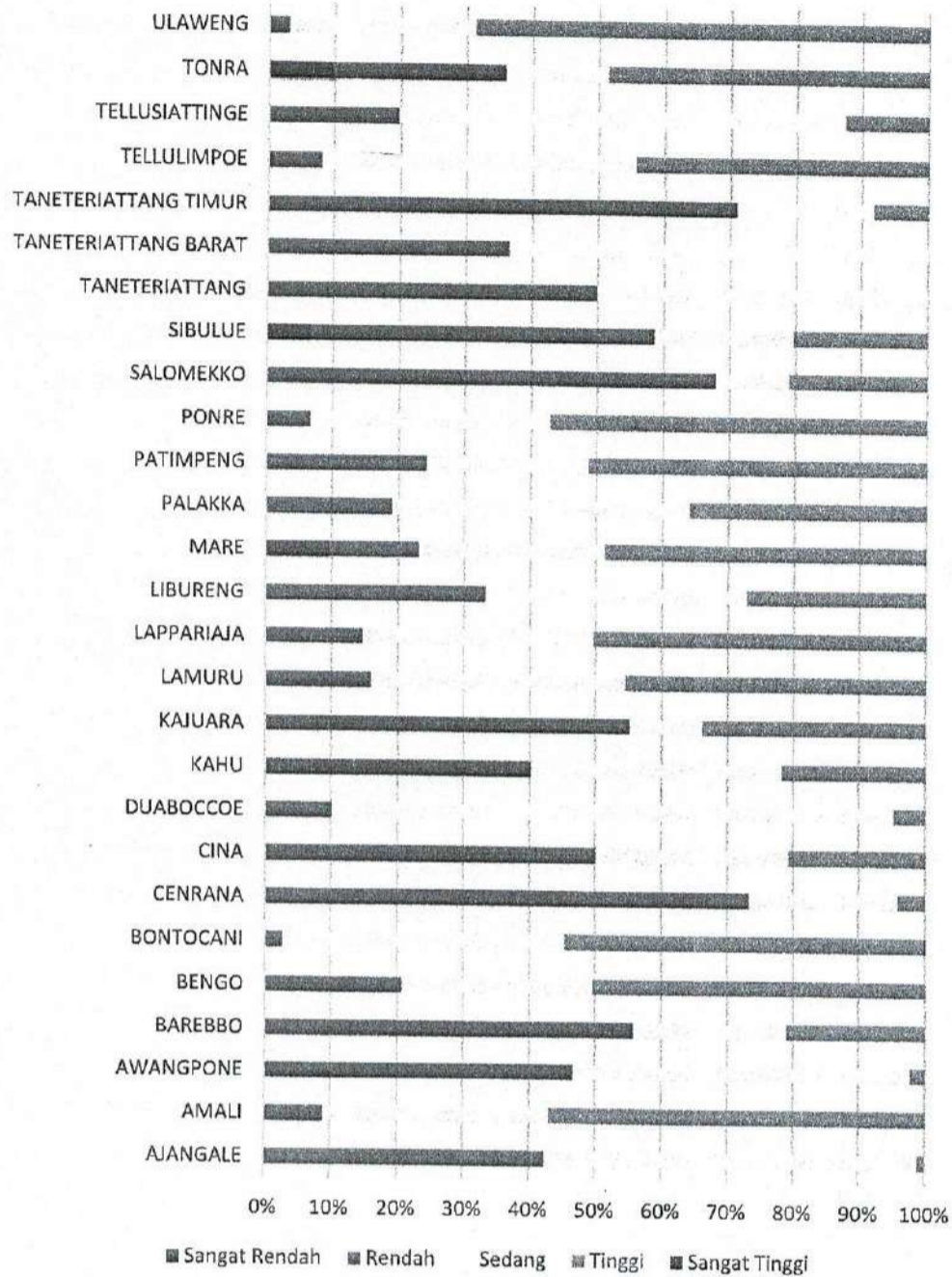
Kecamatan	Luas Daya Dukung Penyedia Sumber Daya Genetik (Ha)				Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	
AJANGALE	0	4980,640516	6637,948294	132,8844806	11751,47329
AMALI	0	1306,234809	5008,4282	8344,043247	14658,70626
AWANGPONE	0	5525,864145	6044,083365	269,3257557	11839,27327
BAREBBO	0	6220,556547	2601,809683	2341,390876	11163,75711
BENGO	0	3876,536878	5431,187196	9457,705817	18765,42989
BONTOCANI	0	1277,29933	19511,86005	24942,54259	9,742914432
CENRANA	0	10750,14589	3327,557899	595,4154893	0
CINA	0	7254,468707	4226,14504	2997,042403	0
DUABOCCOE	0	1508,57548	12613,24162	709,0515944	0
KAHU	0	7726,018341	7311,551966	4165,921345	0
KAJUARA	0	5471,931107	1108,747551	3359,122042	0
LAMURU	0	3477,180875	8418,510843	9958,666374	0
LAPPARIAJA	0	2074,008938	4959,639627	7119,796468	0
LIBURENG	0	11534,24736	13745,48589	9397,835991	0
MARE	2338,973423	3263,269179	6877,381099	11798,35525	0
PALAKKA	0	2301,023451	5484,840527	4351,559308	0
PATIMPENG	0	5157,70312	5186,625176	10868,79772	0
PONRE	0	2230,586287	12203,68275	19169,77527	0
SALOMEKKO	0	6554,729601	1074,331817	2019,080825	0
SIBULUE	1015,180747	7939,837806	3255,132877	3107,531152	0
TANETERIATTANG	0	1368,420962	1373,535542	0	0
TANETERIATTANG BARAT	0	1472,946083	2562,478318	0	0
TANETERIATTANG TIMUR	0	3072,432095	898,5608187	358,1644224	0
TELLULIMPOE	205,4592976	2205,98904	14093,21052	13155,1026	0
TELLUSIATTINGE	0	3314,251132	11487,37581	2120,153595	0
TONRA	1151,933184	3077,331285	1858,891435	5732,485774	0
ULAWENG	0	436,1220942	3891,763679	9524,988418	0
<b>Total (Ha)</b>	<b>4711,546652</b>	<b>115378,3511</b>	<b>171194,1076</b>	<b>165996,7388</b>	<b>9,742914432</b>
<b>Persen (%)</b>	<b>1,03</b>	<b>25,23</b>	<b>37,44</b>	<b>36,30</b>	<b>0,002</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021

Berdasarkan hasil olah data, Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi – sangat tinggi) sebesar 36,30%. Kategori sedang sebesar 37,44% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah – rendah) sebesar 26,26% dari total luas wilayah Kabupaten Bone. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Bone berada pada kategori tinggi dan sedang.



Adapun kecamatan di Kabupaten Bone yang jasa lingkungan penyedia sumber daya genetik yang tinggi terdapat pada Kecamatan Ulaweng, Amali, Bontocani, Bengo, Lappariaja, Patimpeng, dan Ponre. Sementara yang rendah jasa penyedia sumber daya genetiknya terdapat pada Kecamatan Mare, Taneteriattang Timur, dan Salomekko.

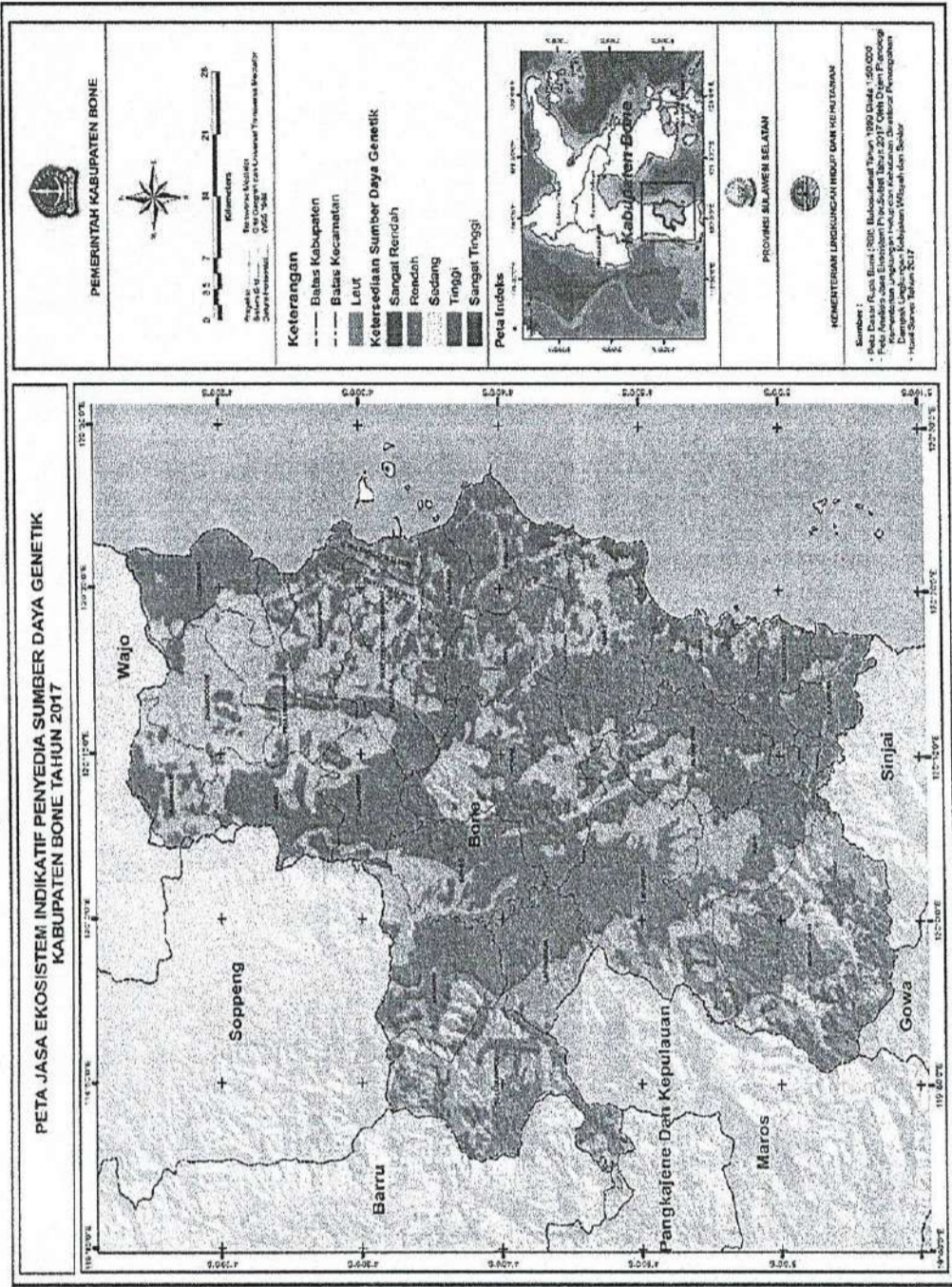


Grafik 2.10 Grafik Persentase Luas Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Bone





Gambar 2.18. Peta Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Bone





### b. Jasa Lingkungan Pendukung Habitat Dan Keanekaragaman Hayati

Ekosistem telah memberikan jasa keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya, daratan, lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya; mencakup keanekaragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem yang menjadi habitat perkembangbiakan flora fauna. Semakin tinggi karakter biodiversitas maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap perikehidupan.

Tabel-2.54 Distribusi Luas Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik di Kabupaten Bone

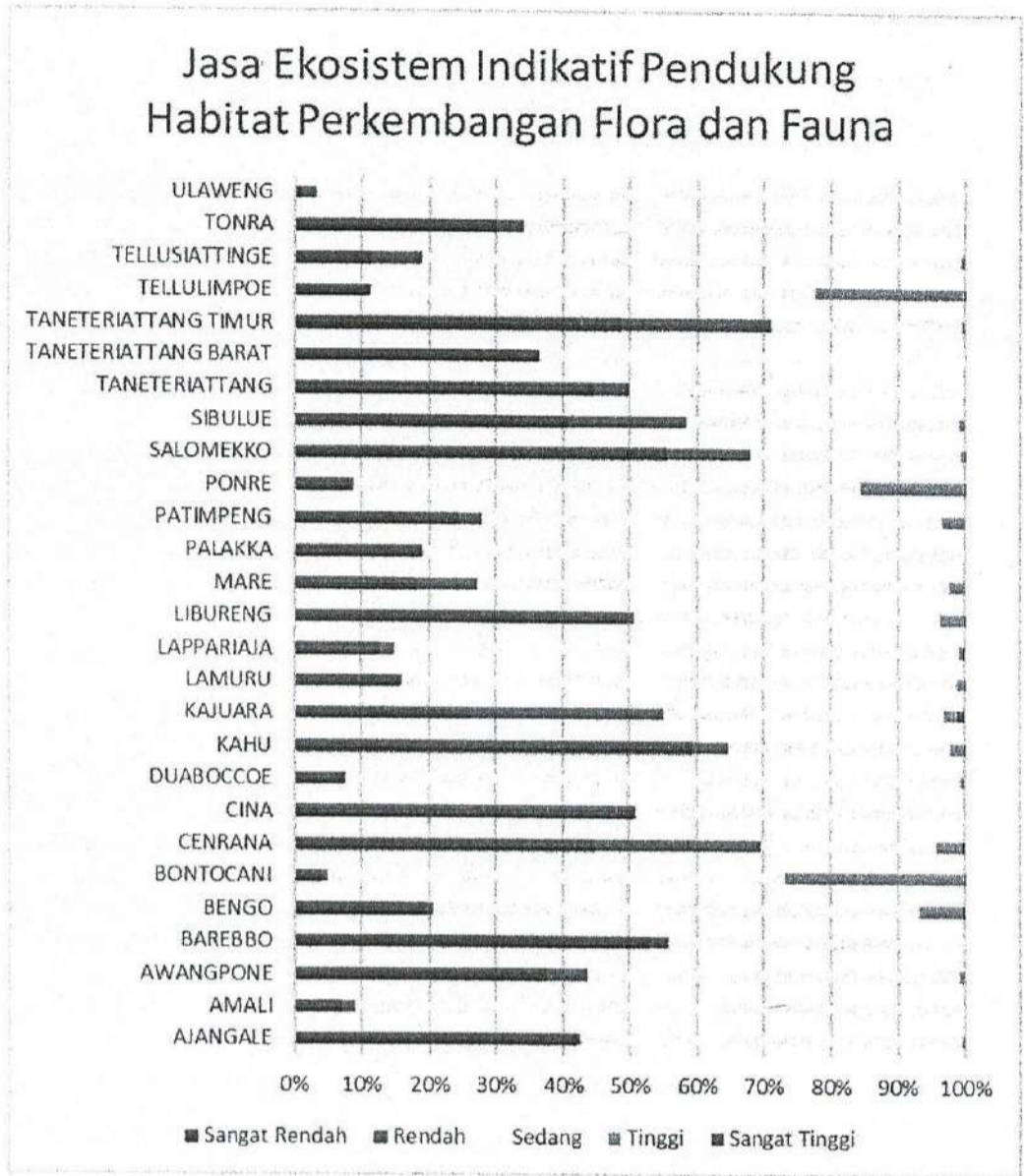
Kecamatan	Luas Daya Dukung Pendukung Habitat dan KEHATI (Ha)					Total (Ha)
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
AJANGALE	4955,552265	25,08825099	6715,071368	55,7614073	0	11751,47329
AMALI	1029,960864	299,2134749	13329,53192	0	0	14658,70626
AWANGPONE	4462,603148	704,6808439	6582,142211	89,84706214	0	11839,27327
BAREBBO	5909,161918	311,3946291	4943,200559	0	0	11163,75711
BENGO	3652,98044	229,6801731	13621,98392	1233,903427	26,88193368	18765,42989
BONTOCANI	1832,78209	436,4600816	31216,91972	12254,2845	0,998500016	45741,44489
CENRANA	6551,158327	3646,922174	3879,623287	546,8807416	48,53474763	14673,11928
CINA	7353,311293	18,99399133	7105,350866	0	0	14477,65615
DUABOCCOE	1130,383609	0	13620,40292	80,0821654	0	14830,86869
KAHU	11381,81207	1049,561006	6370,930822	384,0452491	17,14249996	19203,49165
KAJUARA	2580,336746	2891,594361	4170,118035	185,5616273	112,1899308	9939,8007
LAMURU	3402,079269	71,01207594	18109,80162	269,2359047	2,229218987	21854,35809
LAPPARIAJA	1815,881908	276,4037848	11958,18032	75,69045121	27,28857173	14153,44503
LIBURENG	17166,10125	417,4454127	15839,937	1246,164329	7,921245823	34677,56924
MARE	4416,83022	2165,434085	17142,0971	553,6175521	0	24277,97895
PALAKKA	2300,940864	0	9836,482422	0	0	12137,42329
PATIMPENG	5223,49969	701,47587	14567,98994	720,1605149	0	21213,12602
PONRE	2695,105765	258,6692875	25460,90745	5170,062929	19,29887752	33604,04431
SALOMEKKO	5362,713246	1192,016354	3032,420517	60,73607914	0,25604584	9648,142243
SIBULUE	6232,087593	2711,959866	6242,168841	131,4662828	0	15317,68258
TANETERIATTANG	1218,75637	149,6645923	1373,535542	0	0	2741,956505
TANETERIATTANG BARAT	1461,795397	11,15068642	2562,478318	0	0	4035,424401
TANETERIATTANG TIMUR	2101,054615	971,377479	1239,093123	17,73211839	0	4329,257336
TELLULIMPOE	3320,447233	8,406167177	19745,23765	6574,486481	11,18393515	29659,76147
TELLUSIATTINGE	1934,890918	1260,346255	13621,41579	105,1275781	0	16921,78054
TONRA	3538,144429	482,9824984	7764,247495	35,26725579	0	11820,64168
ULAWENG	142,0006491	306,1582761	13404,71527	0	0	13852,87419
<b>Total (Ha)</b>	<b>113172,3722</b>	<b>20598,09168</b>	<b>293455,984</b>	<b>29790,11365</b>	<b>273,9255072</b>	<b>457290,4871</b>
<b>Persen (%)</b>	<b>24,75</b>	<b>4,50</b>	<b>64,17</b>	<b>6,51</b>	<b>0,06</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2021



Berdasarkan hasil olah data, Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman Hayati di Kabupaten Bone untuk kategori kelas yang berpotensi tinggi (tinggi - sangat tinggi) sebesar 6,57%. Kategori sedang sebesar 64,17% dan untuk kategori kelas rendah (sangat rendah - rendah) sebesar 29,25% dari total luas wilayah Kabupaten Bone. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan KEHATI di Kabupaten Bone berada pada kategori sedang.

Adapun kecamatan di Kabupaten Bone yang jasa ekosistem pendukung habitat dan keanekaragaman hayati yang tinggi terdapat pada Kecamatan Bontocani, Tellulimpoe dan Ponre. Sementara yang rendah jasa penyedia sumber daya genetiknya terdapat pada Kecamatan Barebbo, Salomekko.



Gambar Error! No text of specified style in document..1 Persentase Luas  
Jasa Lingkungan Pendukung Habitat Perkembangan Flora dan Fauna di  
Kabupaten Bone



#### 4. ANALISIS DAYA DUKUNG PENYEDIAAN AIR BERSIH

Pada tahap perhitungan ketersediaan air, data yang digunakan adalah Nilai Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem *grid* dan data potensi ketersediaan air untuk satu kesatuan Wilayah. Satuan Wilayah untuk identifikasi potensi air pada penghitungan daya dukung nasional dan pulau adalah Wilayah Sungai. Untuk dapat menghitung potensi ketersediaan air Kabupaten perlu diidentifikasi terlebih dahulu Wilayah Sungai yang tercakup di dalam wilayah administrasinya. Data yang diperlukan adalah debit wilayah sungai tahunan. Total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air wilayah sungai dan total indeks jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air kabupaten. Persamaan untuk menghitung potensi ketersediaan air Kabupaten adalah sebagai berikut:

*Potensi Ketersediaan Air<sub>prov/kab/kota</sub>*

$$= \sum_{i=1}^n (\text{Potensi Ketersediaan Air Wilayah Sungai}_i \times \frac{\text{Total Indeks Jasa Lingkungan Hidup Prov/Kab/Kota pada Wilayah Sungai}_i}{\text{Total Indeks Jasa Lingkungan Wilayah Sungai}_i})$$

Potensi air dihitung berdasarkan data debit andalan bulanan setiap Wilayah Sungai di Indonesia tahun 2016 yang bersumber dari Ditjen SDA, Kementerian PUPR dan hasil penghitungan indeks jasa lingkungan nasional dari Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Setelah itu kemudian dibuat pendistribusian potensi ketersediaan air ke dalam sistem *grid*. Hal ini dilakukan dengan mendistribusikan total potensi ketersediaan air Kabupaten ke dalam sistem *grid* secara proporsional berdasarkan perbandingan antara Nilai Indeks



Jasa Lingkungan masing-masing grid dengan Nilai Indeks total Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten. Persamaan yang digunakan untuk menghitung potensi ketersediaan air masing-masing grid adalah sebagai berikut:

$$W_{ij} = \text{Potensi ketersediaan air pada Grid}_i$$

$$= \text{Potensi Ketersediaan Air}_{\text{prov/kab/kota}} \times \frac{\text{Nilai Indeks Jasa Lingkungan}_i}{\text{Total Nilai Indeks Jasa Lingkungan}_{\text{Prov/Kota/kab}}}$$

Hasil penghitungan potensi ketersediaan air pada setiap grid kemudian disajikan dalam bentuk peta. Cara penyajiannya digunakan pengelompokan potensi ketersediaan air dengan sistem pewarnaan gradasi. Penggunaan air untuk rumah tangga tiap grid dihitung dengan menggunakan asumsi kebutuhan air rumah tangga sebesar 43,20 m<sup>3</sup> per tahun (Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009).

Hasil analisis yang menunjukkan terlampaui atau tidaknya ambang batas penyediaan air bersih menggambarkan status daya dukung suatu wilayah. Adapun penyediaan air bersih di Kabupaten Bone diperlihatkan pada tabel dibawah ini :

Tabel-2.55 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Air Bersih Di Kabupaten Bone

Kecamatan	Status Air Tahun 2020 (m <sup>3</sup> /tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Ajangale	12.115.578,59	2.007.646,00	10.107.932,59
Amali	8.567.035,26	1.516.575,00	7.050.460,26
Awangpone	11.642.337,64	2.160.654,00	9.481.683,64
Barebbo	17.035.388,34	2.036.627,00	14.998.761,34
Bengo	19.713.187,40	1.864.712,00	17.848.475,40
Bontocani	29.649.965,75	1.154.860,00	28.495.105,75
Cenrana	21.739.334,66	1.778.718,00	19.960.616,66



Kecamatan	Status Air Tahun 2020 (m <sup>3</sup> /tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Cina	16.654.784,90	1.950.560,00	14.704.224,90
Duaboccoe	14.124.034,34	2.210.367,00	11.913.667,34
Kahu	25.412.288,72	2.855.979,00	22.556.309,72
Kajuara	7.159.491,81	2.695.817,00	4.463.674,81
Lamuru	17.446.902,89	1.835.439,00	15.611.463,89
Lappariaja	15.084.752,41	1.751.489,00	13.333.263,41
Libureng	38.176.139,27	2.197.665,00	35.978.474,27
Mare	23.344.376,79	1.983.191,00	21.361.185,79
Palakka	9.846.836,14	1.663.232,00	8.183.604,14
Patimpeng	18.901.486,01	1.228.006,00	17.673.480,01
Ponre	24.112.568,76	1.026.015,00	23.086.553,76
Salomekko	7.721.676,45	1.145.370,00	6.576.306,45
Sibulue	23.431.929,24	2.527.041,00	20.904.888,24
Taneteriattang	6.148.656,57	3.880.972,00	2.267.684,57
Taneteriattang Barat	5.038.787,85	3.636.933,00	1.401.854,85
Taneteriattang Timur	8.054.893,04	3.207.985,00	4.846.908,04
Tellulimpoe	20.859.784,04	1.035.578,00	19.824.206,04
Tellusiattinge	14.671.658,71	292.803,00	14.378.855,71
Tonra	10.386.982,96	1.013.094,00	9.373.888,96
Ulaweng	7.730.250,76	1.809.889,00	5.920.361,76
<b>Total</b>	<b>434.771.109,30</b>	<b>52.467.217,00</b>	<b>382.303.892,30</b>

Sumber : KLHS RTRW Kabupaten Bone, 2021

Hasil kajian daya dukung penyediaan air berdasarkan tabel diatas menunjukkan ketersediaan air di Kabupaten Bone sebesar 434.771.109,30 m<sup>3</sup>/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 52.467.217,00 m<sup>3</sup>/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 382.303.892,30 m<sup>3</sup>/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung



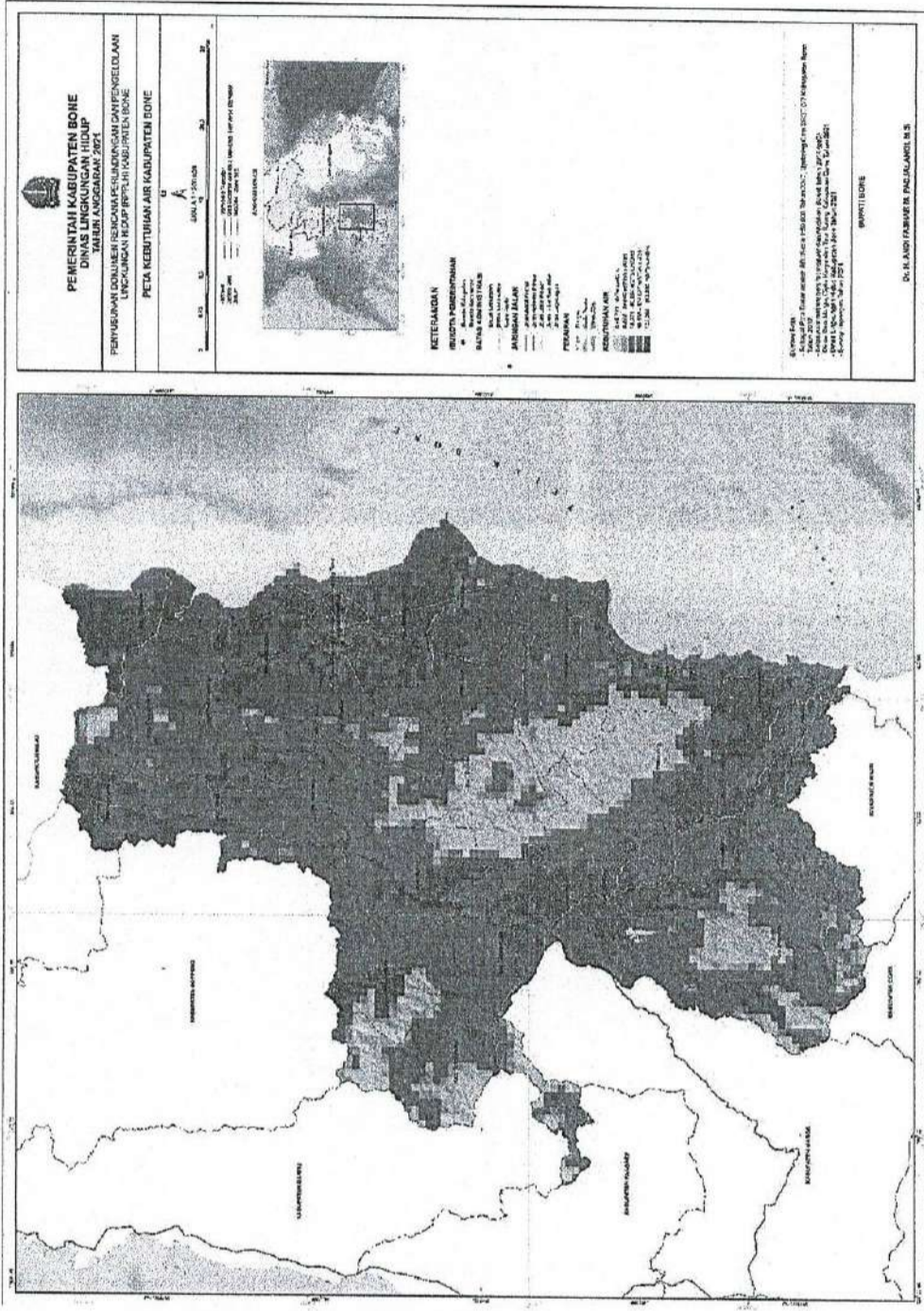
penyediaan air secara umum belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan air untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Libureng (35.978.474,27 m<sup>3</sup>/Tahun), dan Ponre (23.086.553,76 m<sup>3</sup>/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Taneteriattang Barat (1.401.854,85 m<sup>3</sup>/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan Taneteriattang Barat merupakan pusat perkotaan Kabupaten Bone, dimana jumlah penduduk dan aktivitas cukup besar dibandingkan kecamatan lain.







Gambar 2.20. Peta Kebutuhan Air di Kabupaten Bone







Meski secara umum ketersediaan air di Kabupaten Bone masih berlebih, namun analisis pada skala grid menunjukkan bahwa terdapat beberapa grid yang ketersediaan airnya tidak mencukupi seperti pada beberapa grid di wilayah Kecamatan Tanete Riattang Barat. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut kebutuhan air lebih besar dari pada ketersediaan. Untuk memperjelas analisis tersebut maka pada gambar dibawah ini diperlihatkan status daya dukung penyediaan air di Kabupaten Bone berbasis grid. Hal ini menunjukkan terdapat area yang status daya dukung penyediaan airnya telah melampaui ambang batas.





Berdasarkan analisis terhadap luasan grid terdapat 1,92% dari total luas wilayah yang status daya dukung airnya melampaui ambang batas, sementara terdapat 98,08% dari total luas wilayah belum melampaui status daya dukung airnya.

## 2. Analisis Daya Dukung Penyediaan Pangan

Untuk perhitungan ketersediaan pangan, data yang digunakan adalah Indeks Jasa Lingkungan dalam sistem grid dan data produksi bahan pangan tiap kabupaten. Pendekatan penghitungan ketersediaan jasa lingkungan penyedia pangan Kabupaten adalah diasumsikan sama dengan total ketersediaan energi bahan pangan di wilayah tersebut. Total energi pangan merupakan total produksi bahan pangan di tiap kabupaten yang dikonversikan menjadi satuan energi atau kilo kalori (kkal). Energi untuk tiap jenis bahan pangan masing-masing berbeda. Untuk dapat menghitung ketersediaan pangan, data yang diperlukan adalah total produksi pangan untuk masing-masing jenis bahan pangan. Persamaan untuk menghitung ketersediaan pangan atau ketersediaan energi pangan Kabupaten adalah sebagai berikut:

$$EP_j = \text{Total Ketersediaan Energi Pangan}_j = \sum_{i=1}^n (\text{Produksi bahan pangan}_i \times \text{Nilai kandungan Kalori}_i)$$

Pendistribusian ketersediaan energi pangan ke dalam sistem grid dilakukan dengan mendistribusikan total ketersediaan energi pangan Kabupaten ke dalam sistem grid secara proporsional berdasarkan perbandingan antara Nilai Indeks Jasa Lingkungan Penyedia Pangan masing-masing grid dengan Nilai Indeks total Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten.



Persamaan yang digunakan untuk menghitung ketersediaan energi pangan masing-masing grid adalah sebagai berikut:

$$EP_{ij} = \text{Ketersediaan energi pangan pada Grid}_i$$
$$= \text{Total Ketersediaan Energi pangan}_{prov/kab/kota} \times \frac{\text{Indeks Jasa Penyedia Pangan}_i}{\text{Total Indeks Jasa Penyedia Pangan}_{prov/kota/kab}}$$

Hasil penghitungan ketersediaan energi pangan pada setiap grid kemudian disajikan dalam bentuk peta. Cara penyajiannya digunakan pengelompokan ketersediaan energi pangan dengan sistem pewarnaan gradasi.

Kebutuhan bahan pangan atau energi pangan untuk tiap grid diperoleh melalui perhitungan Angka Kecukupan Energi (AKE) penduduk tiap grid selama setahun. AKE merupakan besar kebutuhan energi bahan pangan suatu individu untuk melakukan pekerjaan atau aktivitas harian (Hardinsyah, 2012).

Untuk dapat menghitung kebutuhan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan masing-masing grid perlu diketahui jumlah penduduk tiap-tiap grid. Rumus yang digunakan untuk pendistribusian jumlah penduduk dalam satu provinsi, kabupaten, atau kota didistribusikan ke dalam system grid adalah sama dengan rumus pendistribusian penduduk pada saat penentuan DDLH jasa lingkungan penyedia air yaitu menggunakan Model Densitas Populasi.

Kebutuhan bahan pangan atau energi pangan untuk tiap grid dihitung dengan menggunakan asumsi bahwa Angka Kebutuhan Energi (AKE) per kapita sebesar 2.150 kkal/hari/kapita. Persamaan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan Bahan Pangan/Energi Pangan untuk masing-masing grid adalah sebagai berikut:



$$K_i = P_{ij} \times AKE \times 365$$

dengan :

$K_i$  = kebutuhan energi pangan per kapita per tahun untuk grid ke-i (kkal/tahun)

$P_{ij}$  = jumlah penduduk grid ke - i di provinsi/kabupaten/kota j

$AKE$  = Angka Kebutuhan Energi per kapita = 2.150 kkal/hari/kapita

Penentuan status DDLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan dilakukan melalui perhitungan ambang batas penduduk. Ambang batas penduduk adalah jumlah penduduk maksimal yang dapat dilayani oleh ketersediaan jasa lingkungan. Status DDLH indikatif dapat diketahui dengan membandingkan antara ambang batas penduduk dengan jumlah penduduk pada waktu tertentu.

Ambang batas penduduk diperoleh melalui pembagian ketersediaan bahan pangan atau energi pangan dengan kebutuhan energi pangan per kapita. Ambang batas penduduk dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$TP_{ij} = \frac{EP_{ij}}{AKE_{ij} \times 365}$$

dengan:

$TP_{ij}$  = ambang batas penduduk untuk jasa lingkungan penyedia pangan pada grid i di wilayah j

$EP_{ij}$  = ketersediaan bahan pangan / energy pangang pada grid i di wilayah j (kkal/tahun)

$P_{ij}$  = jumlah penduduk pada grid i di wilayah j (jiwa)

Ambang batas penduduk untuk jasa lingkungan penyedia





pangan Provinsi/Kabupaten/Kota merupakan agregasi ambang batas penduduk seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan.

Status DDLH indikatif untuk masing-masing grid dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut:

$$DDLH \text{ penyedia pangan} = TP_{ij} - P_{ij}$$

**dengan:**

$TP_{ij}$  = ambang batas penduduk untuk jasa lingkungan penyedia pangan pada grid  $i$  di wilayah  $j$

$P_{ij}$  = jumlah penduduk pada grid  $i$  di wilayah  $j$  (jiwa)

Hasil perhitungan DDLH tersebut menunjukkan status DDLH indikatif. Jika nilai DDLH penyedia pangan pada grid ke- $i$  bernilai positif, maka menunjukkan bahwa DDLH di grid tersebut masih mampu mendukung kebutuhan pangan di wilayah grid tersebut. Sebaliknya, jika nilai DDLH negatif, maka DDLH di grid tersebut telah melampaui ambang batasnya. Daya dukung lingkungan hidup untuk penyedia pangan Provinsi, Kabupaten atau Kota merupakan agregasi nilai DDLH seluruh grid-grid pada wilayah yang bersangkutan.

Seluruh status DDLH tiap grid perlu disajikan dalam peta agar lebih informatif dan memudahkan untuk mengidentifikasi lokasi. Penyajian informasi daya dukung lingkungan hidup untuk jasa penyedia pangan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu DDLH terlampaui dan DDLH belum terlampaui. Adapun hasil analisis penyediaan pangan di Kabupaten Bone diperlihatkan pada tabel dibawah ini :



Tabel-2.56 Ketersediaan dan Kebutuhan Penyediaan Pangan  
Di Kabupaten Bone

Kecamatan	Status Pangan Tahun 2020 (kkal/tahun)		
	Ketersediaan	Kebutuhan	Selisih
Ajangale	348.700.273,93	59.129.300,00	289.570.973,93
Amali	241.690.660,22	44.666.250,00	197.024.410,22
Awangpone	286.749.637,98	63.635.700,00	223.113.937,98
Barebbo	277.648.724,02	59.982.850,00	217.665.874,02
Bengo	306.395.477,10	54.919.600,00	251.475.877,10
Bontocani	118.570.476,08	34.013.000,00	84.557.476,08
Cenrana	177.045.476,07	52.386.900,00	124.658.576,07
Cina	156.089.354,90	57.448.000,00	98.641.354,90
Duaboccoe	509.013.551,13	65.099.850,00	443.913.701,13
Kahu	367.836.669,08	84.114.450,00	283.722.219,08
Kajuara	234.296.218,97	79.397.350,00	154.898.868,97
Lamuru	116.665.920,12	54.057.450,00	62.608.470,12
Lappariaja	262.565.731,78	51.584.950,00	210.980.781,78
Libureng	503.411.442,31	64.725.750,00	438.685.692,31
Mare	176.092.310,97	58.409.050,00	117.683.260,97
Palakka	146.598.385,07	48.985.600,00	97.612.785,07
Patimpeng	150.278.925,01	36.167.300,00	114.111.625,01
Ponre	115.073.999,24	30.218.250,00	84.855.749,24
Salomekko	157.640.013,02	33.733.500,00	123.906.513,02
Sibulue	264.859.079,08	74.426.550,00	190.432.529,08
Taneteriattang	72.452.761,99	114.302.600,00	-41.849.838,01
Taneteriattang Barat	63.061.068,98	107.115.150,00	-44.054.081,02
Taneteriattang Timur	143.304.379,97	94.481.750,00	48.822.629,97
Tellulimpoe	76.134.937,28	30.499.900,00	45.635.037,28
Tellusiattinge	523.175.834,83	8.623.650,00	514.552.184,83
Tonra	134.789.654,14	29.837.700,00	104.951.954,14
Ulaweng	145.577.684,89	53.304.950,00	92.272.734,89



<b>Total</b>	<b>6.075.718.648,16</b>	<b>1.545.267.350,00</b>	<b>4.530.451.298,16</b>
--------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Sumber : KLHS RTRW Kabupaten Bone, 2021

Hasil kajian daya dukung penyediaan pangan berdasarkan tabel diatas menunjukkan ketersediaan pangan di Kabupaten Bone sebesar 6.075.718.648,16 Kkal/Tahun, sementara kebutuhan sebesar 1.545.267.350,00 Kkal/Tahun, sehingga masih ada selisih sebesar 4.530.451.298,16 Kkal/Tahun, hal ini berarti ambang batas daya dukung penyediaan pangan secara umum belum terlampaui. Hasil analisis antara ketersediaan dan kebutuhan pangan untuk setiap kecamatannya memperlihatkan selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Tellusiattinge (514.552.184,83 Kkal/Tahun), dan Libureng (438.685.692,31 Kkal/Tahun), sementara untuk selisih antara ketersediaan dan kebutuhan terkecil terdapat pada Kecamatan Taneteriattang Barat (-44.054.081,02 Kkal/Tahun) dan Kecamatan Taneteriattang (-41.849.838,01 Kkal/Tahun). Hal ini dapat dipahami dikarenakan Kecamatan Taneteriattang Barat dan Taneteriattang merupakan pusat perkotaan Kabupaten Bone, dimana jumlah penduduk dan kebutuhan pangan lebih besar dibandingkan ketersediaan pangan.





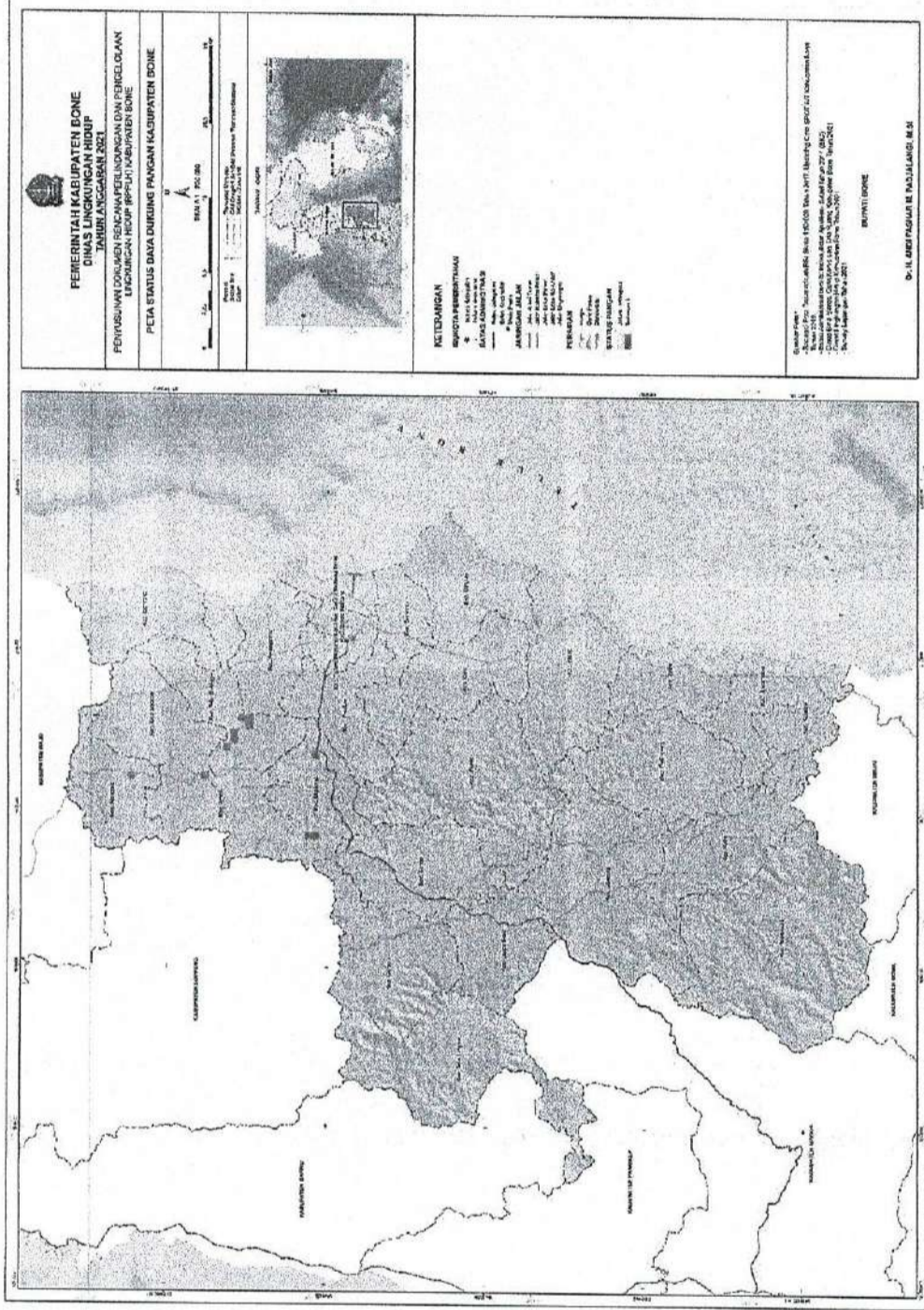




Meski secara umum ketersediaan pangan di Kabupaten Bone masih berlebih, namun analisis pada skala grid menunjukkan bahwa terdapat beberapa grid yang ketersediaan pangannya tidak mencukupi. Hal ini dikarenakan pada wilayah tersebut kebutuhan pangan lebih besar dari pada ketersediaan. Untuk memperjelas analisis tersebut maka pada gambar dibawah ini diperlihatkan status daya dukung penyediaan pangan di Kabupaten Bone berbasis grid. Hal ini menunjukkan terdapat area yang status daya dukung penyediaan pangannya telah melampaui ambang batas. Secara total terdapat 8,11 % dari total luas wilayah di Kabupaten Bone yang status penyedia pangannya telah melampaui ambang batas. Sementara yang tidak melampaui ambang batas terdapat 91,89 % dari total luas wilayah di Kabupaten Bone. Wilayah yang melampaui ambang batas pangannya tidak signifikan berdampak dikarenakan pada faktanya kebutuhan pangan pada wilayah tersebut dapat disuplai oleh wilayah di sekitarnya.



Gambar 2.26. Peta Status Daya Dukung Pangan di Kabupaten Bone







#### **R. PROYEKSI KETERSEDIAAN AIR 30 TAHUN KEDEPAN**

Proyeksi pemenuhan ketersediaan air 30 tahun kedepan dapat diukur dengan cara mengetahui jumlah kebutuhan air 30 tahun kedepan melalui proyeksi jumlah penduduk. Beberapa jenis analisis dapat digunakan dalam proyeksi jumlah penduduk, salah satunya yaitu proyeksi bunga berganda. Rumus matematis analisis bunga berganda yaitu sebagai berikut;

$$P_t = P_o (1+r)^n$$

Dimana :

- P<sub>t</sub> : Jumlah Penduduk tahun n
- P<sub>o</sub> : Jumlah Penduduk Tahu dasar
- r : Angka Perumbuhan Penduduk
- n : Jangka Waktu dalam tahun

sedangkan untuk mengetahui kebutuhan penggunaan air per jiwa dapat dihitung dengan menggunakan SNI 03-1733-2004 Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, dimana rincian perhitungannya dapat dilihat pada tabel berikut ini;



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

Tabel-2.57 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2022

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)
1	Bontocani	19.086	1.335.989	267.198	320.637	1.923.825	702.196
2	Kahu	41.767	2.923.689	584.738	701.685	4.210.112	1.536.691
3	Kajuara	37.092	2.596.457	519.291	623.150	3.738.898	1.364.698
4	Salomekko	17.319	1.212.330	242.466	290.959	1.745.756	637.201
5	Tonra	16.020	1.121.398	224.280	269.136	1.614.813	589.407
6	Patimpeng	19.138	1.339.673	267.935	321.521	1.929.129	704.132
7	Libureng	33.163	2.321.430	464.286	557.143	3.342.860	1.220.144
8	Mare	30.184	2.112.860	422.572	507.086	3.042.518	1.110.519
9	Sibulue	36.104	2.527.278	505.456	606.547	3.639.281	1.328.337
10	Cina	29.685	2.077.932	415.586	498.704	2.992.221	1.092.161
11	Barebbo	31.229	2.186.045	437.209	524.651	3.147.905	1.148.985
12	Ponre	15.903	1.113.189	222.638	267.165	1.602.993	585.092
13	Lappariaja	29.078	2.035.437	407.087	488.505	2.931.029	1.069.826
14	Lamuru	26.986	1.889.048	377.810	453.372	2.720.229	992.884
15	Tellulimpoe	17.386	1.217.041	243.408	292.090	1.752.538	639.677
16	Bengo	27.870	1.950.929	390.186	468.223	2.809.338	1.025.408
17	Ulaweng	28.288	1.980.144	396.029	475.235	2.851.408	1.040.764
18	Palakka	27.485	1.923.926	384.785	461.742	2.770.453	1.011.215
19	Awangpone	36.770	2.573.926	514.785	617.742	3.706.453	1.352.855



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)
20	Tellu Siattinge	49.443	3.460.976	692.195	830.634	4.983.806	1.819.089
21	Amali	21.470	1.502.903	300.581	360.697	2.164.180	789.926
22	Ajangale	29.102	2.037.152	407.430	488.916	2.933.499	1.070.727
23	Dua Boccoe	34.989	2.449.211	489.842	587.811	3.526.864	1.287.305
24	Cenrana	28.141	1.969.876	393.975	472.770	2.836.622	1.035.367
25	Tanete Riattang Barat	52.288	3.660.169	732.034	878.441	5.270.643	1.923.785
26	Tanete Riattang	52.376	3.666.305	733.261	879.913	5.279.479	1.927.010
27	Tanete Riattang Timur	48.349	3.384.446	676.889	812.267	4.873.602	1.778.865
<b>Jumlah</b>		<b>836.711</b>	<b>58.569.759</b>	<b>11.713.952</b>	<b>14.056.742</b>	<b>84.340.452</b>	<b>30.784.265</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Tabel-2.58 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2027

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)
1	Bontocani	22.376	1.566.343	313.269	375.922	2.255.534	823.270
2	Kahu	44.272	3.099.062	619.812	743.775	4.462.650	1.628.867
3	Kajuara	37.433	2.620.275	524.055	628.866	3.773.196	1.377.217
4	Salomekko	18.878	1.321.475	264.295	317.154	1.902.923	694.567



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /Tahun)
5	Tonra	18.179	1.272.519	254.504	305.405	1.832.428	668.836
6	Patimpeng	21.438	1.500.637	300.127	360.153	2.160.917	788.735
7	Libureng	36.043	2.522.989	504.598	605.517	3.633.104	1.326.083
8	Mare	33.167	2.321.676	464.335	557.202	3.343.213	1.220.273
9	Sibulue	37.572	2.630.031	526.006	631.207	3.787.244	1.382.344
10	Cina	32.540	2.277.811	455.562	546.675	3.280.049	1.197.218
11	Barebbo	34.467	2.412.674	482.535	579.042	3.474.251	1.268.102
12	Ponre	17.720	1.240.419	248.084	297.700	1.786.203	651.964
13	Lappariaja	34.226	2.395.848	479.170	575.003	3.450.021	1.259.258
14	Lamuru	28.705	2.009.373	401.875	482.250	2.893.498	1.056.127
15	Tellulimpoe	20.650	1.445.527	289.105	346.927	2.081.559	759.769
16	Bengo	30.001	2.100.104	420.021	504.025	3.024.149	1.103.814
17	Ulaweng	31.607	2.212.455	442.491	530.989	3.185.935	1.162.866
18	Palakka	32.218	2.255.285	451.057	541.268	3.247.611	1.185.378
19	Awangpone	44.186	3.093.052	618.610	742.333	4.453.995	1.625.708
20	Tellu Siattinge	58.828	4.117.937	823.587	988.305	5.929.829	2.164.388
21	Amali	22.085	1.545.929	309.186	371.023	2.226.137	812.540
22	Ajangale	30.532	2.137.272	427.454	512.945	3.077.671	1.123.350
23	Dua Boccoe	39.509	2.765.610	553.122	663.746	3.982.478	1.453.605



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)
24	Cenrana	31.842	2.228.962	445.792	534.951	3.209.705	1.171.542
25	Tanete Riattang Barat	55.062	3.854.360	770.872	925.046	5.550.279	2.025.852
26	Tanete Riattang	52.126	3.648.827	729.765	875.718	5.254.310	1.917.823
27	Tanete Riattang Timur	52.726	3.690.818	738.164	885.796	5.314.778	1.939.894
<b>Jumlah</b>		<b>918.390</b>	<b>64.287.270</b>	<b>12.857.454</b>	<b>15.428.945</b>	<b>92.573.669</b>	<b>33.789.389</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Tabel-2.59 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2032

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)
1	Bontocani	26.235	1.836.415	367.283	440.740	2.644.438	965.220
2	Kahu	46.928	3.284.956	656.991	788.389	4.730.336	1.726.573
3	Kajuara	37.776	2.644.312	528.862	634.635	3.807.810	1.389.851
4	Salomekko	20.578	1.440.445	288.089	345.707	2.074.241	757.098
5	Tonra	20.629	1.444.006	288.801	346.561	2.079.369	758.970
6	Patimpeng	24.013	1.680.941	336.188	403.426	2.420.555	883.503
7	Libureng	39.172	2.742.048	548.410	658.091	3.948.549	1.441.220
8	Marc	36.445	2.551.130	510.226	612.271	3.673.627	1.340.874



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)
9	Sibulue	39.099	2.736.961	547.392	656.871	3.941.224	1.438.547
10	Cina	35.670	2.496.918	499.384	599.260	3.595.562	1.312.380
11	Barebbo	38.040	2.662.799	532.560	639.072	3.834.431	1.399.567
12	Ponre	19.746	1.382.189	276.438	331.725	1.990.352	726.479
13	Lappariaja	40.287	2.820.076	564.015	676.818	4.060.909	1.482.232
14	Lamuru	30.534	2.137.363	427.473	512.967	3.077.803	1.123.398
15	Tellulimpo	24.527	1.716.910	343.382	412.058	2.472.350	902.408
16	Bengo	32.295	2.260.684	452.137	542.564	3.255.385	1.188.216
17	Ulaweng	35.315	2.472.020	494.404	593.285	3.559.709	1.299.294
18	Palakka	37.767	2.643.715	528.743	634.492	3.806.949	1.389.537
19	Awangpone	53.098	3.716.880	743.376	892.051	5.352.307	1.953.592
20	Tellu Siattinge	69.994	4.899.602	979.920	1.175.904	7.055.426	2.575.231
21	Amali	22.717	1.590.186	318.037	381.645	2.289.868	835.802
22	Ajangale	32.033	2.242.312	448.462	538.155	3.228.929	1.178.559
23	Dua Boccoe	44.613	3.122.883	624.577	749.492	4.496.951	1.641.387
24	Cenrana	36.030	2.522.123	504.425	605.310	3.631.857	1.325.628
25	Tanete Riattang Barat	57.984	4.058.855	811.771	974.125	5.844.751	2.133.334
26	Tanete Riattang	51.878	3.631.431	726.286	871.544	5.229.261	1.908.680
27	Tanete Riattang	57.499	4.024.924	804.985	965.982	5.795.890	2.115.500



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)
	Timur						
	<b>Jumlah</b>	<b>1.010.901</b>	<b>70.763.084</b>	<b>14.152.617</b>	<b>16.983.140</b>	<b>101.898.841</b>	<b>37.193.077</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Tabel-2.60 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2037

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)
1	Bontocani	30.758	2.153.054	430.611	516.733	3.100.398	1.131.645
2	Kahu	49.743	3.482.000	696.400	835.680	5.014.080	1.830.139
3	Kajuara	38.122	2.668.570	533.714	640.457	3.842.741	1.402.600
4	Salomekko	22.430	1.570.126	314.025	376.830	2.260.981	825.258
5	Tonra	23.409	1.638.603	327.721	393.265	2.359.588	861.249
6	Patimpeng	26.899	1.882.909	376.582	451.898	2.711.389	989.657
7	Libureng	42.573	2.980.127	596.025	715.230	4.291.382	1.566.355
8	Mare	40.047	2.803.261	560.652	672.783	4.036.695	1.473.394
9	Sibulue	40.689	2.848.239	569.648	683.577	4.101.464	1.497.035
10	Cina	39.101	2.737.101	547.420	656.904	3.941.426	1.438.620
11	Barebbo	41.984	2.938.854	587.771	705.325	4.231.950	1.544.662
12	Ponre	22.002	1.540.163	308.033	369.639	2.217.835	809.510



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /Tahun)
13	Lappariaja	47.420	3.319.421	663.884	796.661	4.779.966	1.744.688
14	Lamuru	32.479	2.273.505	454.701	545.641	3.273.848	1.194.954
15	Tellulimpoe	29.132	2.039.242	407.848	489.418	2.936.508	1.071.825
16	Bengo	34.765	2.433.543	486.709	584.050	3.504.302	1.279.070
17	Ulaweng	39.458	2.762.038	552.408	662.889	3.977.335	1.451.727
18	Palakka	44.272	3.099.044	619.809	743.771	4.462.624	1.628.858
19	Awangpone	63.808	4.466.526	893.305	1.071.966	6.431.797	2.347.606
20	Tellu Siattinge	83.281	5.829.641	1.165.928	1.399.114	8.394.684	3.064.060
21	Amali	23.367	1.635.711	327.142	392.571	2.355.423	859.730
22	Ajangale	33.607	2.352.514	470.503	564.603	3.387.620	1.236.481
23	Dua Boccoe	50.376	3.526.309	705.262	846.314	5.077.885	1.853.428
24	Cenrana	40.769	2.853.842	570.768	684.922	4.109.533	1.499.979
25	Tanete Riattang Barat	61.060	4.274.199	854.840	1.025.808	6.154.846	2.246.519
26	Tanete Riattang	51.630	3.614.119	722.824	867.389	5.204.331	1.899.581
27	Tanete Riattang Timur	62.704	4.389.274	877.855	1.053.426	6.320.555	2.307.003
<b>Jumlah</b>		<b>1.115.885</b>	<b>78.111.934</b>	<b>15.622.387</b>	<b>18.746.864</b>	<b>112.481.185</b>	<b>41.055.633</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022





Tabel-2.61 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2042

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /Tahun)
1	Bontocani	36.061	2.524.288	504.858	605.829	3.634.975	1.326.766
2	Kahu	52.727	3.690.863	738.173	885.807	5.314.843	1.939.918
3	Kajuara	38.472	2.693.050	538.610	646.332	3.877.992	1.415.467
4	Salomekko	24.450	1.711.482	342.296	410.756	2.464.534	899.555
5	Tonra	26.563	1.859.423	371.885	446.262	2.677.569	977.313
6	Patimpeng	30.131	2.109.144	421.829	506.194	3.037.167	1.108.566
7	Libureng	46.270	3.238.877	647.775	777.330	4.663.982	1.702.354
8	Mare	44.004	3.080.310	616.062	739.274	4.435.647	1.619.011
9	Sibulue	42.343	2.964.041	592.808	711.370	4.268.220	1.557.900
10	Cina	42.863	3.000.388	600.078	720.093	4.320.559	1.577.004
11	Barebbo	46.336	3.243.529	648.706	778.447	4.670.681	1.704.799
12	Ponre	24.517	1.716.192	343.238	411.886	2.471.316	902.030
13	Lappariaja	55.817	3.907.184	781.437	937.724	5.626.345	2.053.616
14	Lamuru	34.547	2.418.319	483.664	580.397	3.482.380	1.271.069
15	Tellimpoe	34.601	2.422.088	484.418	581.301	3.487.807	1.273.050
16	Bengo	37.423	2.619.620	523.924	628.709	3.772.252	1.376.872
17	Ulaweng	44.087	3.086.080	617.216	740.659	4.443.956	1.622.044
18	Palakka	51.897	3.632.795	726.559	871.871	5.231.225	1.909.397



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /Tahun)
19	Awangpone	76.677	5.367.365	1.073.473	1.288.168	7.729.005	2.821.087
20	Tellu Siattinge	99.089	6.936.221	1.387.244	1.664.693	9.988.158	3.645.678
21	Amali	24.036	1.682.538	336.508	403.809	2.422.855	884.342
22	Ajangale	35.259	2.468.133	493.627	592.352	3.554.111	1.297.250
23	Dua Boccoe	56.884	3.981.852	796.370	955.644	5.733.866	2.092.861
24	Cenrana	46.131	3.229.190	645.838	775.006	4.650.034	1.697.262
25	Tanete Riattang Barat	64.300	4.500.968	900.194	1.080.232	6.481.393	2.365.709
26	Tanete Riattang	51.384	3.596.889	719.378	863.253	5.179.520	1.890.525
27	Tanete Riattang Timur	68.380	4.786.607	957.321	1.148.786	6.892.714	2.515.841
<b>Jumlah</b>		<b>1.235.249</b>	<b>86.467.436</b>	<b>17.293.487</b>	<b>20.752.185</b>	<b>124.513.108</b>	<b>45.447.284</b>

Sumber : Hasil Anitisis Tahun 2022



Tabel-2.62 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2047

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sumbangan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /Tahun)
1	Bontocani	42.279	2.959.531	591.906	710.287	4.261.724	1.555.529
2	Kahu	55.889	3.912.255	782.451	938.941	5.633.648	2.056.281
3	Kajuara	38.825	2.717.755	543.551	652.261	3.913.567	1.428.452
4	Salomekko	26.651	1.865.564	373.113	447.735	2.686.412	980.540
5	Tonra	30.143	2.110.002	422.000	506.400	3.038.403	1.109.017
6	Patimpeng	33.751	2.362.561	472.512	567.015	3.402.088	1.241.762
7	Libureng	50.287	3.520.093	704.019	844.822	5.068.933	1.850.161
8	Mare	48.353	3.384.741	676.948	812.338	4.874.027	1.779.020
9	Sibulue	44.065	3.084.552	616.910	740.292	4.441.755	1.621.240
10	Cina	46.986	3.289.001	657.800	789.360	4.736.161	1.728.699
11	Barebbo	51.140	3.579.789	715.958	859.149	5.154.896	1.881.537
12	Ponre	27.319	1.912.340	382.468	458.962	2.753.769	1.005.126
13	Lappariaja	65.700	4.599.022	919.804	1.103.765	6.622.591	2.417.246
14	Lamuru	36.748	2.572.357	514.471	617.366	3.704.195	1.352.031
15	Tellulimpoe	41.097	2.876.810	575.362	690.434	4.142.606	1.512.051
16	Bengo	40.285	2.819.924	563.985	676.782	4.060.690	1.482.152
17	Ulaweng	49.259	3.448.139	689.628	827.553	4.965.321	1.812.342
18	Palakka	60.835	4.258.475	851.695	1.022.034	6.132.203	2.238.254



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m <sup>3</sup> /Tahun)
19	Awangpone	92.141	6.449.891	1.289.978	1.547.974	9.287.843	3.390.063
20	Tellu Siattinge	117.898	8.252.851	1.650.570	1.980.684	11.884.105	4.337.698
21	Amali	24.724	1.730.707	346.141	415.370	2.492.218	909.659
22	Ajangale	36.992	2.589.433	517.887	621.464	3.728.784	1.361.006
23	Dua Boccoe	64.232	4.496.243	899.249	1.079.098	6.474.590	2.363.225
24	Cenrana	52.199	3.653.905	730.781	876.937	5.261.624	1.920.493
25	Tanete Riattang Barat	67.711	4.739.768	947.954	1.137.544	6.825.266	2.491.222
26	Tanete Riattang	51.139	3.579.742	715.948	859.138	5.154.828	1.881.512
27	Tanete Riattang Timur	74.570	5.219.908	1.043.982	1.252.778	7.516.668	2.743.584
<b>Jumlah</b>		<b>1.371.219</b>	<b>95.985.357</b>	<b>19.197.071</b>	<b>23.036.486</b>	<b>138.218.914</b>	<b>50.449.904</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

Tabel-2.63 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih Di Kabupaten Bone Tahun 2052

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Unit Sambungan Rumah (SR) (liter/orang/hari)	Konsumsi unit non domestik (liter/hari)	Persentase Kehilangan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (liter/hari)	Jumlah Kebutuhan Air (m3/Tahun)
1	Bontocani	49.569	3.469.819	693.964	832.757	4.996.540	1.823.737
2	Kahu	59.242	4.146.927	829.385	995.262	5.971.575	2.179.625
3	Kajuara	39.181	2.742.686	548.537	658.245	3.949.468	1.441.556
4	Salomekko	29.050	2.033.517	406.703	488.044	2.928.265	1.068.817
5	Tonra	34.205	2.394.349	478.870	574.644	3.447.862	1.258.470
6	Patimpeng	37.806	2.646.427	529.285	635.142	3.810.854	1.390.962
7	Libureng	54.653	3.825.725	765.145	918.174	5.509.044	2.010.801
8	Mare	53.132	3.719.258	743.852	892.622	5.355.732	1.954.842
9	Sibulue	45.857	3.209.962	641.992	770.391	4.622.345	1.687.156
10	Cina	51.505	3.605.376	721.075	865.290	5.191.741	1.894.985
11	Barebbo	56.442	3.950.909	790.182	948.218	5.689.309	2.076.598
12	Ponre	30.442	2.130.906	426.181	511.417	3.068.504	1.120.004
13	Lappariaja	77.334	5.413.361	1.082.672	1.299.207	7.795.240	2.845.263
14	Lamuru	39.089	2.736.207	547.241	656.690	3.940.138	1.438.150
15	Tellulimpoe	48.813	3.416.901	683.380	820.056	4.920.337	1.795.923
16	Bengo	43.365	3.035.544	607.109	728.531	4.371.184	1.595.482
17	Ulaweng	55.038	3.852.675	770.535	924.642	5.547.853	2.024.966
18	Palakka	71.313	4.991.915	998.383	1.198.060	7.188.358	2.623.751



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

19	Awangpone	110.725	7.750.749	1.550.150	1.860.180	11.161.078	4.073.794
20	Tellu Siattinge	140.277	9.819.403	1.963.881	2.356.657	14.139.940	5.161.078
21	Amali	25.432	1.780.254	356.051	427.261	2.563.566	935.702
22	Ajangale	38.810	2.716.696	543.339	652.007	3.912.042	1.427.895
23	Dua Boccoe	72.530	5.077.086	1.015.417	1.218.501	7.311.004	2.668.516
24	Cenrana	59.064	4.134.481	826.896	992.275	5.953.652	2.173.083
25	Tanete Riattang Barat	71.303	4.991.238	998.248	1.197.897	7.187.382	2.623.395
26	Tanete Riattang	50.895	3.562.676	712.535	855.042	5.130.253	1.872.542
27	Tanete Riattang Timur	81.320	5.692.433	1.138.487	1.366.184	8.197.103	2.991.943
<b>Jumlah</b>		<b>1.526.393</b>	<b>106.847.480</b>	<b>21.369.496</b>	<b>25.643.395</b>	<b>153.860.372</b>	<b>56.159.036</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022



#### S. PROYEKSI KETERSEDIAAN PANGAN 30 TAHUN KEDEPAN

Kebutuhan bahan pangan atau energi pangan untuk 30 tahun kedepan dihitung dengan menggunakan asumsi bahwa Angka Kebutuhan Energi (AKE) per kapita sebesar 2.150 kkal/hari/kapita. Persamaan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan Bahan Pangan/Energi Pangan untuk masing-masing grid adalah sebagai berikut:

$$K = P \times AKE \times 365$$

dengan :

$K$  = kebutuhan energi pangan per kapita per tahun  
(kkal/tahun)

$P$  = jumlah penduduk (Jiwa)

$AKE$  = Angka Kebutuhan Energi per kapita = 2.150  
kkal/hari/kapita.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui kebutuhan pangan di Kabupaten Bone tahun 2022 yaitu 656.608.829.172 kkal/tahun, sedangkan untuk 30 tahun kedepan yaitu pada tahun 2052 yaitu sebesar 1.197.836.574.094 kkal/tahun, mengalami peningkatan sebanyak 541.227.744.922 kkal/tahun atau sekitar 82,43%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini;

Tabel-2.64 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2022

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
1	Bontocani	19.086	2.150	14.977.393.926
2	Kahu	41.767	2.150	32.776.637.077
3	Kajuara	37.092	2.150	29.108.134.339
4	Salomekko	17.319	2.150	13.591.090.460
5	Tonra	16.020	2.150	12.571.672.867
6	Patimpeng	19.138	2.150	15.018.689.012
7	Libureng	33.163	2.150	26.024.892.416
8	Mare	30.184	2.150	23.686.664.923



No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
9	Sibulue	36.104	2.150	28.332.593.007
10	Cina	29.685	2.150	23.295.096.605
11	Barebbo	31.229	2.150	24.507.123.830
12	Ponre	15.903	2.150	12.479.649.428
13	Lappariaja	29.078	2.150	22.818.702.042
14	Lamuru	26.986	2.150	21.177.576.550
15	Tellulimpoe	17.386	2.150	13.643.893.897
16	Bengo	27.870	2.150	21.871.311.860
17	Ulaweng	28.288	2.150	22.198.833.465
18	Palakka	27.485	2.150	21.568.582.508
19	Awangpone	36.770	2.150	28.855.543.697
20	Tellu Siattinge	49.443	2.150	38.800.014.500
21	Amali	21.470	2.150	16.848.617.116
22	Ajangale	29.102	2.150	22.837.929.518
23	Dua Boccoe	34.989	2.150	27.457.405.327
24	Cenrana	28.141	2.150	22.083.719.881
25	Tanete Riattang Barat	52.288	2.150	41.033.108.213
26	Tanete Riattang	52.376	2.150	41.101.899.470
27	Tanete Riattang Timur	48.349	2.150	37.942.053.239
<b>Jumlah</b>		<b>836.711</b>		<b>656.608.829.172</b>

Sumber : Hasil Anlisis Tahun 2022

Tabel-2.65 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2027

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
1	Bontocani	22.376	2.150	17.559.826.946
2	Kahu	44.272	2.150	34.742.703.252
3	Kajuara	37.433	2.150	29.375.158.004
4	Salomekko	18.878	2.150	14.814.674.372
5	Tonra	18.179	2.150	14.265.850.912
6	Patimpeng	21.438	2.150	16.823.210.353
7	Libureng	36.043	2.150	28.284.508.002
8	Mare	33.167	2.150	26.027.644.731
9	Sibulue	37.572	2.150	29.484.524.628





No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
10	Cina	32.540	2.150	25.535.893.734
11	Barebbo	34.467	2.150	27.047.804.018
12	Ponre	17.720	2.150	13.905.979.081
13	Lappariaja	34.226	2.150	26.859.164.493
14	Lamuru	28.705	2.150	22.526.510.746
15	Tellulimpoe	20.650	2.150	16.205.392.583
16	Bengo	30.001	2.150	23.543.661.334
17	Ulaweng	31.607	2.150	24.803.201.666
18	Palakka	32.218	2.150	25.283.357.943
19	Awangpone	44.186	2.150	34.675.325.171
20	Tellu Siattinge	58.828	2.150	46.165.013.625
21	Amali	22.085	2.150	17.330.965.600
22	Ajangale	30.532	2.150	23.960.340.564
23	Dua Boccoe	39.509	2.150	31.004.462.924
24	Cenrana	31.842	2.150	24.988.253.456
25	Tanete Riattang Barat	55.062	2.150	43.210.133.093
26	Tanete Riattang	52.126	2.150	40.905.952.054
27	Tanete Riattang Timur	52.726	2.150	41.376.703.963
<b>Jumlah</b>		<b>918.390</b>		<b>720.706.217.250</b>

Sumber : Hasil Anlisis Tahun 2022

Tabel-2.66 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2032

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
1	Bontocani	26.235	2.150	20.587.528.372
2	Kahu	46.928	2.150	36.826.701.483
3	Kajuara	37.776	2.150	29.644.631.213
4	Salomekko	20.578	2.150	16.148.415.567
5	Tonra	20.629	2.150	16.188.339.006
6	Patimpeng	24.013	2.150	18.844.548.040
7	Libureng	39.172	2.150	30.740.315.085
8	Mare	36.445	2.150	28.599.986.213
9	Sibulue	39.099	2.150	30.683.290.878
10	Cina	35.670	2.150	27.992.237.157



No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kcal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kcal/tahun)
11	Barebbo	38.040	2.150	29.851.879.285
12	Ponre	19.746	2.150	15.495.327.439
13	Lappariaja	40.287	2.150	31.615.063.642
14	Lamuru	30.534	2.150	23.961.367.118
15	Tellulimpoe	24.527	2.150	19.247.785.915
16	Bengo	32.295	2.150	25.343.883.922
17	Ulaweng	35.315	2.150	27.713.114.470
18	Palakka	37.767	2.150	29.637.932.334
19	Awangpone	53.098	2.150	41.668.879.587
20	Tellu Siattinge	69.994	2.150	54.928.033.158
21	Amali	22.717	2.150	17.827.122.936
22	Ajangale	32.033	2.150	25.137.914.516
23	Dua Boccoe	44.613	2.150	35.009.743.629
24	Cenrana	36.030	2.150	28.274.802.169
25	Tanete Riattang Barat	57.984	2.150	45.502.660.734
26	Tanete Riattang	51.878	2.150	40.710.938.790
27	Tanete Riattang Timur	57.499	2.150	45.122.271.587
<b>Jumlah</b>		<b>1.010.901</b>		<b>793.304.714.245</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Tabel-2.67 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2037

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kcal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kcal/tahun)
1	Bontocani	30.758	2.150	24.137.272.295
2	Kahu	49.743	2.150	39.035.705.779
3	Kajuara	38.122	2.150	29.916.576.437
4	Salomekko	22.430	2.150	17.602.231.326
5	Tonra	23.409	2.150	18.369.904.563
6	Patimpeng	26.899	2.150	21.108.752.931
7	Libureng	42.573	2.150	33.409.348.023
8	Mare	40.047	2.150	31.426.555.106
9	Sibulue	40.689	2.150	31.930.795.933
10	Cina	39.101	2.150	30.684.860.661
11	Barebbo	41.984	2.150	32.946.656.086



No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
12	Ponre	22.002	2.150	17.266.326.308
13	Lappariaja	47.420	2.150	37.213.080.449
14	Lamuru	32.479	2.150	25.487.618.596
15	Tellulimpoe	29.132	2.150	22.861.356.844
16	Bengo	34.765	2.150	27.281.757.206
17	Ulaweng	39.458	2.150	30.964.418.382
18	Palakka	44.272	2.150	34.742.498.800
19	Awangpone	63.808	2.150	50.072.941.420
20	Tellu Siattinge	83.281	2.150	65.354.444.625
21	Amali	23.367	2.150	18.337.484.450
22	Ajangale	33.607	2.150	26.373.362.454
23	Dua Boccoe	50.376	2.150	39.532.442.538
24	Cenrana	40.769	2.150	31.993.610.082
25	Tanete Riattang Barat	61.060	2.150	47.916.819.173
26	Tanete Riattang	51.630	2.150	40.516.855.224
27	Tanete Riattang Timur	62.704	2.150	49.206.901.424
<b>Jumlah</b>		<b>1.115.885</b>		<b>875.690.577.113</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Tabel-2.68 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2042

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
1	Bontocani	36.061	2.150	28.299.070.356
2	Kahu	52.727	2.150	41.377.214.475
3	Kajuara	38.472	2.150	30.191.016.351
4	Salomekko	24.450	2.150	19.186.931.768
5	Tonra	26.563	2.150	20.845.461.264
6	Patimpeng	30.131	2.150	23.645.005.937
7	Libureng	46.270	2.150	36.310.120.187
8	Mare	44.004	2.150	34.532.476.989
9	Sibulue	42.343	2.150	33.229.021.391
10	Cina	42.863	2.150	33.636.492.450
11	Barebbo	46.336	2.150	36.362.271.765
12	Ponre	24.517	2.150	19.239.736.968
13	Lappariaja	55.817	2.150	43.802.327.023
14	Lamuru	34.547	2.150	27.111.086.712



No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
15	Tellulimpoe	34.601	2.150	27.153.338.001
16	Bengo	37.423	2.150	29.367.806.392
17	Ulaweng	44.087	2.150	34.597.165.425
18	Palakka	51.897	2.150	40.726.229.120
19	Awangpone	76.677	2.150	60.171.991.360
20	Tellu Siattinge	99.089	2.150	77.759.992.243
21	Amali	24.036	2.150	18.862.456.782
22	Ajangale	35.259	2.150	27.669.528.698
23	Dua Boccoe	56.884	2.150	44.639.401.807
24	Cenrana	46.131	2.150	36.201.529.544
25	Tanete Riattang Barat	64.300	2.150	50.459.061.573
26	Tanete Riattang	51.384	2.150	40.323.696.923
27	Tanete Riattang Timur	68.380	2.150	53.661.286.602
<b>Jumlah</b>		<b>1.235.249</b>		<b>969.361.718.106</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Tabel-2.69 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2047

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
1	Bontocani	42.279	2.150	33.178.454.186
2	Kahu	55.889	2.150	43.859.175.684
3	Kajuara	38.825	2.150	30.467.973.842
4	Salomekko	26.651	2.150	20.914.300.231
5	Tonra	30.143	2.150	23.654.627.807
6	Patimpeng	33.751	2.150	26.485.994.108
7	Libureng	50.287	2.150	39.462.752.374
8	Mare	48.353	2.150	37.945.360.635
9	Sibulue	44.065	2.150	34.580.029.415
10	Cina	46.986	2.150	36.872.046.995
11	Barebbo	51.140	2.150	40.131.988.036
12	Ponre	27.319	2.150	21.438.693.559
13	Lappariaja	65.700	2.150	51.558.318.459
14	Lamuru	36.748	2.150	28.837.963.811
15	Tellulimpoe	41.097	2.150	32.251.093.828
16	Bengo	40.285	2.150	31.613.361.477



No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
17	Ulaweng	49.259	2.150	38.656.106.524
18	Palakka	60.835	2.150	47.740.542.438
19	Awangpone	92.141	2.150	72.307.886.087
20	Tellu Siattinge	117.898	2.150	92.520.354.634
21	Amali	24.724	2.150	19.402.458.218
22	Ajangale	36.992	2.150	29.029.397.360
23	Dua Boccoe	64.232	2.150	50.406.098.529
24	Cenrana	52.199	2.150	40.962.890.339
25	Tanete Riattang Barat	67.711	2.150	53.136.183.468
26	Tanete Riattang	51.139	2.150	40.131.459.476
27	Tanete Riattang Timur	74.570	2.150	58.518.898.700
<b>Jumlah</b>		<b>1.371.219</b>		<b>1.076.064.410.222</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Tabel-2.70 Proyeksi Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bone Tahun 2052

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
1	Bontocani	49.569	2.150	38.899.151.398
2	Kahu	59.242	2.150	46.490.014.277
3	Kajuara	39.181	2.150	30.747.472.005
4	Salomekko	29.050	2.150	22.797.180.885
5	Tonra	34.205	2.150	26.842.361.971
6	Patimpeng	37.806	2.150	29.668.331.898
7	Libureng	54.653	2.150	42.889.112.372
8	Mare	53.132	2.150	41.695.543.421
9	Sibulue	45.857	2.150	35.985.966.010
10	Cina	51.505	2.150	40.418.835.335
11	Barebbo	56.442	2.150	44.292.514.895
12	Ponre	30.442	2.150	23.888.974.277
13	Lappariaja	77.334	2.150	60.687.647.963
14	Lamuru	39.089	2.150	30.674.836.668
15	Tellulimpoe	48.813	2.150	38.305.900.109
16	Bengo	43.365	2.150	34.030.618.785
17	Ulaweng	55.038	2.150	43.191.242.787
18	Palakka	71.313	2.150	55.962.936.944



No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	AKE (kkal/hari/kapita)	kebutuhan energi pangan per kapita per tahun (kkal/tahun)
19	Awangpone	110.725	2.150	86.891.430.251
20	Tellu Siattinge	140.277	2.150	110.082.521.548
21	Amali	25.432	2.150	19.957.919.016
22	Ajangale	38.810	2.150	30.456.099.208
23	Dua Boccoe	72.530	2.150	56.917.760.232
24	Cenrana	59.064	2.150	46.350.483.144
25	Tanete Riattang Barat	71.303	2.150	55.955.340.935
26	Tanete Riattang	50.895	2.150	39.940.138.495
27	Tanete Riattang Timur	81.320	2.150	63.816.239.265
<b>Jumlah</b>		<b>1.526.393</b>		<b>1.197.836.574.094</b>

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

#### T. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) KABUPATEN BONE, TAHUN 2020

Meningkatkan kualitas lingkungan hidup menjadi penting, mengingat kerusakan lingkungan hidup mulai berdampak dalam skala lokal dan tentunya akan berkontribusi terhadap skala global. Untuk itu perlu dilakukan upaya dalam melakukan pelestarian lingkungan hidup.

Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Selain itu, usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara – cara berikut ini :



1. Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran tidak tergenang.
2. Memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan.
3. Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir/pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga.
4. Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang Hak pengusahaan Hutan (HPH) agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran.

Sementara itu, sebagai masyarakat, beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai bentuk upaya pelestarian lingkungan hidup, antara lain yaitu :

1. Menghemat penggunaan kertas.
2. Membuang sampah pada tempatnya.
3. Memanfaatkan barang-barang hasil daur ulang.
4. Menghemat penggunaan listrik, air, BBM, serta,
5. Menanam dan merawat pohon disekitar lingkungan rumah tinggal.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) bertujuan untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup menggunakan kualitas air sungai, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan sebagai indikatornya. Selain itu IKLH juga



digunakan sebagai sarana untuk mengevaluasi efektivitas program-program pengelolaan lingkungan hidup.

Peranan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam pemerintahan diantaranya :

- a. Membantu perumusan kebijakan
- b. Membantu dalam mendesain program lingkungan
- c. Mempermudah komunikasi kepada publik sehubungan dengan kondisi lingkungan, dimana uu 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah mengamanatkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan yang diserahkan kepada daerah. Indeks kualitas lingkungan diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pengambil keputusan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk menentukan arah kebijakan pengelolaan lingkungan dimasa depan.

#### 1. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Untuk perhitungan indeks kualitas udara, diperoleh dari hasil Laporan Kualitas Udara Kabupaten Bone untuk tahun 2020, yang telah disusun oleh bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dalam perhitungannya dilakukan dengan mengacu pada 2 parameter yaitu konsentrasi  $\text{NO}_2$  dan  $\text{SO}_2$ .

Formula untuk konversi tersebut adalah :

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = 100 - \{(50/0,9) \times I_{\text{eu}} - 0,1\}$$

$$\text{IKU} = \frac{\text{IP NO}_2 + \text{IP SO}_2}{2}$$

Dari hasil analisis data dengan menggunakan formula diatas maka di peroleh **Nilai IKU = 73,71 (Baik)**





## 2. Indeks Kualitas Air (IKA)

Untuk perhitungan indeks kualitas air, diperoleh dari hasil laporan Kualitas Air kabupaten Bone Tahun 2019. Dalam perhitungan yang dilakukan mengacu pada 10 parameter yaitu : DO, PH, TSS, COD, BOD, T-P, Amonia, Nitrat dalam  $\text{NO}_3^-$ , Fecal Coliform dan TDS

Perhitungan dilakukan dengan menggunakan Aplikasi dengan memasukkan hasil pengujian terhadap parameter tersebut diatas, sehingga diperoleh hasil **Indeks Kualitas Air (IKA) = 50 (Sangat Kurang)**

## 3. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)

Untuk perhitungan IKTL, Tutupan Hutan mengambil peranan penting. Untuk memperoleh hal ini perlu melakukan pengolahan data spasial dengan menggunakan GIS dan menghitung distribusi tutupan lahan yang ada di Kabupaten Bone terhadap : Hutan mangrove Sekunder, Hutan primer, Hutan produksi, Lahan terbuka, Semak belukar, Rawa, , Ruang terbuka hijau dan taman keanekaragaman hayati.

Formula untuk Perhitungan IKTL yaitu :

$$\text{IKTL} = 100 - (84,3 - (\text{TL} \times 100)) \times 50/54,3$$

TL : Tutupan Lahan.

$$\text{TL} = \frac{\text{TH} + (\text{L.SBKH} + \text{L. SBL} + \text{RTH} + \text{KR} + \text{TK})}{\text{Luas Wilayah Administrasi}} \times 0,6$$

Dari hasil perhitungan  $\text{TL} = 0,5378$ , sehingga dapat dihitung Indeks Kualitas Tutupan Lahan Sbb:

$$\begin{aligned} \text{IKTL} &= 100 - (84,3 - (0,5378 \times 100)) \times 50/54,3 \\ &= 100 - (84,3 - 49,526) \end{aligned}$$

$$\text{Nilai IKTL} = 65,226 \quad (\text{Status Kurang})$$



Sehingga berdasarkan Nilai IKA + Nilai IKU + Nilai IKTL, maka di peroleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Bone =  $(30 \% \times 50) + (30 \% \times 73,71) + (40 \% \times 65,226)$

$$\text{IKLH} = 63,20 \text{ (Kurang)}$$

**Kesimpulannya :**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Bone Tahun 2020 masuk kategori **KURANG**. Meskipun nilai ini meningkat dari tahun sebelumnya dimana nilai IKLH hanya 63,20 (Kurang). Sehingga sangat perlu diperhatikan indikator-indikator yang harus diperhatikan untuk memperbaiki Indeks kualitas Lingkungan Hidup yang lebih baik kedepan sesuai dengan yang tertuang dalam RPJMD Kab. Bone 2018-2023.

**U. DATA INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH) KABUPATEN BONE 3 TAHUN TERAKHIR**

Tabel-2.71 Data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bone 2018-2020

No	Uraian	Data IKLH Kab. Bone		
		2018	2019	2020
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	50,51	56,90	59,77
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	46,6	50,00	52,94
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	70,14	73,71	76,59
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	34,75	49,48	49,77
5	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone, 2021



**V. TARGET INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)  
KABUPATEN BONE 2021-2024**

Tabel-2.72 Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)  
Kabupaten Bone 2021-2024

No	Uraian	Tahun Target IKLH			
		2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	62,61	63,09	63,43	63,61
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,10	50,20	50,30	50,40
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,50	88,60	88,70	88,80
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	36,25	38,05	39,25	39,75
5	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	-	-	-	-

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bone, 2021



## **BAB III PERMASALAHAN, TARGET DAN INDIKATOR RPPLH KABUPATEN BONE**

### **A. Isu Strategis Pengelolaan Lingkungan**

Pembangunan nasional dewasa ini harus mengedepankan asas berkelanjutan sebagai isu utama, yakni mengutamakan aspek pengelolaan lingkungan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa kondisi lingkungan hidup Indonesia sudah mengalami degradasi, dilihat dari dua parameter yakni daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Kondisi ini terjadi akibat tingkat pemanfaatan sumberdaya alam yang lebih tinggi daripada daya dukung dan daya tampungnya. Pembangunan nasional selama ini memang lebih banyak bertumpu pada pemanfaatan sumberdaya alam baik sumberdaya hutan, sumberdaya pertambangan seperti migas maupun mineral, dan sebagainya. Kondisi ini menjadikan pembangunan nasional yang selama ini dilakukan cenderung belum sepenuhnya berorientasi pada pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem ekoregion dari tingkat Nasional sampai Kabupaten/Kota, sehingga perlu dianalisis isu strategis pengelolaan lingkungan secara hirarkis untuk memberikan gambaran keterkaitan lingkungan. Berikut disampaikan Isu Strategis Lingkungan Hidup tingkat Nasional, Ekoregion Provinsi dan Kabupaten.

### **B. Isu Strategis Nasional**

Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, 2 (dua) hal utama yang secara nasional dihadapi sebagai isu strategis yang berkaitan dengan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan hidup adalah :



### **1. Menurunnya kemampuan ekosistem untuk menjaga keseimbangan siklus air**

siklus hidrologi, terutama di Jawa dan Sumatera sudah sangat terganggu. Bencana alam yang semakin sering terjadi merupakan salah satu indikasi yang dapat dirujuk. Ekosistem tidak lagi mampu menampung dan menyalurkan air dengan semestinya. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus dapat menjamin pulihnya kemampuan ekosistem untuk menyerap, menahan, menyimpan dan mengatur distribusi air. Daerah-daerah yang menjadi resapan air harus dilindungi ekosistemnya, dipulihkan kerusakannya, dan ditingkatkan kualitas tutupan hutannya. Sedangkan daerah-daerah yang merupakan penyimpan air alami harus dipulihkan dan dibebaskan dari area terbangun.

### **2. Berkurangnya luasan lahan pangan kualitas tinggi di daerah - daerah lumbung pangan tradisional**

Berdasarkan perhitungan Bappenas, Indonesia diproyeksikan akan dihuni oleh ± 305,6 juta jiwa pada tahun 2035. Diperlukan produksi pangan yang besar untuk dapat mendukung jumlah penduduk tersebut, yang selama ini dipasok dari lahan-lahan sawah tradisional di Jawa, Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara. Perkembangan pembangunan yang pesat, terutama di Jawa dan Sumatera, menyebabkan banyak lahan-lahan pangan produktif berubah fungsi menjadi perumahan, kawasan industri, jalan tol, atau area terbangun lainnya. Untuk mendorong penyelesaian isu tersebut, pengelolaan lingkungan hidup ke depan harus mampu melindungi lahan-lahan pangan produktif, mencegah alih fungsi lahan pertanian, dan memperketat penggunaan lahan yang potensial untuk pangan menjadi daerah-daerah terbangun. Disamping itu, perlu dikembangkan sumber-sumber pangan baru yang mempunyai kemampuan adaptasi tinggi khususnya di pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.



### C. Karakteristik Ekoregion Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan masuk pada wilayah Ekoregion Sulawesi yang terdiri atas tujuh grup utama landform ekoregion: vulkanik, structural, fluvial, solusional, marine, denudasional dan organik. Landform terluas di wilayah ini adalah pegunungan lipatan dengan structural Sulawesi, meliputi areal hampir 2 juta ha, kemudian disusul oleh perbukitan lipatan struktural Sulawesi dan 954 ribu ha, dan dataran alluvial 913 ribu ha. Pada wilayah yang terakhir ini terdapatnya kawasan-kawasan berkembang utamanya perkotaan dan lahan pertanian subur, khususnya persawahan.

Tabel 3.1.  
Luas Jenis landform ekoregion di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Ekoregion		Luas (ha)	
1	Vulkanik (V)	Kerucut&Lereng Gunung Api	Pegunungan Vulkanik Kompleks Makassar	-
			Pegunungan Vulkanik Kompleks Manado	179.251,72
		Kaki Gunung Api	Perbukitan Vulkanik Kompleks Makassar	195.564,09
			Perbukitan Vulkanik Kompleks Manado	-
Dataran Gunung Api	Dataran Vulkanik Kompleks Manado	-		
2	Struktural (S)	Pegunungan Lipatan	Pegunungan Struktural Sulawesi	1.920.612,18
		Perbukitan Lipatan	Struktural Sulawesi	953.800,77
		Lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan (Intermountain Basin)	Dataran Struktural Sulawesi	-
3	Fluvial (F)	Dataran Aluvial	Dataran Fluvial Sulawesi	917.560,30
4	Solusional (K)	Perbukitan Solusional	Perbukitan Fluvial Sulawesi	319.060,57
5	Marin (M)	Pantai (Share)	Dataran Pantai Sulawesi	44.644,08
6	Denudasional (D)	Perbukitan Denudasional	Perbukitan Denudasional Sulawesi	-
7	Organik	Rataan Terumbu (Reef flat)	Dataran Organik/Koral Sulawesi	-

Sumber : Dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2017

### D. Isu Strategis Provinsi Sulawesi Selatan

Permasalahan utama lingkungan hidup selalu berkaitan dengan tiga komponen utama lingkungan hidup yakni tanah, air dan udara. Dari hasil analisis yang telah disusun dalam dokumen RPPLH Provinsi Sulawesi Selatan pada Tahun 2017, maka dihasilkan enam kelompok



komponen lingkungan yang perlu di bahas secara seksama, yakni : (i) lahan dan hutan; (ii)air;(iii)udara,(iv)pesisir dan lautan;(v)kebencanaan dan perubahan iklim, dan (vi) pangan. Berikut ini daftar panjuang isu strategis terkait dengan masing-masing komponen tersebut:

### **1. Isu Strategis terkait lahan dan hutan**

- Semakin meluasnya lahan kritis didalam maupun diluar kawasan hutan
- Menurunnya luasan lahan pertanian berkualitas
- Menurunnya tutupan vegetasi/tutupan hutan pada lahan di kawasan hutan
- Konflik potensil penggunaan lahan; hutan vs pertambangan, perkebunan dan lain sebagainya.

### **2. Isu Strategis terkait Air**

- Banjir di musim hujan dan kelangkaan air di musim kemarau (hampir semua Kabupaten)
- Meningkatnya laju sedimentasi di beberapa sungai besar, danau, waduk/bendungan (DAS Jeneberang, DAS Walanae-Cenranae, Danau Tempe, DAM Bili-Bili).
- Menurunnya kuantitas/debit badan air (sungai/air tanah)
- Menurunnya kualitas sumber air baku (pencemaran pestisida dan tingginya TSS dan TDS)
- Terjadinya eutrofikasi (*eutrophication*) akibat limbah domestic pada badan air (sungai dan danau)
- Pencemaran BBM, pelumas dan limbah B3 di perairan pantai, sungai dan danau
- Timbulnya beberapa kasus pencemaran logam berat di sungai dan pantai/laut (kasus kerrang jenepono, sungai Pangkajene, Selat Makassar).



### **3. Isu Strategis terkait udara dan perubahan iklim**

- Meningkatnya emisi gas buang dari kendaraan bermotor dan industry.
- Meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca CO, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O, HCFC, CFC serta uap air).

### **4. Isu Strategis terkait pesisir dan lautan**

- Kerusakan ekosistem terumbu karang di perairan pesisir Sulsel, terutama di perairan Spermonde dan teluk Bone, kerusakan mencapai 55%.
- Deforestasi mangrove di sepanjang pesisir Sulawesi Selatan (Sulsel), kerusakan mencapai 70%.
- Kerusakan ekosistem padang lamun di perairan pesisir (Sulsel).
- Laju pencemaran (TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal-Coli, Total coliform, logam berat serta plastic/mikroplastik) di Perairan Pesisir Sulawesi Selatan
- Kerusakan ekosistem benthic pada wilayah perairan pesisir
- Abrasi dan intrusi air laut pada kawasan pantai.

### **5. Isu Strategis terkait Kebencanaan dan Perubahan Iklim**

- Meningkatnya frekuensi kejadian banjir.
- Meningkatnya frekuensi kejadian tanah longsor
- Meningkatnya frekuensi kejadian kebakaran hutan dan lahan kering
- Perubahan iklim (mulai terasa di beberapa Kabupaten)
- Potensi terjadinya hujan asam (Sorowako-Malili dan Maros)

### **6. Isu Strategis terkait Pangan**

- Peningkatan produksi pangan rendah pada 5 tahun terakhir, melambat di bandingkan pertumbuhan penduduk.
- Meningkatnya konversi lahan pertanian ke non-pertanian.





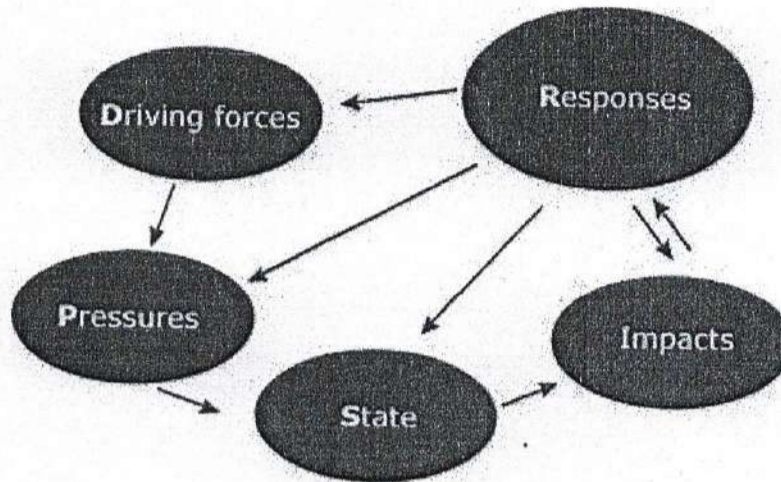
### **E. Isu Pokok Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan**

Berdasarkan daftar Panjang isu strategis lingkungan hidup Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana yang di jelaskan dalam dokumen RPPLH Sulawesi Selatan tahun 2017 dalam analisis DPSIR dan panel pakar, maka dirangkumkan beberapa isu strategis menjadi 4 isu dan ditetapkan sebagai isu pokok Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan 2017-2047. Empat isu pokok tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya fungsi hutan ekosistem penyedia dan pengatur keseimbangan siklus air untuk menghasilkan air yang cukup dan berkualitas
2. Berkurangnya luasan dan kualitas tutupan vegetasi/tutupan lahan
3. Melandainya peningkatan produksi pangan, dibanding laju pertumbuhan penduduk
4. Menurunnya kualitas ekosistem di wilayah pesisir dan laut.

### **F. Analisis DPSIR Lingkungan Hidup Kabupaten Bone**

Analisis DPSIR merupakan sebuah kerangka untuk mengorganisir informasi dan data tentang kondisi lingkungan. Analisis ini diterapkan guna menganalisis hubungan sebab - akibat dan/atau interaksi komponen lingkungan fisik - kimia, biologi, sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan yang kompleks. Oleh karena itu, analisis DPSIR dilakukan dalam rangka memberikan informasi yang jelas dan spesifik mengenai faktor pemicu (*Driving force*), tekanan terhadap lingkungan yang dihasilkan (*Pressure*), keadaan lingkungan (*State*), dampak yang dihasilkan dari perubahan lingkungan (*Impact*) dan kemungkinan adanya respon dari masyarakat (*Response*) yang terjadi di Kabupaten Bone (Gambar 3.1).



Gambar 3.1. Analisis DPSIR Lingkungan Hidup

### 1. Tata Guna Lahan

Salah satu faktor pemicu pengalihan fungsi lahan tidak lepas dari masalah Pertumbuhan Penduduk. Pertumbuhan penduduk yang terjadi secara terus-menerus terhadap luasan lahan yang tidak berubah menyebabkan timbulnya tekanan terhadap lingkungan hidup yang berdampak pada alih fungsi lahan. Lahan hutan dan pertanian berubah menjadi lahan terbangun akibat kebutuhan masyarakat bagi permukiman. Adanya pertumbuhan demografi menyebabkan kebutuhan-kebutuhan dasar termasuk tempat tinggal. Ketika lahan di daerah permukiman sudah tidak lagi mencukupi kebutuhan yang diminta, maka konversi lahan pertanian menjadi kawasan rumah menjadi pilihan sebagai salah satu solusi permasalahan tersebut. Lingkungan dapat dikatakan rusak apabila fungsi-fungsi dari lingkungan yaitu untuk mendukung kehidupan makhluk hidup sudah mengalami degradasi atau berkurang bahkan hilang. Adapun fungsi lingkungan hidup diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai habitat makhluk hidup.
- 2) Sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya makhluk hidup.



- 3) Sebagai pembantu penyedia Sumber Daya Alam (SDA) bagi kelangsungan kebutuhan manusia.
- 4) Memberi pengaruh terhadap pola pikir, tingkah laku dan sifat makhluk hidup.

Dengan perkembangan pembangunan di Kabupaten Bone terutama prasarana wilayah baik jalan maupun permukiman di kota Kabupaten Bone mengakibatkan tingginya permintaan bahan/material pembangunan. Salah satunya adalah kebutuhan tanah urug/galian C. Belum lagi kerusakan lahan pertanian akibat penambangan galian golongan C. Penambangan bahan galian C terutama pasir, tanah dan batu secara tidak terkendali mengakibatkan kerusakan lahan produktif disekitarnya. Dari sekian banyak pelaku usaha penambangan bahan galian C masih sedikit yang melengkapi usahanya dengan program perencanaan penambangan dan program reklamasi. Ditambah lagi lemahnya pengawasan terhadap usaha/kegiatan yang ada di Kabupaten Bone baik terhadap yang sudah memiliki izin lingkungan maupun yang belum memiliki izin, dimana masih banyak terdapat penambang liar alias PETI (Penambang Tanpa Izin). Masih luasnya kerusakan pada kawasan mangrove, disebabkan oleh konversi hutan mangrove menjadi areal tambak. Penebangan pohon mangrove untuk berbagai keperluan, konversi areal mangrove menjadi permukiman dan persawahan.

Banjir, Tanah Longsor dan perubahan iklim merupakan bencana setali ibarat dua sisi mata uang. Kedua bencana tersebut saling terkait. Rusaknya lahan hutan dan tingginya luas lahan terbangun menyebabkan semakin tingginya aliran permukaan (banjir) dan semakin rendahnya proses "recharge" air tanah. Dengan demikian diperlukan usaha terpadu untuk mengatasi bencana banjir dan tanah longsor.



## 2. Kualitas Air

Sungai mempunyai sifat dinamis dimana dapat berubah dalam dimensi ruang dan waktu maka dalam pemanfaatan potensinya, perubahan sifat dapat mengurangi nilai manfaat sungai dan membahayakan lingkungan sekitar. Bencana luapan banjir akibat penyempitan palung sungai karena adanya intervensi. Permukiman liar, pembuangan sampah atau limbah padat dan sedimentasi, pembawa polusi akibat pembuangan limbah kimia industri, pertanian, limbah domestik dan limbah organik. Nilai BOD tertinggi 37,24 yaitu di Sungai Walanae dan nilai BOD terendah 14,9 yaitu di Sungai Bengo dan Sungai Tekko. Dari 7 sungai yang dipantau semua nilai BOD melebihi baku mutu yang dipersyaratkan, baik untuk sungai kelas I, kelas II, Kelas III, maupun Kelas IV. Sedangkan Nilai COD untuk Sungai Cenrana 92,6 mg/L ini berarti melebihi baku mutu yang dipersyaratkan untuk kelas I,II dan III tetapi masih memenuhi syarat untuk Kelas IV. Sungai walanae di bengo dan Sungai Teko di Kecamatan Cina, nilai parameter COD 37,04, ini berarti melebihi baku mutu untuk sungai kelas I dan Kelas II. Tetapi masih memenuhi baku mutu untuk sungai Kelas III dan Kelas IV. Nilai COD untuk sungai di Lappariaja, Bendungan Palakka, sungai Palakka dan sungai di Lamuru hanya memenuhi baku mutu untuk kelas IV tetapi melebihi baku mutu untuk kelas I, Kelas II dan Kelas III. Parameter TSS hampir semua memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan kecuali Sungai Walanae yang nilai TSS nya 68 (mg/L) ini tidak memenuhi untuk kelas I dan Kelas II, tetapi masih memenuhi baku mutu untuk kelas III dan kelas IV. Dari hasil data yang diperoleh Indeks Kualitas Air Kabupaten Bone, IKA 46.6. Ini berarti kondisi kualitas air dalam status **“Waspada”**. Waduk merupakan salah satu contoh perairan air tawar buatan yang dibuat dengan cara membendung sungai tertentu dengan berbagai tujuan yaitu sebagai pencegah banjir, pembangkit tenaga listrik, pensuplai air bagi kebutuhan irigasi pertanian, untuk kegiatan perikanan baik perikanan



tangkap maupun budidaya karamba, dan bahkan untuk kegiatan pariwisata. Ada 2 (dua) Waduk besar di Kabupaten Bone yaitu: Waduk Ponre-Ponre dan Waduk Salomekko. Dimana difungsikan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), pengendali banjir, penyedia bahan baku air dan juga dijadikan wisata air. Selain itu berdasar data Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Bone, terdapat 130 danau/waduk/situ/embung yang difungsikan sebagai sumber air.

Kualitas Air Embung/Waduk menunjukkan bahwa Parameter BOD sangat tinggi, melampaui baku mutu dimana nilai BOD terendah yaitu 14,9 di Embung Taretta dan nilai BOD tertinggi di Embung Wolanggi. Begitu juga dengan Parameter COD, Nilai COD tertinggi 92,6 mg/L di Embung Wolangi dan nilai terendah 37,04 mg/L di Embung Taretta. Untuk parameter COD semua embung yang dipantau melebihi baku mutu. Tetapi untuk parameter TSS semua titik sampling embung memenuhi baku mutu.

Aktifitas masyarakat pesisir pantai sedikit banyaknya akan mempengaruhi kualitas air laut. Jika kualitas air laut kurang baik maka akan mengakibatkan menurunnya produktifitas sumber daya laut. Kabupaten Bone memiliki wilayah pesisir pantai yang berpenduduk dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai nelayan. Adanya tekanan yang untuk wilayah pesisir terhadap kualitas air laut sampai saat ini masih sangat besar. Sehingga perlu diwaspadai mengingat banyaknya aktivitas di sekitar wilayah pesisir. Tekanan yang terjadi dapat berpengaruh pada TSS air laut.

### **3. Kualitas Udara**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup guna pelestarian fungsi lingkungan hidup, dilaksanakan oleh



pemerintah, pemerintah daerah dan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangan, peran dan tanggungjawab masing-masing (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 13 ayat (1) dan (3). Khusus menyangkut pencemaran udara, maka dalam Pasal 20, ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2009 menetapkan bahwa penentuan terjadinya pencemaran udara diukur melalui baku mutu lingkungan hidup, meliputi : Baku mutu udara ambien, Baku mutu emisi, Baku mutu gangguan, dan Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya pengendalian pencemaran udara pada hakikatnya dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu :

- 1) Teknologi dan standar emisi
- 2) Kualitas bahan bakar
- 3) Pemeriksaan emisi dan perawatan (P&P)
- 4) Management transportasi berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara di Kabupaten Bone, kualitas udara ambien di Kabupaten Bone termasuk baik. Hasil pengujian kualitas udara ambien di 22 (dua puluh dua) titik lokasi yang mewakili daerah pemukiman, industri, perkantoran, sekolah, rumah sakit, pelayanan jasa/niaga dan padat lalu lintas menunjukkan parameter udara ambien (SO<sub>2</sub> dan NO<sub>2</sub>) masih memenuhi baku mutu. Hasil tersebut didapat berdasarkan pada parameter untuk perhitungan indeks kualitas udara. Pengukuran untuk parameter lainnya seperti CO, O<sub>3</sub>, Pb, NH<sub>3</sub>, TSP, juga masih memenuhi baku mutu. Indeks Kualitas Udara Kabupaten Bone, **IKU yaitu 70,14, dalam status "Cukup"**.

Kualitas udara di Kabupaten Bone dari hasil pemantauan masih memenuhi baku mutu. Salah satu faktor yang menambah beban pencemaran udara yaitu Semakin bertambah banyaknya jumlah kendaraan bermotor. ini akan meningkatkan resiko pencemaran



udara oleh gas buang kendaraan tersebut. Bahan pencemar yang terutama terdapat di dalam gas buang kendaraan bermotor adalah karbon monoksida (CO), berbagai senyawa hidrokarbon, berbagai oksida nitrogen (NO<sub>2</sub>) dan sulfur dioksida (SO<sub>2</sub>), dan partikulat debu termasuk timbal (Pb). Bertambahnya jumlah kendaraan ini secara langsung akan menambah tingkat pencemaran udara di Kabupaten Bone yang diakibatkan oleh emisi gas buang kendaraan-kendaraan tersebut. Jumlah kendaraan bermotor yang tentu sangat berpengaruh pada kepadatan lalu lintas. Kondisi seperti ini menyebabkan peningkatan emisi gas buang yang berpengaruh terhadap penambahan gas-gas pencemar penyebab penurunan kualitas udara ambien.

#### **4. Persampahan**

Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan asalnya sampah padat dapat digolongkan sebagai sampah organik dan sampah anorganik. Sehingga Sampah tidak bisa dipisahkan dari proses dan aktivitas masyarakat, dan kehadirannya sulit untuk dihindarkan. Selain itu, penggunaan produk oleh masyarakat akan menghasilkan residu. Pada banyak kasus, jenis-jenis bahan ini tidak bisa dipakai kembali dengan cara-cara lain dan mungkin juga tidak bisa untuk dijual. Bahan-bahan ini secara khusus didefinisikan sebagai sampah dan diberikan kepada pihak ketiga untuk pengolahan lebih lanjut.

Besarnya produksi sampah di Kabupaten Bone berbanding lurus dengan jumlah penduduk di masing-masing kecamatan, produksi sampah di Kabupaten Bone diperkirakan mencapai 310.210 Kg/hari. Produksi sampah terbanyak berasal dari Kecamatan Tanete Riattang dengan jumlah penduduk terbesar 52.335 jiwa, sedangkan produksi



sampah terkecil berasal dari Kecamatan Tonra dengan jumlah penduduk sebesar 15.064 jiwa.

Jumlah produksi sampah di Kabupaten Bone dalam satu tahun mencapai 113 ribu ton. Dari jumlah produksi sampah tersebut tidak semua bisa ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bone. Penanganan sampah di Kabupaten Bone bertumpu hanya pada kawasan perkotaan khususnya 3 kecamatan kota yaitu : Kecamatan Tanete Riattang, Tanette Riattang Barat dan Kecamatan Tanete Riattang Timur. Pada kawasan-kawasan perdesaan, penanganan sampah dilakukan secara konvensional yaitu melalui sistem gali urug terkendali. Hal ini disebabkan karena masih tersedianya lahan untuk pembuangan sampah dengan model galian.

Limbah Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Untuk perusahaan yang berpotensi menghasilkan limbah B3, harus mengajukan izin tempat penyimpanan sementara limbah B3 dan melaporkan neraca limbah serta manifest yang dihasilkan kepada Dinas Lingkungan Hidup.

Pada tahun 2017, ada sebanyak 14 usaha/kegiatan yang mendapatkan izin mengolah limbah B3. Keempat belas usaha/kegiatan atau perusahaan tersebut adalah PT. PLN, Perusahaan Pabrik Gula Bone, Rumah Sakit dan beberapa puskesmas. Pemerintah Kabupaten Bone juga melakukan pengawasan lingkungan pada industry dan/atau kegiatan usaha terhadap pengelolaan IPAL serta ijin lingkungan.





## 5. Risiko Bencana

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bone adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan bencana di Kabupaten Bone meliputi: kawasan rawan banjir; kawasan rawan angin puting beliung; dan kawasan rawan tanah longsor.

- 1) Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng. Kawasan ini ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Dua Boccoe, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Awangpone, sebagian wilayah Kecamatan Palakka, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang, sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang Timur, sebagian wilayah Kecamatan Sibulue, sebagian wilayah Kecamatan Cina, sebagian wilayah Kecamatan Mare, sebagian wilayah Kecamatan Tonra, sebagian wilayah Kecamatan Patimpeng, sebagian wilayah Kecamatan Libureng, sebagian wilayah Kecamatan Salomekko, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, dan sebagian wilayah Kecamatan Lappariaja.
- 2) Kawasan rawan angin puting beliung terdapat di Kecamatan Amali, Sibulue, dan Libureng.
- 3) Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan yang potensial terjadinya perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak



ke bawah atau keluar lereng. Kawasan ini ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Tellulimpoe, sebagian wilayah Kecamatan Bontocani, sebagian wilayah Kecamatan Kajuara, dan sebagian wilayah Kecamatan Ponre.

Penyebab utama banjir berasal dari curah hujan yang tinggi. Jika hujan besar turun terus menerus, air tidak akan langsung masuk ke saluran pembuangan air, melainkan air yang turun akan menjadi genangan. Genangan air tersebut lama kelamaan akan semakin tinggi dan mengakibatkan banjir yang akan merusak aspal dan jalanan yang terkikis oleh air. Kondisi itu tergantung dengan penampungan dan drainase di lokasi tersebut, jika drainase dan penampungan air tidak tidak lancar berarti penampungan tersebut tidak dirawat secara teratur sehingga membuat air hujan tersumbat tidak lancar dan akan menjadi penumpukan dan genangan besar yang jadi penyebab banjir.

Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bone adalah tanah longsor. Terutama di daerah Kec. Tellu Limpoe, yang mengalami longsor hampir setiap tahun. Gejala umum tanah longsor ditandai dengan munculnya retakan-retakan dilereng yang sejajar dengan arah tebing, biasanya terjadi setelah hujan.

Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadinya tanah longsor adalah terjadinya kerusakan lahan, hilangnya vegetasi penutup lahan, terganggunya keseimbangan ekosistem dan lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. Terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun dan lahan produktif lainnya. Kabupaten Bone memiliki beberapa wilayah yang beresiko terhadap bencana seperti yang ditunjukkan pada peta persebaran rawan bencana. Peta tersebut menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana alam geologi disuatu wilayah, sebagai masukan kepada masyarakat dan atau pemerintah/kota dan provinsi sebagai data dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari



bencana. Penyebab kedua adalah akibat penggundulan hutan di kawasan konservasi. Salah satu contoh adalah longsor yang terjadi di Kec. Tellu Limpoe. Bencana tanah longsor ini terjadi akibat faktor kesalahan manusia dalam memanfaatkan lahan hutan konservasi. Hutan yang seharusnya menjadi area resapan air, digunduli untuk dijadikan lahan pertanian oleh penduduk sekitar tanpa memperhatikan aspek kesetimbangan lingkungan.

#### **6. Tata Kelola Lingkungan**

Dalam hal pengelolaan lingkungan, Kabupaten Bone belum mempunyai data yang terinci tentang jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, perdagangan satwa dan tumbuhan, serta jumlah dan luas izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam.

Sedangkan dokumen lain yang terkait dengan tata kelola lingkungan di Kabupaten Bone yaitu tentang izin lingkungan dalam mengelola limbah B3, AMDAL, dan sebagainya.



Tabel. 3.2 Hasil Kajian DPSIR Framework dalam Penyusunan RPPLH Kabupaten Bone

KONDISI LINGKUNGAN	PENDORONG	TEKANAN	DAMPAK	TANGGAPAN
Tata Guna Lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan penduduk yang terjadi secara terus-menerus terhadap luasan lahan yang tidak berubah</li> <li>• pergeseran pola pikir masyarakat untuk memaksimalkan produktivitas lahan yang dimilikinya</li> </ul>	<p>Perubahan fungsi lahan yang semula berupa lahan pertanian, tegalan atau perkebunan menjadi lahan permukiman, pertambangan, maupun industri</p>	<p>Semakin tingginya lahan kritis, menurunnya lahan sawah, perkebunan dan hutan, serta indikasi rusaknya ekosistem sungai</p>	<p>Meningkatkan pengawasan lingkungan di wilayah tambang, meningkatkan hasil indeks tutupan lahan dan meningkatkan pengawasan hutan lindung</p>
Kualitas Air	<p>Bencana luapan banjir, Permukiman liar, pembuangan sampah atau limbah padat dan sedimentasi, polusi akibat pembuangan limbah kimia industri, pertanian, limbah domestik dan limbah organik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Banyaknya senyawa organik yang harus diuraikan oleh mikroorganisme</li> <li>• Keberadaan zat organik di dalam air yang dapat mengubah oksigen menjadi karbondioksida</li> <li>• Laju aliran yang sangat deras</li> <li>• Longsoran</li> <li>• Mampusuknya tumbuhan dan hewan</li> </ul>	<p>Semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit dan semakin beragamnya jenis penyakit yang diderita penduduk Kabupaten Bone</p>	<p>Pemantauan Kualitas Lingkungan melalui pemantauan dan pengujian kualitas air badan air, pemantauan kualitas limbah cair kegiatan usaha dan limbah domestik</p>



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

KONDISI LINGKUNGAN	PENDORONG	TEKANAN	DAMPAK	TANGGAPAN
Kualitas Udara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pertambahan Penduduk</li> <li>Jumlah kendaraan bermotor</li> <li>Pertumbuhan kendaraan di dominasi pribadi</li> <li>kenaikan kendaraan umum relative kecil</li> <li>Pertumbuhan kegiatan industri</li> </ul>	Peningkatan emisi gas buang yang berpengaruh terhadap penambahan gas pencemar penyebab penurunan kualitas udara ambien	Semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit dan semakin beragamnya jenis penyakit yang diderita penduduk Kabupaten Bone	Membuat kebijakan peningkatan kualitas udara melalui kegiatan penghijauan dan pengawasan terhadap pencemaran udara sumber emisi bergerak maupun tidak bergerak
Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>pertumbuhan penduduk</li> <li>perkembangan ekonomi dan industri</li> <li>perubahan gaya hidup masyarakat</li> </ul>	Sampah diproduksi setiap harinya tidak bisa terolah semuanya atau hanya sekitar 30 %. Sisa sampah yang belum terolah ini memerlukan penanganan supaya tidak mencemari lingkungan di sekitarnya	Meningkatnya jumlah penderita penyakit, serta meningkatnya jenis penyakit yang disebabkan karena lingkungan yang tidak sehat dan tidak bersih. Selain itu, dapat mengakibatkan munculnya bencana banjir di kawasan permukiman dan menimbulkan kerugian materiil maupun non materiil, serta aktivitas masyarakat menjadi terganggu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>penyediaan sarana dan prasarana persampahan</li> <li>sosialisasi dan edukasi untuk memperkokoh kesadaran dan perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup termasuk dalam pengelolaan sampah</li> <li>Peningkatan Peran serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah, dan pendampingan pada masyarakat tentang pengelolaan sampah 3R</li> <li>membentuk bank-bank sampah</li> </ul>



KONDISI LINGKUNGAN	PENDORONG	TEKANAN	DAMPAK	TANGGAPAN
<p>Risiko Bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• curah hujan yang tinggi terhadap hutan/kebun dan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan</li> <li>• pertumbuhan penduduk yang menyebabkan timbulnya perubahan perilaku manusia yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hidup</li> </ul>	<p>Terjadinya kerusakan lahan, hilangnya vegetasi penutup terganggunya keseimbangan ekosistem dan lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan dan sebagainya</li> <li>2. Kerusakan bangunan-bangunan seperti perumahan penduduk, sarana peribadatan dan bangunan lainnya</li> <li>3. Menghambat proses aktivitas manusia, serta merugikan masyarakat yang terdapat disekitar bencana</li> <li>4. menyebabkan adanya korban jiwa</li> <li>5. Terjadinya kerusakan lahan, hilangnya vegetasi penutup lahan, terganggunya keseimbangan ekosistem dan lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Membangun infrastruktur yang berkualitas, andal berkelanjutan dan Tangguh untuk menunjang pengendalian bencana</li> <li>• Meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana</li> <li>• Meningkatkan pemulihan Daerah Aliran Sungai</li> </ul>
<p>Tata Kelola Lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu</li> <li>• jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan hasil hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terjadi Ketidakpastian kebijakan Lingkungan</li> <li>• Komitmen Manajemen dan Sistem Tata Kelola Lingkungan</li> </ul>	<p>berkembangnya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan PDB di Kabupaten Bone</p>	<p>Membuat produk hukum yang berkaitan dengan tata kelola lingkungan</p>



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

KONDISI LINGKUNGAN	PENDORONG	TEKANAN	DAMPAK	TANGGAPAN
	<p>bukan kayu</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• perdagangan satwa dan tumbuhan</li><li>• jumlah dan luas ijin usaha pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transparansi tata Kelola lingkungan</li></ul>		

Sumber : Hasil Analisis Tim dan Dokumen IKPLHD Kab. Bone Th. 2018



## **G. Isu Strategis Ekoregion Kabupaten Bone**

### **1. Sampah**

Jumlah sampah di Kabupaten Bone yang semakin meningkat, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan kualitas pengelolaan yang efektif. Permasalahan sampah di Kabupaten Bone disebabkan oleh semakin meningkatnya jumlah penduduk yang berimplikasi pada peningkatan volume sampah. Selain itu rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah dan mengelola sampah menyebabkan lingkungan di sekitarnya tercemar. Metode dalam mengelola sampah *Reduce, Reuse, dan Recycle* belum maksimal di Kabupaten Bone. Program pengelolaan sampah yang mungkin bisa dilakukan untuk permasalahan sampah di Kabupaten Bone meliputi: 1). pengelolaan sampah mandiri sarana pelayanan umum (sekolah, perkantoran, fasilitas kesehatan, perdagangan) dan industri, 2). pengelolaan sampah mandiri dan perwujudan Bank Sampah di tiap desa/kelurahan berbasis TPS 3R, dan 3). penyiapan lahan untuk TPA Baru atau pengembangan TPA yang ada saat ini di Passippo Kecamatan Palakka dengan Teknologi *Sanitary Landfill*.

### **2. Pencemaran Air dan Penurunan Kuantitas Air**

Pencemaran dan penurunan kualitas air sungai di Kabupaten Bone yang dipicu oleh sisa pestisida dari lahan pertanian yang terbawa ke sungai, sehingga mengganggu kualitas air yang ada di Kabupaten Bone. Aktivitas pertanian yang menggunakan pestisida berlebihan yang terdapat di sebagian besar wilayah Kabupaten Bone apabila tercuci oleh air hujan dapat mengakibatkan pencemaran pada tanah dan air sungai. Pencemaran air permukaan di Kabupaten Bone akan mempunyai tekanan terhadap komponen lingkungan air tanah dangkal dan komponen lingkungan tanah karena badan penerima buangan limbah cair tersebut langsung ke badan tanah. Air tanah (*ground water*) akan mengalami pencemaran yang berasal dari penanaman limbah cair





atau padat tanpa dilakukan pengolahan, serta pencemaran yang berasal dari limbah domestik (*septic tank*).

### 3. Banjir

Secara umum bencana banjir berada hampir disetiap wilayah, namun wilayah yang selalu terjadi bencana banjir secara khusus sering terjadi pada wilayah sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Walanae. DAS Walanae terdiri dari 7 (tujuh) Sub DAS, yaitu; Batu, Puteh, Malanroe, Mario, Minraleng, Sanrego, dan Walanae. Dari ketujuh Sub DAS tersebut Sebagian besar memiliki bentuk DAS memanjang, hanya Sub DAS Malanroe dan Walanae Hilir yang memiliki bentuk radial. Sedangkan untuk pola aliran didominasi pola dendritik medium (sedang) dengan kerapatan aliran terendah 72 m/ha (walanae hilir) dan tertinggi 318,74 m/ha (walanae tengah) Dengan debit sungai rata-rata di hulu 243,50 m<sup>3</sup> /detik dan hilir 91,87 m<sup>3</sup> /detik. Salah satu penyebab terjadinya banjir di Kabupaten Bone adalah meningkatnya lahan terbangun terutama wilayah-wilayah resapan dan alihfungsi lahan yang juga memiliki fungsi resapan. Penataan di daerah rawan banjir, dilakukan dengan melakukan pengendalian tata ruang pada daerah rawan banjir. Upaya tersebut ditekankan pada upaya penataan pengelolaan sumber daya lahan dan air, sehingga dapat mengurangi beban pertumbuhan pada daerah rawan banjir.

### 4. Pencemaran Udara

Pencemaran udara di Kabupaten Bone secara umum dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor, Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Bone, maka kebutuhan akan alat transportasi pun akan semakin meningkat. Dengan semakin banyaknya alat transportasi akan meningkatkan paparan jumlah gas buang yang akan berdampak pada pencemaran udara oleh emisi



sumber bergerak yang berasal dari penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.

Transportasi dibutuhkan untuk perpindahan orang dan barang. Setiap tahunnya terjadi peningkatan penggunaan kendaraan bermotor, ditandai dengan jumlah penjualan kendaraan bermotor. Selain jumlah kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Bone, terdapat juga kendaraan dari luar Kabupaten Bone yang masuk yang jumlahnya tidak dapat di tentukan pasti. Pertumbuhan kendaraan di dominasi kendaraan pribadi, sebaliknya kenaikan kendaraan umum relative kecil dan bahkan cenderung stagnan.

#### **5. Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Setiap kota harus punya komitmen untuk mewujudkan 30 % wilayahnya sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan perkotaan di Kabupaten Bone kondisi Ruang Terbuka Hijau (RTH) saat ini masih kurang dari 20 %. Semakin berkurangnya pepohonan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan Kabupaten Bone disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya baik untuk kawasan permukiman maupun kawasan komersial.

#### **6. Limbah Domestik**

Limbah di Kabupaten Bone umumnya terdiri dari limbah domestik rumah tangga, limbah industri, limbah jasa pariwisata, limbah rumah sakit, dan limbah B3. Hampir seluruh Kecamatan di Kabupaten Bone memiliki potensi permasalahan limbah rumahtangga. Permasalahan tersebut timbul akibat minimnya fasilitas pengolahan limbah dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengolah dan membuang limbah rumahtangga. Permasalahan limbah industri terdapat di Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kecamatan Cina, Kecamatan Libureng dan Kecamatan Cenrana akibat penggunaan bahan berbahaya beracun (B3) limbah



sehingga mencemari lingkungan. Limbah B3 di Kabupaten Bone umumnya dihasilkan dari aktivitas industri, aktivitas jasa pariwisata dan limbah infeksius dari aktivitas rumah sakit atau sarana kesehatan yang ada.

#### **7. Permukiman Kumuh**

Banyak permasalahan perkotaan yang berakar pada kawasan permukiman, seperti tidak meratanya penyediaan infrastruktur permukiman perkotaan, ketidaktersediaan lingkungan permukiman yang layak, dan sebagainya yang pada akhirnya berimplikasi pada terciptanya permukiman kumuh di kawasan perkotaan. Permasalahan yang ditimbulkan dari munculnya kawasan permukiman kumuh seperti lingkungan yang tidak sehat, pemanfaatan lahan pantai, dan lain sebagainya tidak hanya berpengaruh terhadap internal kawasan itu sendiri namun juga terhadap kawasan sekitarnya dan sistem jaringan infrastruktur perkotaan secara umum.

Berdasarkan SK. Bupati Kabupaten Bone Nomor 481 Tahun 2020 terdiri atas 8 lokasi kumuh yaitu di Kawasan Biru, Manurunge-Masumpu, Watampone, Pappolo, Bajoe, Panyula, Macege dan Macanang dimana delapan lokasi ini terletak di Kecamatan Tanete Riattang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan luas total sebesar 254,55 Ha.

#### **8. Perubahan Iklim**

Perubahan iklim yang berdampak besar terhadap meningkatnya risiko bencana alam dan kehidupan penduduk di sempadan sungai (bencana alam berupa banjir dan longsor akibat perubahan iklim) Kabupaten Bone. Bencana banjir disamping dapat terjadi secara alamiah juga dapat terjadi akibat aktivitas manusia. Banjir di Kabupaten Bone umumnya



disebabkan oleh alih fungsi lahan hutan dan Sistem drainase perkotaan yang kurang baik.

#### **9. Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Seiring dengan meningkatnya investasi maka akan meningkatkan kebutuhan akan sumberdaya manusia, efek lainnya juga akan menyerap tenaga kerja yang berasal dari luar Kabupaten Bone. Dua faktor ini yang akan berpengaruh terhadap masalah alih fungsi lahan di Kabupaten Bone.

Adapun isu strategis lingkungan menurut Kecamatan di Kabupaten Bone pada tabel di bawah ini :



Tabel 3.3. Isu Strategis Lingkungan Menurut Kecamatan di Kabupaten Bone

No.	Kecamatan	Isu																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
1	Ajangale	■																			
2	Amali	■																			
3	Awangpone	■																			
4	Barebbo	■																			
5	Bengo	■																			
6	Bontocani	■																			
7	Cenrana	■																			
8	Cina	■																			
9	Dua Boccoe	■																			
10	Kahu	■																			
11	Kajuara	■																			
12	Lamuru	■																			
13	Lappa Rijaja	■																			
14	Libureng	■																			
15	Mare	■																			
16	Palakka	■																			
17	Patimpeng	■																			
18	Ponre	■																			
19	Salomekko	■																			
20	Sibulue	■																			



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kecamatan	Isu																		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10									
21	Tanete Riattang																			
22	Tanete Riattang Barat																			
23	Tanete Riattang Timur																			
24	Tellu Limpoe																			
25	Tellu Siattinge																			
26	Tonra																			
27	Ulaweng																			

Sumber: Hasil Survei dan Olah Data GIS, 2021

Keterangan:

1. Sampah
2. Pencemaran Air
3. Kelangkaan Air
4. Banjir/Genangan
5. Penurunan Kualitas Udara
6. Kurangnya RTH

7. Limbah Domestik
8. Permukiman Kumuh
9. Perubahan Iklim
10. Alih Fungsi Lahan Pertanian



#### **H. Indikator Keberhasilan**

Target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bone mengacu pada profil kualitas lingkungan yaitu menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Tujuan pembangunan Berkelanjutan (TPB) sebagai indikator capaian dari keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bone. Target peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencakup keseluruhan sektor pembangunan yang tercermin pada meningkatnya kualitas air, udara, dan tata guna lahan. Target IKLH dibuat dalam bentuk angka untuk memudahkan interpretasi dari pemangku kepentingan dalam memahami kualitas lingkungan hidup daerahnya. Sementara itu untuk TPB mempunyai 17 tujuan dan masing-masing tujuan mempunyai indikator dan target. Kegiatan analisis dilakukan pada dokumen TPB untuk merumuskan beberapa indikator yang relevan terkait dengan lingkungan hidup yang dapat menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bone diantaranya yaitu:

1. Kualitas udara
2. Kualitas air
3. Tutupan Lahan
4. Emisi CO<sub>2</sub> atau gas rumah kaca
5. Persampahan
6. Daur ulang
7. Luas kawasan konservasi
8. Ruang terbuka hijau
9. Lahan kritis
10. Limbah tinja
11. Limbah B3
12. Korban bencana.



### **I. Target RPPLH Kabupaten Bone**

Capaian kondisi lingkungan hidup Kabupaten Bone yang ideal diperlukan perumusan dan penetapan target pencapaian dengan mengacu kepada indikator keberhasilan. Target ditetapkan dalam skala panjang (30 tahun). Penetapan jangka panjang akan diuraikan dengan pendekatan kuantitatif berupa target capaian. Target capaian memiliki fungsi sebagai arah fokus pencapaian semua kebijakan, rencana, dan program kegiatan dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.





Tabel 3.4. Target Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone 30 Tahun

No.	Kriteria	Kualitatif	Kuantitatif						
			Baseline	2026	2031	2036	2041	2046	2051
1	Indeks Kualitas Air	a. Peningkatan Indeks Kualitas Air b. Peningkatan pengendalian pencemaran kerusakkan lingkungan c. Penurunan beban cemaran berupa total coliform untuk air sungai d. Peningkatan pengelolaan DAS untuk meningkatkan debit air e. Peningkatan pembangunan sarana-prasarana sanitasi	50,10	54	58	62	66	70	75
2	Indeks Kualitas Udara	a. Peningkatan Indeks Kualitas Udara b. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) c. Penurunan beban	88,50	88,80	89,10	89,4	89,7	90	90,30



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kriteria	Kualitatif	Kuantitatif							
			Baseline	Target (Tahun)						
				2026	2031	2036	2041	2046	2051	
		cemaran SO <sub>2</sub> dan NO <sub>2</sub> d. Peningkatan pengendalian pencemaran kualitas udara terutama sektor industri dan transportasi								
3	Indeks Tutupan Lahan	Mempertahankan luas tutupan lahan	36,25	38,55	40,85	43,15	45,45	47,50	50	
4	Emisi CO <sub>2</sub> /Gas Rumah Kaca (Gg CO <sub>2</sub> e)	a. Penurunan emisi CO <sub>2</sub> / Gas Rumah Kaca b. Peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) c. Peningkatan inventarisasi sumber penghasil Gas Rumah Kaca								
5	Persampahan	a. Peningkatan kualitas pengelolaan sampah perkotaan yang tertangani b. Peningkatan jumlah		20.000	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000	70%



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kriteria	Kualitatif	Kuantitatif						
			Baseline	2026	2031	2036	2041	2046	2051
6	Daur Ulang	sarana prasarana pengelolaan sampah a. Peningkatan jumlah timbulan sampah yang didaur ulang b. Peningkatan fasilitas pengelolaan sampah untuk daur ulang c. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan daur ulang		25%	26%	27%	28%	29%	30%
7	Luas Kawasan Konservasi (persentase kesesuaian pemanfaatan ruang)	Peningkatan dalam perlindungan dan pelestarian kawasan konservasi		20%	22%	24%	26%	28%	30%
8	Ruang terbuka Hijau	Meningkatkan luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		20%	22%	24%	26%	28%	30%
9	Lahan Kritis (lahan yang direhabilitasi)	a. Pengurangan luas lahan kritis b. Penambahan luasan lahan kritis yang direhabilitasi		75%	80%	85%	90%	95%	100%



No.	Kriteria	Kualitatif	Kuantitatif						
			Baseline	2026	2031	2036	2041	2046	2051
10	Limbah Tinja	a. Peningkatan pembangunan sarana prasarana Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) b. Peningkatan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja		65%	70%	75%	80%	85%	90%
11	Limbah B3	Peningkatan proporsi limbah B3 yang sudah dikelola sesuai aturan yang berlaku		75%	80%	85%	90%	95%	100%
12	Korban Bencana (penurunan risiko bencana)	a. Peningkatan Indeks Ketahanan Daerah dalam penanggulangan bencana b. Penurunan risiko bencana c. Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana		20%	22%	24%	26%	28%	30%



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

No.	Kriteria	Kualitatif	Kuantitatif							
			Baseline	2026	2031	2036	2041	2046	2051	
		d. Pembentukan desa tangguh bencana e. Peningkatan upaya pengurangan risiko bencana f. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia								

Sumber : Hasil Analisis Tim, 2021



## **BAB IV KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE**

### **A. Strategi Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Strategi dan kebijakan yang diuraikan di dalam bab ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan Kabupaten Bone. Prioritas pembangunan yang ingin dicapai yaitu menjadikan Kabupaten Bone sebagai daerah agribisnis berbasis budaya dan pusat pelayanan jasa yang berwawasan lingkungan. Pelestarian sumberdaya alam dan kondisi lingkungan hidup menjadi acuan bagi kegiatan berbagai sektor pembangunan agar tercipta keseimbangan dan kelestarian fungsi sumberdaya alam, lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin.

Meningkatnya intensitas kegiatan penduduk Kabupaten Bone sebagai salah satu wilayah yang cukup berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan terutama kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa maupun aktivitas lainnya yang berpotensi menyebabkan penurunan kualitas lingkungan perlu dikendalikan dan diatur oleh pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat sekitar dan pelaku usaha. Kebijakan pembangunan perlu diarahkan untuk mendayagunakan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat namun harus tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal serta penataan ruang. Untuk mencapai tujuan



tersebut dapat dirumuskan strategi umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

**1. Strategi Pemanfaatan Dan/Atau Pencadangan Sumberdaya Lahan dan Air**

Strategi ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumberdaya khususnya sumberdaya lahan dan air di Kabupaten Bone. Dengan strategi ini pemanfaatan sumberdaya lahan dan air dapat mampu mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat secara efisien dan berkelanjutan, sehingga diperlukan pencadangan kapasitas sumberdaya sesuai dengan daya dukung lingkungan dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Indikator yang diacu adalah seperti yang tergambarakan dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

**2. Strategi Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup**

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Selain itu dilakukan pula pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam berlebihan, perkembangan penduduk dan permukiman. Strategi ini juga merupakan langkah taktis untuk tercapainya kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sesuai dengan baku mutu lingkungan yang ditetapkan. Indikator yang diacu adalah seperti yang tergambarakan dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

**3. Strategi Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Alam**

Strategi ini bertujuan untuk melindungi sumberdaya alam dari kerusakan serta mengelola kawasan konservasi. Hal ini dilakukan untuk menjamin kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan dapat terjaga dengan baik. Selain itu juga dilakukan sistem pemantauan, rehabilitasi alam yang telah rusak serta mempercepat



pemulihan cadangan sumberdaya alam sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

#### **4. Strategi Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim**

Strategi adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim adalah terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (*resiliensi*) tinggi terhadap dampak perubahan iklim. Strategi ini mengkoordinasi kegiatan adaptasi dengan semua pemangku kepentingan yang terlibat, baik pemerintah, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan swasta serta lainnya. Tujuan adaptasi perubahan iklim yaitu membangun ketahanan ekonomi; ketahanan tatanan kehidupan baik secara fisik, ekonomi dan sosial; dan menjaga ketahanan ekosistem untuk mendukung sistem kehidupan masyarakat yang tahan terhadap dampak perubahan iklim.

Strategi umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bone merupakan arahan strategis yang bersifat umum dan menyeluruh. Fungsinya adalah sebagai acuan penyusunan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara sektoral dan/atau oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi dan status lingkungan hidup. Keempat strategi umum tersebut saling terkait satu sama lain dengan tujuan akhirnya ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan dalam kualitas lingkungan hidup yang semakin baik dan sehat. Rincian keempat strategi tersebut diturunkan dalam bentuk perencanaan berdasarkan isu strategis Kabupaten Bone yang akan dijelaskan secara lebih rinci pada sub bab berikutnya.

#### **B. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Empat strategi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tersebut pada strategi umum di atas selanjutnya





dirumuskan lebih detil dalam bentuk Rencana perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone selama 30 tahun. Dokumen ini diskenariokan sebagai penjabaran dari tindakan menyeluruh terkoordinasi oleh seluruh elemen negara, baik pemerintah, swasta maupun masyarakat sebagai respon terhadap kondisi lingkungan hidup pada tingkat Nasional, Regional, dan kota yang diperkirakan akan dihadapi Kabupaten Bone akibat proses pembangunan. Dalam beberapa tahun ke depan, penggunaan sumberdaya alam sebagai modal pembangunan masih akan terjadi.

Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone didasarkan pada isu-isu strategis terkait lingkungan serta memuat sasaran yang akan dicapai dan arah kebijakan dan strategi yang diselaraskan dengan strategi di tingkat Nasional dan Regional. Pokok kebijakan tersebut khususnya mencakup strategi untuk menahan laju penurunan daya dukung dan daya tampung, memperbaiki kualitas jasa lingkungan, pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam segala aspek pembangunan, meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim, serta mendorong efisiensi konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya alam khususnya lahan dan air. Pola dan penekanan yang tepat diharapkan mampu mendorong tercapainya keseimbangan baru dan konsumsi jasa dan sumberdaya dengan daya dukung lingkungannya. Pencapaian kondisi ideal tersebut dapat dilakukan dengan menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.



### **C. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Lahan dan Air**

#### **1. Permasalahan dan Isu Strategis**

Permasalahan dan isu strategis terkait sumberdaya lahan dan air di Kabupaten Bone ialah sebagai berikut:

##### **a. Alih Fungsi Lahan Pertanian**

Lahan pertanian identik sebagai lahan penyedia pangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lahan pertanian sebagai penyedia pangan di Kabupaten Bone sangat dominan pada kategori sedang dan tinggi. Artinya, kemampuan wilayah Kabupaten Bone untuk menghasilkan bahan pangan bagi penduduknya dan wilayah di sekitarnya. Alih fungsi lahan pertanian dan pemanfaatan sumberdaya lahan di wilayah Kabupaten Bone sebagian besar diperuntukkan bagi pengembangan kawasan terbangun untuk kegiatan perkotaan seperti permukiman; perdagangan dan jasa; serta industri. Berdasarkan statusnya sebagai cadangan sumber daya alam, meskipun kondisi saat ini sumber daya lahan di Kabupaten Bone masih memenuhi. Oleh sebab itu arahan pemanfaatan sumberdaya alam ini akan difokuskan pada arahan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang sudah terbatas dengan sebijaksana dan seoptimal mungkin sehingga kualitasnya tetap lestari serta mampu mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

##### **b. Kelangkaan Air /Kekeringan**

Kondisi air di Kabupaten Bone telah mengalami defisit air bersih akibat pemakaian dan tingkat kebutuhan akan air yang meningkat. Sedangkan siklus air untuk mengisi kembali air tanah tidak seimbang. Faktor penyebabnya ialah pemenuhan kebutuhan air masyarakat Kabupaten Bone yang masih mengandalkan air tanah. Hal ini diperparah lagi dengan semakin berkembangnya kegiatan perdagangan dan jasa di wilayah Kabupaten Bone. Adapun kecamatan yang mulai mengalami krisis air



diantaranya adalah Kecamatan Tanete Riattang, Tanete Riattang Barat dan Kecamatan Tanete Riattang Timur.

## **2. Sasaran**

Secara umum sasaran yang ingin dicapai untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan upaya penyusunan rencana pemanfaatan dan pencadangan sumberdaya lahan dan air adalah:

- 1) Menurunnya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian;
- 2) Pemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari.

## **3. Arah Kebijakan dan Strategi**

### **a. Arah kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 1: Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.**

- 1) Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi (jasa ekosistem penyedia pangan kategori tinggi);
- 2) Meningkatkan kualitas SDM petani Kabupaten Bone serta meningkatkan kesejahteraan petani.

### **b. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 3: Pemanfaatan sumberdaya air secara optimal dan lestari**

- 1) Melindungi dan memulihkan fungsi-fungsi kawasan dengan jasa lingkungan pengatur dan penyimpanan air tinggi;
- 2) Meminimalkan/menekan peningkatan berbagai kebutuhan sumberdaya air;
- 3) Perluasan jaringan PDAM sebagai sumber air bersih/minum.

## **D. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup**

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bone merupakan arahan dalam pelaksanaan RPPLH. Maksud dari arahan pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup ini adalah:



- 1) Mencegah dan mengendalikan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup;
- 2) Menjaga dan meningkatkan kinerja layanan ekosistem; dan
- 3) Memastikan keberlangsungan proses, produktivitas dan fungsi lingkungan hidup.

Rencana pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bone akan dijabarkan melalui tiga tahapan yaitu (1) Permasalahan dan isu Strategis; (2) Sasaran; dan (3) Arah Kebijakan dan Strategi.

### **1. Permasalahan dan Isu Strategis**

#### **a. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Perubahan penggunaan lahan dan perkembangan pembangunan Kabupaten Bone akan mengakibatkan keberadaan RTH sebagai salah satu komponen ekosistem kota menjadi kurang diperhatikan, walaupun keberadaan RTH kota diharapkan dapat menanggulangi masalah lingkungan di perkotaan. Salah satu akibat langsungnya adalah berkurangnya keragaman vegetasi yang juga berpengaruh pada kondisi lingkungan yang semakin buruk. Kondisi lingkungan yang buruk juga dapat mempengaruhi pola tingkah laku dan kondisi kehidupan makhluk hidup khususnya manusia, sehingga RTH yang ada dapat diperhatikan diperhatikan dan diperluas serta diintensifkan fungsinya. Keserasian dan keselarasan RTH dengan laju pembangunan kota akan menunjang kelestarian makhluk hidup, khususnya manusia.

Terbatasnya RTH di Kabupaten Bone selain dikarenakan peningkatan jumlah penduduk, juga terdapat faktor-faktor lain diantaranya fokus perencanaan pemerintah yang belum berfokus pada penyediaan RTH, jumlah anggaran yang diperoleh dari APBD masih belum mencukupi, implementasi perencanaan yang dibuat tidak tepat sasaran, lemahnya pengawasan lingkungan dari pihak pemerintah, lembaga pemerintah yang



masih kurang berperan aktif dalam penyediaan, pengelolaan RTH, dan faktor-faktor yang berasal dari luar pemerintahan seperti keterbatasan lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk turut serta menjaga RTH.

#### **b. Sanitasi Lingkungan dan Permukiman Kumuh**

Salah satu isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Kabupaten Bone yaitu sanitasi. Hingga saat ini fasilitas penyediaan sanitasi belum optimal, hal ini dapat dilihat dari persentase cakupan sistem air limbah perkotaan setempat relatif masih rendah. Cakupan sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota yang rendah berkaitan dengan pencemaran limbah permukiman dan rumah tangga dan akan menyebabkan penurunan kualitas air tanah. Limbah yang saat ini pengelolaannya belum terpusat dan terpadu. Oleh karena itu perlu perencanaan pengelolaan limbah solutif di Kabupaten Bone yang dimulai sedini mungkin dari sekarang secara terpusat dan terpadu. Selain itu masih terdapat area permukiman dengan kondisi kumuh.

Salah satu aspek yang terkait dengan sanitasi lingkungan adalah air minum bersih. Aktifitas penduduk Kabupaten Bone terkait konsumsi air minum masih belum seluruhnya menggunakan jasa PDAM. Sebagian penduduk masih menggunakan sumur-sumur yang dimanfaatkan penduduk setempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik sebagai air minum, untuk memasak, maupun untuk mencuci. Meskipun demikian, indikator pelayanan air minum yang bersih untuk penduduk perlu semakin diperhatikan mengingat padatnya permukiman dan buruknya sanitasi di kawasan permukiman.

Pemeliharaan sanitasi lingkungan dapat berpengaruh pada derajat kesehatan masyarakat. Upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat oleh Dinas Kesehatan didukung *stakeholder* lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone, dan partisipasi aktif masyarakat Kabupaten



Bone mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Indikator keberhasilan program lain dalam bidang kesehatan adalah meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Bone dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bone sudah mendukung tercapainya target pembangunan nasional terkait dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat, yang ditandai dengan angka harapan hidup yang tinggi. Walaupun demikian, masih perlu upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas derajat kesehatan di Kabupaten Bone. Berdasarkan hasil diskusi dan wawancara dengan masyarakat yang terkait di bidang kesehatan dan data yang ada, beberapa hal terkait isu strategis kesehatan yang cukup penting adalah sebagai berikut.

- 1) Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat;
- 2) Masih Terdapat Kasus Penyakit Menular dan Tidak Menular;
- 3) Pengelolaan Limbah Medis.

## **2. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Bone adalah:

- 1) Terpenuhinya luasan RTH sebesar 30% dari luas wilayah perkotaan;
- 2) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kabupaten Bone.

## **3. Arah Kebijakan dan Strategi**

### **a. Arah kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 1: Terpenuhinya Luasan RTH Sebesar 30% dari Luas Wilayah perkotaan.**

- 1) Menetapkan hutan kota dan RTH kota menjadi kawasan lindung, sehingga tidak dimungkinkan terjadi alih fungsi. Selain upaya perlindungan terhadap statusnya sebagai kawasan lindung, upaya pemeliharaan juga dilakukan dalam rangka meningkatkan fungsi lindung dari kawasan;



- 2) Mengembangkan RTH baru yang dapat dilakukan dengan mengembalikan fungsi ruang yang seharusnya termasuk dalam kategori lindung seperti sempadan sungai, sempadan pantai dan saluran listrik udara;
- 3) Menerapkan ketentuan koefisien dasar hijau (KDH) pada setiap kavling tanah untuk dapat memenuhi kebutuhan ruang terbuka hijau;
- 4) Penerapan ketentuan koefisien dasar hijau (KDH) dilaksanakan dengan diimbangi mekanisme monitoring, evaluasi maupun penerapan sanksi.

**b. Arah kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone**

- 1) Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan;
- 2) Meningkatkan jumlah usaha yang memiliki dokumen lingkungan;
- 3) Meningkatkan jumlah usaha yang memiliki izin PPLH;
- 4) Meningkatkan pantauan pada pemrakarsa dalam menaati dokumen lingkungan;
- 5) Meningkatkan layanan pengujian parameter kualitas air yang terakreditasi;
- 6) Meningkatkan layanan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;
- 7) Meningkatkan fasilitas kesehatan terakreditasi milik pemerintah;
- 8) Mengoptimalkan cakupan penanganan kegawatdaruratan kesehatan.



## **E. Rencana Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Lahan dan Air**

### **1. Permasalahan dan Isu Strategis**

#### **a. Sampah**

Masalah persampahan di Kabupaten Bone dapat berisiko mengalami gangguan kesehatan. Volume sampah dipengaruhi oleh jumlah penduduk, aktivitas, dan gaya hidup. Isu strategis lain yaitu mengenai persampahan, yang terkait dengan fasilitas penyediaan sanitasi. Pertambahan penduduk yang semakin meningkat akan menciptakan permasalahan sampah baru, yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kesehatan lingkungan perkotaan. Hingga saat ini persentase volume sampah di Kabupaten Bone yang terangkut ke TPA juga persentase volume sampah yang dikelola secara 3R belum mencapai 100%. Sampah yang tidak terangkut dapat menyebar ke tempat lain, seperti masuk ke dalam sungai atau berserakan di suatu tempat timbunan sampah yang berakibat pada pencemaran lingkungan.

#### **b. Limbah Domestik**

Meningkatnya limbah domestik erat kaitannya dengan peningkatan jumlah rumah tangga di Kabupaten Bone. Limbah domestik rumah tangga baik limbah cair domestic maupun limbah padat domestik dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seperti penurunan kualitas air yang disebabkan deterjen dan penurunan kesehatan masyarakat akibat pengelolaan limbah padat domestik yang kurang baik. Dalam hal ini kepedulian masyarakat khususnya rumah tangga dalam pengelolaan limbah domestic sangat diperlukan untuk membantu pemerintah dalam menangani permasalahan lingkungan hidup di daerah.





### **c. Pencemaran Air**

Kualitas sumber air seperti air sungai, air embung dan air tanah/sumur masih menjadi permasalahan dan isu prioritas bidang lingkungan hidup di Kabupaten Bone. Setiap tahunnya selalu terjadi perubahan kuantitas dan kualitas air, dan hal ini harus menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan kuantitas sumber air dan ketersediaan air bagi kebutuhan hidup masyarakat. Selain itu, ketersediaan kualitas sumber airpun juga masih belum memenuhi standar baku mutu untuk parameter fisika, kimia dan mikrobiologi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan, karena telah tercemar oleh polutan dari berbagai sumber pencemaran.

### **d. Penurunan Kualitas Udara**

Udara normal terdiri atas komposisi gas nitrogen sekitar 78,1%, oksigen 20,93%, karbondioksida 0,03%, dan selebihnya berupa campuran mekanis dari bermacam-macam gas, seperti gas argon, neon, kripton, xenon dan helium, Selain itu, udara juga mengandung uap air, debu, bakteri, dan sisa materi lainnya. Udara merupakan salah satu faktor kehidupan bagi makhluk hidup yang ada di bumi, karena udara mengandung bahan kehidupan yaitu Oksigen (O<sub>2</sub>). Oksigen adalah unsur yang sangat dibutuhkan karena digunakan untuk proses pernapasan dan metabolisme. Peranan udara juga tak kalah penting dengan air yang juga memberikan kehidupan di permukaan bumi. Unsur kimia yang ada di dalam udara bersih disebut kontaminan. Kontaminan yang terdapat dalam konsentrasi tinggi dapat merugikan penerima yang disebut cemaran (polutan). Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain (kontaminan) ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan.



#### **e. Banjir**

Bencana banjir yang diakibatkan tingginya curah hujan, disebabkan karena adanya genangan yang tidak bisa langsung masuk ke saluran pembuangan air. Genangan air tersebut lama-lama akan semakin tinggi dan mengakibatkan banjir yang akan merusak aspal jalan yang terkikis oleh air. Selain bencana banjir, bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Bone adalah tanah longsor. Gejala umum tanah longsor ditandai dengan munculnya retakan-retakan dilereng yang sejajar dengan arah tebing yang biasa terjadi setelah hujan. Selain menjadi penyebab bencana banjir, curah hujan yang tinggi juga merupakan penyebab adanya bencana tanah longsor. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena air akan melalui tanah yang merekah dan masuk serta terakumulasi dibagian dasar lereng, sehingga menimbulkan gerakan lateral.

### **2. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Pengendalian, Pemantauan Serta Pendayagunaan dan Pelestarian Sumberdaya Lahan dan Air di wilayah Kabupaten Bone adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas estetika kota;
- 2) Meningkatkan pengelolaan limbah domestik rumah tangga;
- 3) Mengurangi Pencemaran Air Tanah dan Air Sungai;
- 4) Peningkatan Kualitas Udara;
- 5) Peningkatan Persentase Daerah Bebas Banjir.

### **3. Arah Kebijakan dan Strategi**

#### **a. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 1: meningkatkan kualitas estetika kota.**

- 1) Peningkatkan volume sampah yang bisa terangkut ke TPA;
- 2) Peningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana persampahan;



- 3) Peningkatan volume sampah yang dikelola secara 3R (*reduce, reuse & recycle*).

**b. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 2: meningkatkan pengelolaan limbah domestik rumah tangga**

- 1) Sosialisasi pengelolaan limbah rumah tangga kepada masyarakat;
- 2) Pembentukan dan optimalisasi bank sampah desa/kelurahan;
- 3) Pengadaan lomba kreativitas bank sampah setiap tahun;
- 4) Pemberian insentif pada bank sampah yang memiliki pengelolaan sampah domestik yang baik.

**c. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 3: Mengurangi Pencemaran Air Tanah dan Air Sungai**

- 1) Menurunkan produksi limbah cair secara signifikan di air permukaan;
- 2) Mewujudkan tata kelola perlindungan ekosistem perairan darat serta jasa lingkungannya;
- 3) Meningkatkan Indeks kualitas air.

**d. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 4: Peningkatan Kualitas Udara**

- 1) Menurunkan secara signifikan pencemaran bahan kimia dan semua jenis limbah yang tidak ramah lingkungan di udara;
- 2) Meningkatkan Indeks kualitas udara;
- 3) Mewujudkan kota hijau yang berketahanan iklim.

**e. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 5: Peningkatan Persentase Daerah Bebas Banjir**

- 1) Meningkatkan cakupan pemulihan kerusakan Daerah Aliran Sungai;
- 2) Membangun infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh untuk menunjang pengendalian banjir;
- 3) Meningkatkan kapasitas adaptasi masyarakat terhadap bencana banjir.



## **F. Rencana Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim**

Permasalahan yang dihadapi ataupun yang mendasari dilakukannya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim khususnya di Kabupaten Bone antara lain:

### **a. Perubahan Iklim**

Permasalahan terkait upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim adalah:

- 1) Pemantauan emisi gas rumah kaca belum memadai dalam rangka menyajikan data untuk perencanaan yang lebih baik;
- 2) Sistem transportasi massal yang ramah lingkungan belum diterapkan;
- 3) Pengembangan energi alternatif sesuai dengan kemampuan daerah belum dilakukan secara optimal;
- 4) Pengembangan ruang terbuka hijau masih belum dilakukan secara optimal.
- 5) Revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya belum dilakukan secara optimal.

### **b. Menurunnya Perilaku Peduli Lingkungan**

Permasalahan lain yang dihadapi untuk keperluan mitigasi perubahan iklim adalah tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait kepedulian terhadap kondisi lingkungan terutama dalam rangka adaptasi dan pencegahan dampak perubahan iklim sehingga dampaknya dapat berpotensi mengganggu stabilitas aktivitas masyarakat di bidang ekonomi. Penjelasan permasalahan tersebut difokuskan pada aspek aktivitas masyarakat di bidang jasa, perdagangan dan pariwisata, diantaranya adalah:

- 1) Kurangnya kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim;
- 2) Kurangnya adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada;
- 3) Distribusi barang dan perjalanan masyarakat akibat cuaca ekstrim dan perubahan iklim;



- 4) Penurunan pendapatan masyarakat di bidang jasa, perdagangan dan pariwisata karena perubahan cuaca dan iklim.

### **c. Disharmonisasi Sosial**

Perubahan iklim mempunyai dampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi ditekankan pada bidang kesehatan, permukiman, dan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

- 1) Muncul dan menyebarnya penyakit menular dan tidak menular akibat perubahan iklim;
- 2) Menurunnya kualitas lingkungan permukiman akibat perubahan pola curah hujan;
- 3) Menurunnya kuantitas dan kualitas infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah;
- 4) Meningkatnya eksploitasi air tanah di wilayah perkotaan;
- 5) Kerusakan infrastruktur akibat cuaca ekstrim dan perubahan iklim menjadikan pelayanan.

### **1. Sasaran**

Sasaran yang ingin dicapai dalam upaya Adaptasi dan Mitigasi Terhadap Perubahan Iklim di wilayah Kabupaten Bone adalah:

- 1) Meningkatnya pemantauan emisi gas rumah kaca;
- 2) Meningkatkan Sistem transportasi massal yang ramah lingkungan;
- 3) Meningkatnya pengembangan energy alternatif sesuai dengan kemampuan daerah;
- 4) Meningkatnya pengembangan ruang terbuka hijau;
- 5) Meningkatkan revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya;
- 6) Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim;
- 7) Meningkatnya adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada;



- 8) Meningkatnya infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah;
- 9) Mengurangi eksploitasi air tanah di wilayah perkotaan;
- 10) Peningkatan Indeks Peduli Lingkungan Masyarakat Kabupaten Bone.

## **2. Arah Kebijakan dan Strategi**

### **a. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 1: Meningkatnya pemantauan emisi gas rumah kaca.**

- 1) Meningkatkan kelengkapan pemantauan emisi gas rumah kaca dengan pemasangan alat pengukur yang memadai;
- 2) Meningkatkan akurasi data emisi gas rumah kaca melalui pengukuran yang berkelanjutan.

### **b. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 2: Meningkatkan Sistem transportasi massal yang ramah lingkungan.**

- 1) Meningkatkan sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- 2) Meningkatkan persentase pengguna sistem transportasi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

### **c. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 3: Meningkatnya pengembangan energy alternatif sesuai dengan kemampuan daerah**

- 1) Meningkatkan kajian dan penelitian terkait dengan pengembangan energi alternatif;
- 2) Meningkatkan penggunaan energy alternatif yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

### **d. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 4: Meningkatnya pengembangan ruang terbuka hijau**

- 1) Menyediakan ruang terbuka hijau dengan kriteria aman, inklusif, dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan luas ruang terbuka hijau menuju kota hijau.
- 3) Melindungi daerah sumber mata air sebagai kawasan konservasi



**e. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 5: Meningkatkan revitalisasi sistem pemanenan air hujan dan jaringan distribusinya.**

- 1) Meningkatkan kajian dan penelitian terkait sistem pemanenan air hujan yang sesuai dan optimal untuk Kabupaten Bone;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan sistem pemanenan air hujan di masyarakat.

**f. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 6: Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam perubahan iklim**

- 1) Memperkuat kapasitas masyarakat terhadap perubahan iklim;
- 2) Meningkatkan kapasitas perangkat daerah di masyarakat terhadap perubahan iklim.

**g. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 7: Meningkatnya adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada**

- 1) Meningkatkan strategi pengurangan risiko bencana melalui kearifan lokal yang telah ada;
- 2) Meningkatkan kapasitas masyarakat terhadap risiko bencana di daerahnya.

**h. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 8: Meningkatnya infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah**

- 1) Meningkatkan pengembangan infrastruktur hijau sesuai kerentanan daerah;
- 2) Mempertahankan infrastuktur hijau untuk daerah yang rentan.

**i. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 9: Mengurangi eksploitasi air tanah di wilayah perkotaan**

- 1) Meminimalisir eksploitasi air tanah di wilayah perkotaan;
- 2) Meningkatkan tata kelola pemanfaatan air tanah di wilayah perkotaan.



**j. Arah Kebijakan dan Strategi untuk Sasaran 10: Peningkatan Indeks Peduli Lingkungan Masyarakat Kabupaten Bone**

- 1) Menjadikan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan;
- 2) Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan bagi masyarakat perkotaan.





## **BAB V IMPLEMENTASI, MONITORING & EVALUASI**

### **A. Implementasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone**

Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di Kabupaten Bone berkaitan erat dengan kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Tugas dan Wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terdiri dari 16 (enam belas) tugas dan dua diantaranya terkait erat dengan yaitu (1) menetapkan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota, dan (2) menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kabupaten/kota.

Tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan tercapai apabila pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan segenap warga negara dengan tanggung jawab. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen. Mengingat kompleksnya Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan permasalahannya yang bersifat lintas sektor dan



wilayah, maka dalam pelaksanaan pembangunan diperlukan perencanaan dan pelaksanaan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup yang berimbang sebagai pilar- pilar yang saling tergantung dan saling memperkuat satu sama lain. Di dalam pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, serta ketegasan dalam penataan hukum lingkungan. Diharapkan dengan adanya partisipasi berbagai pihak dan pengawasan serta penataan hukum yang betul-betul dapat ditegakkan, dapat dijadikan acuan bersama untuk mengelola lingkungan hidup dengan cara yang bijaksana sehingga tujuan pembangunan berkelanjutan betul-betul dapat diimplementasikan di lapangan.

Beberapa ketentuan untuk meningkatkan sinergitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan mendorong tercapainya kualitas lingkungan hidup yang diharapkan, maka:

- 1) Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bone memuat arahan kebijakan pengembangan kewilayahan yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan daerah, seperti RTRW dan RPJM dan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.
- 2) Pemerintah Daerah Kabupaten Bone wajib melakukan koordinasi pengintegrasian Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten ke dalam perencanaan pembangunan di tingkat sektoral Kabupaten;
- 3) Kebijakan Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan wajib dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pembangunan tingkat Kabupaten Bone;
- 4) Pemerintah daerah Kabupaten Bone wajib menginformasikan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada setiap lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat.



Dalam rangka mewujudkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bone, disusunlah indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kabupaten Bone yang berisi program-program baik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan sekaligus mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Bagian berikut menyajikan Matriks Rencana Program Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bone selama 30 (tiga puluh) tahun, yang terbagi dalam lima tahunan.



**1. Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam**

Tabel 5.1. Program Kebijakan Rencana Pemanfaatan dan/atau Pencadangan Sumberdaya Alam

Isu Strategis : Alih fungsi lahan												
Sasaran : Menurunnya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian												
Kebijakan : Melindungi dan membatasi pemanfaatan wilayah yang memiliki daya dukung tinggi (jasa ekosistem penyedia pangan tinggi)												
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)								
				1	2	3	4	5	6			
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengembangan Prasarana Pertanian	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit									







		Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten							
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

## 2. Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

Tabel 5.2. Program Kebijakan Rencana Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup

		Isu Strategis : Kurangnya dokumen Lingkungan Hidup				Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)						
		Sasaran : Terpenuhinya dokumen lingkungan hidup sebagai pedoman dalam Pemeliharaan dan Perlindungan Kualitas dan/atau Fungsi Lingkungan Hidup				1	2	3	4	5	6	
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan									
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten									
		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten									
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang									
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD									
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko									4



		Lingkungan Hidup								
		Isu Strategis : Kurangnya RTH								
		Sasaran : Terpenuhinya luasan RTH sebesar 30% dari luas wilayah								
		Kebijakan : Peningkatan luasan RTH Publik dan privat								
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)						
				1	2	3	4	5	6	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten							
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan							
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan							





Isu Strategis : Sanitasi lingkungan dan permukiman kumuh Sasaran : Peningkatan kualitas lingkungan hidup Kab. Bone Kebijakan : Peningkatan efektivitas penataan dan pengendalian dampak lingkungan											
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)							
				1	2	3	4	5	6		
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi secara Elektronik Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh Survei dan Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh								
				Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana dan Rekomendasi Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						
					Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh						
					Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh						
					Kordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman						





**Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup**

Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pembangunan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH						
	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH						
	Program Penanganan Pengaduan	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH						
		Penyelesaian Pengaduan	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten						



	Lingkungan Hidup	Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan						
--	------------------	---	---	--	--	--	--	--	--

### 3. Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Kelestarian Sumberdaya Alam

Tabel 5.3. Program Kebijakan Rencana Pengendalian, Pemantauan serta Pendayagunaan dan Kelestarian Sumberdaya Alam

Isu Strategis : Limbah Domestik									
Sasaran : Meningkatkan pengelolaan limbah domestik rumah tangga									
Kebijakan : Sosialisasi pengelolaan limbah rumah tangga kepada masyarakat									
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)					
				1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3						
		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						





Isu Strategis : Sampah										
Sasaran : Peningkatan kualitas estetika kota										
Kebijakan : Peningkatan Sistem dan Pengelolaan Sampah										
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)						
				1	2	3	4	5	6	
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Sampahan	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten							
			Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali							
			Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten							
			Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampahan							
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampahan							
			Penyusunan Kebijakan Kéjasama Pengelolaan Sampahan							
			Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik							
			Penerbitan Izin							
			Pendaurlangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh							



Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Swasta Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Penyediaan Sarana Persampahan Pembinaan Teknik Pengelolaan Persampahan Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat Rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS3R/TPS						
<b>Isu Strategis : Pencemaran Air dan Udara</b>									
<b>Sasaran : Mengurangi Pencemaran Air Tanah dan Air Sungai</b>									
<b>Urusan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)</b>					
Urusan	Program Pengelolaan	Pengelolaan SDA dan	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen	1	2	3	4	5	6











			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa																	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak																	
			Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah																	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah																	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa																	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan																	
			Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi																	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa																	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak																	
			Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah																	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah																	
			Operasional Unit Pengelola Irigasi																	
			Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi																	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa																	
<b>Isu Strategis : Pencemaran Air dan Udara</b>																				
<b>Sasaran : Mengurangi Pencemaran Air Tanah dan udara</b>																				
<b>Kebijakan : Meningkatkan Indeks kualitas air dan udara</b>																				
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)																
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	1	2	3	4	5	6											



Hidup	Kabupaten	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten  Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat  Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup  Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran  Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi  Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi							
<b>Isu Strategis : Banjir</b>										
<b>Sasaran : Peningkatan Persentase Daerah Bebas Banjir/ Genangan</b>										
<b>Kebijakan : Meningkatkan Cakupan pemulihan kesehatan DAS</b>										
<b>Urusan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)</b>						
Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan Provinsi	Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di	1	2	3	4	5	6	



**Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup**

<p>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p>	<p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)</p>	<p>Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</p>	<p>Wilayah DAS Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kegiatan Pengelolaan DAS Pembangunan Kelembagaan Pengelolaan DAS Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS</p>	
		<p>Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten</p>	<p>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Pembangunan Kanal Banjir Pembangunan Stasiun Pompa Banjir Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Rehabilitasi Kanal Banjir Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir Peningkatan Kanal Banjir Peningkatan Stasiun Pompa Banjir Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir</p>	
<p>Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan</p>	<p>Program Penanggulangan Bencana</p>	<p>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p>	<p>Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten</p>	





#### 4. Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim

Tabel 5.4. Program Kebijakan Rencana Adaptasi dan Mitigasi terhadap Perubahan Iklim

Isu Strategis : Perubahan iklim									
Sasaran : Meningkatkan pemantauan emisi gas rumah kaca									
Kebijakan : Meningkatkan kelengkapan pemantauan emisi gas rumah kaca dengan pemasangan alat pengukur yang memadai									
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)					
				1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten	Kordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						
Isu Strategis : Menurunnya Perilaku Peduli Lingkungan Hidup									
Sasaran : Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam Perubahan Iklim									
Kebijakan : Memperkuat kapasitas masyarakat									
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)					
				1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Bidang	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan						



**Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup**

Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup								
<b>Isu Strategis : Menurunnya Perilaku Peduli Lingkungan Hidup</b>											
<b>Sasaran : Meningkatkan adaptasi perubahan iklim melalui kearifan lokal yang telah ada</b>											
<b>Kebijakan : Meningkatkan Strategi pengurangan risiko bencana melalui kearifan lokal yang telah ada</b>											
<b>Urusan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)</b>							
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	1	2	3	4	5	6		
			Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Bencana)								
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten							
				Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten							
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten							
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana							
				Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten							
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan							
				Penanganan Pascabencana Kabupaten							
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten							





**Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup**

			<p>Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas</p> <p>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten</p> <p>Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten</p> <p>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten</p> <p>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten</p> <p>Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten</p> <p>Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten</p>																		
		<p>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</p> <p>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p>																			
<b>Isu Strategis : Menurunnya Perilaku Peduli Lingkungan Hidup</b>																					
<p><b>Sasaran : Menurunnya tingkat gangguan aktivitas ekonomi masyarakat Kab. Bone akibat terjadinya cuaca ekstrim dan perubahan iklim</b></p> <p><b>Kebijakan : Meningkatkan penggunaan teknologi di bidang usaha kecil, menengah, maupun besar yang dapat menurunkan risiko kerugian ekonomi karena perubahan iklim</b></p>																					
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)																	
				1	2	3	4	5	6												
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah.	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<p>Facilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</p>																		



Isu Strategis : Menurunnya Perilaku Peduli Lingkungan Hidup									
Sasaran : Menurunnya kerusakan lokasi-lokasi utama ekonomi kawasan perkotaan akibat cuaca ekstrim dan perubahan iklim									
Kebijakan : infrastruktur penanggulangan kerusakan lokasi lokasi ekonomi di Kawasan Perkotaan Kab. Bone									
Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)					
				1	2	3	4	5	6
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Penyelenggaraan Penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan, Rehabilitasi, Renovasi, Ubaahsui, serta Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten						
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi secara Elektronik Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)						



	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan						
<b>Isu Strategis : Menurunnya Perilaku Peduli Lingkungan Hidup</b>									
<b>Sasaran : Meningkatkan kelancaran distribusi barang dan perjalanan masyarakat tanpa terkendala kejadian perubahan iklim</b>									
<b>Kebijakan : Meningkatkan distribusi barang dan perjalanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan Kab. Bone</b>									
<b>Urusan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)</b>					
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengembangan Jalan Pembebasan Lahan/Tanah Untuk Penyelenggaraan Jalan Pengelolaan Leger Jalan Survey Kondisi Jalan/Jembatan Pembangunan Jalan Pelebaran Jalan Menuju Standar Pelebaran Jalan Menambah Lajur Rekonstruksi Jalan Rehabilitasi Jalan Pemeliharaan Berkala Jalan Pemeliharaan Rutin Jalan Pembangunan Jembatan Pembangunan Flyover Pembangunan Underpass Pembangunan Terowongan/Tunnel	1	2	3	4	5	6



Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup

				Penggantian Jembatan Pelebaran Jembatan Rehabilitasi Jembatan Pemeliharaan Rutin Jembatan Pemeliharaan Berkala Jembatan																						
<b>Isu Strategis : Disharmonisasi Sosial</b>																										
<b>Sasaran : Meningkatkan kewaspadaan dan penanganan munculnya penyakit menular dan tidak menular akibat perubahan iklim</b> <b>Kebijakan : Meningkatkan kemampuan lembaga dan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat</b>																										
<b>Urusan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>																	<b>Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)</b>						
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1	2	3	4	5	6												1	2	3	4	5	6
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana																						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																						
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																						
				Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan																						
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																										
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat																										
Penyelenggaraan Kabupaten Sehat																										
<b>Isu Strategis : Disharmonisasi Sosial</b>																										
<b>Sasaran : Mengurangi eksploitasi air tanah di wilayah kabupaten</b> <b>Kebijakan : Meminimalisir eksploitasi air tanah di wilayah kabupaten</b>																										
<b>Urusan</b>	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sub Kegiatan</b>																	<b>Waktu Pelaksanaan (5 Tahun)</b>						
Urusan	Program Pengelolaan	Pengelolaan dan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan	1	2	3	4	5	6												1	2	3	4	5	6



**Pemerintah Kabupaten Bone  
Dinas Lingkungan Hidup**

<p>Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</p>	<p>Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p>	<p>Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten</p>	<p>Teknis SPAM Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM Pembangunan SPAM di Kawasan Perkotaan Pembangunan SPAM di Kawasan Perdesaan Peningkatan SPAM di Kawasan Perkotaan Peningkatan SPAM di Kawasan Perdesaa Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan Perbaikan SPAM di Kawasan Perdesaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerjasama SPAM Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan</p>
--	---	--	--

Sumber : Hasil Analisis Tim, Tahun 2021



## **B. Kerangka Regulasi, Kelembagaan, dan Pendanaan**

### **1. Kerangka Regulasi**

Kerangka regulasi yang perlu dibangun secara umum merupakan penjabaran/amanat Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun peraturan lain yang diperlukan dalam operasional/implementasi kebijakan. Sebagaimana di amanatkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, dalam rangka memberikan kerangka regulasi yang kuat, maka kebijakan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bone ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Selanjutnya dalam hal-hal khusus dari pelaksanaan RPPLH di daerah dapat di turunkan pada peraturan yang lebih rendah seperti peraturan bupati. Berbagai macam kebijakan dan regulasi turunan dari UU dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden sampai Keputusan Menteri harus dapat diintegrasikan dengan Perda RPPLH seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) Perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bone menjadi sumber dan payung hukum bagi implementasi pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya menjadi acuan bagi bentuk rencana-rencana pembangunan khususnya RTRW dan RPJM serta berbagai macam bentuk rencana sektoral lainnya di Kabupaten Bone, seperti contohnya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPARDA).

### **2. Kerangka Kelembagaan**

Dalam mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bone sebagaimana tersebut di atas, maka digunakan beberapa prinsip dasar pengelolaan lingkungan yaitu (1) prinsip



keterpaduan (*integrated*) perencanaan dan pengelolaan, (2) Multidisipliner (*multidisciplinary*) atau interdisipliner (*interdisciplinary*), (3) Multisektor (*multisectoral*), dan (4) Multi wilayah (*multiregion*).

Sebagai satuan wilayah yang multipermasalahan, maka hampir semua sektor dan instansi terlibat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bone. Meskipun demikian, terdapat beberapa instansi yang pokok atau *leading sector* dalam hal ini, yaitu: Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Lembaga-lembaga tersebut berfungsi mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah kajian. Selain itu terdapat pula instansi sektoral yang paling terkait erat, yaitu: BPKAD, BPBD, Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pariwisata, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan Bagian Hukum. Kelembagaan yang mempunyai wewenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bone bergantung pada jenjang (hirarki) instansi masing-masing. Kewenangan operasional atau pelaksanaan lebih banyak pada lembaga tingkat teknis. Sebagai koordinator dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, DLH harus berperan aktif sebagai mediator bagi pihak-pihak yang berpekerjaan dalam kasus terjadinya konflik pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Koordinasi dan komunikasi dua arah antara Tim DLH, baik secara vertikal (dengan provinsi) maupun horisontal (antar instansi) perlu ditingkatkan. Untuk kasus-kasus pemanfaatan ruang dan sumberdaya



alam yang tidak dapat diselesaikan oleh kabupaten, maka dapat berkonsultasi dengan tim lebih tinggi (provinsi atau nasional).

Mekanisme perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bone, dapat dilakukan dengan berbagai cara atau metode, antara lain:

- a. Pertemuan rutin antara instansi-instansi sektoral terkait yang bersifat koordinatif, yang membahas dan memonitor rencana maupun pelaksanaan dari program-program atau proyek-proyek sektoral, dan kesesuaiannya dengan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. menggunakan laporan-laporan dari berbagai instansi terkait sebagai bahan umpan balik tentang pelaksanaan program-program atau proyek-proyek pemanfaatan ruang berskala besar di Kabupaten Bone;
- c. peninjauan lapangan ke lokasi-lokasi kegiatan pemanfaatan ruang dan sumberdaya alam di Kabupaten Bone;
- d. di samping dari instansi-instansi sektoral dan pemerintah, informasi mengenai program-program dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dapat diperoleh juga dari kalangan swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, kelompok masyarakat, maupun masyarakat umum secara langsung.

Berikut gambaran tentang sistem kelembagaan terkait dengan fungsi kelembagaan pada masing-masing tahapan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.





**Tabel 5.5** Fungsi Kelembagaan pada masing-masing Tahapan  
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<b>Fungsi Manajemen Stakeholder dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Bone</b>			
<b>Koordinatif</b>	<b>Perencanaan</b>	<b>Implementasi</b>	<b>Monitoring dan Evaluasi</b>
BAPPEDA	DLH	Seluruh dinas terkait, antara lain :	DLH
DLH	BAPPEDA	BPBD	BAPPEDA
BPKAD	BPKAD	DLH	BPBD
BPBD	BPBD	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	BPKAD
Bagian Hukum Setda	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang	DPRD
DPRD	Dinas Koperasi dan UMKM	Dinas Ketenagakerjaan	Dinas terkait lainnya
	Dinas SDA dan Bina Konstruksi	Dinas Koperasi dan UMKM	LSM dan Perguruan Tinggi
	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Kelompok Masyarakat
	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan	
	BUMN, BUMD & Swasta	Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB	
	Kelompok Masyarakat	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dinas Perhubungan	
		Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Dinas Perindustrian	
		Dinas SDA dan Bina Konstruksi	
		Bagian Hukum Setda, dll	
		BUMN, BUMD & Swasta	
		Kelompok Masyarakat	

Sumber: Hasil Analisis Tim, Tahun 2021



### 3. Kerangka Pendanaan

Pendanaan dalam rangka implementasi rencana, program dan kegiatan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup dapat bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten maupun sumber-sumber lain baik dari pemerintah maupun swasta serta masyarakat secara langsung. Pendanaan dalam rangka implementasi pemanfaatan dan/atau pencadangan sumberdaya alam dapat bersumber dari gabungan APBN, APBD, CSR, dan Badan Usaha, khususnya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan sumberdaya alam di Kabupaten Bone. Pendanaan dari APBN/APBD dapat membiayai kegiatan-kegiatan antara lain koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor, perencanaan, konservasi sumberdaya alam, penyediaan infrastruktur pendukung serta *monitoring* dan evaluasi. Sementara, badan usaha baik melalui dana CSR maupun dana investasinya diharapkan dapat mendukung dan atau membangun kegiatan-kegiatan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan.

Pendanaan yang bersumber pada APBN menjadi prioritas dalam perbaikan tata kelola untuk pembangunan hutan berkelanjutan dan rencana adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim Dukungan APBD diperlukan untuk menjembatani proses yang dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan rencana pemerintah daerah, dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan kelompok masyarakat juga merupakan salah satu sumber pendanaan untuk meningkatkan kinerja tata kelola kehutanan. Sedangkan untuk kerangka pendanaan untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup ini bersumber dari pendanaan pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD), baik yang bersumber dari dana Rupiah Murni maupun pendanaan hibah



internasional (bilateral dan multilateral), serta sumbangan masyarakat dan dunia usaha.

Selain sumber pendanaan dari dalam negeri, sebagai daerah yang berkontribusi pada sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bone dapat mengembangkan sumber pendanaan dari sumber lainnya seperti hibah luar negeri, lembaga swadaya masyarakat dan kerja sama dengan mitra internasional. Dalam rangka menampung dan mengkoordinasikan dana-dana yang berasal dari non-APBN tersebut, maka akan dibentuk *trust fund* di bidang konservasi lingkungan khususnya rehabilitasi lahan dan kehutanan. Dengan adanya mekanisme pendanaan ini maka diharapkan upaya konservasi dapat dikelola secara baik dan terintegrasi, baik yang berasal dari lembaga internasional maupun dalam negeri serta menyalurkan secara bijak kepada pengelola kawasan konservasi. Kerangka pendanaan untuk penanganan perubahan iklim bersumber dari pendanaan pemerintah pusat (APBN) dan daerah (APBD), serta sumber-sumber dana lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang tidak mengikat. Untuk penanganan perubahan iklim, pengembangan Dana Perwalian melalui *Indonesia Climate Change Trust Fund* dan dana-dana internasional lainnya perlu terus ditingkatkan pemanfaatannya.

#### **4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Untuk menjamin terselenggaranya upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berjenjang dan berkesinambungan, maka :



- 1) Bupati wajib melakukan sosialisasi dan supervisi untuk memastikan bahwa seluruh RPPLH Kabupaten Bone telah sinkron dan mengacu pada RPPLH Nasional dan Provinsi.
- 2) Bupati wajib melakukan supervisi untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan pembangunan di Kabupaten Bone, khususnya OPD terkait telah mengacu dan sesuai dengan RPPLH.
- 3) Paling sedikit setiap periode 5 tahunan, Bupati wajib melakukan evaluasi pencapaian target kualitas lingkungan hidup dan selanjutnya dapat menyesuaikan target maupun kebijakan dalam RPPLH Kabupaten Bone sesuai dengan kondisi yang dihadapi.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten Bone 2021-2051 merupakan arahan-arahan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup yang wajib dijadikan rujukan dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan dan kegiatan/usaha, yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan untuk jangka waktu 30 tahun. RPPLH Kabupaten Bone 2021-2051 menjadi acuan bagi dokumen perencanaan lain ditingkat daerah seperti RTRW, RPJM dan RPJP daerah, dan merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan dan perencanaan sumberdaya lainnya. Untuk itu, perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus didukung oleh (1) komitmen pemerintah daerah terhadap pelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup; (2) kebijakan terhadap pembangunan berkelanjutan; (3) lingkungan hidup sebagai pertimbangan utama pembangunan; (4) peran serta pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang aktif; dan (5) menyegerakan implementasi program RPPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



## DAFTAR PUSTAKA

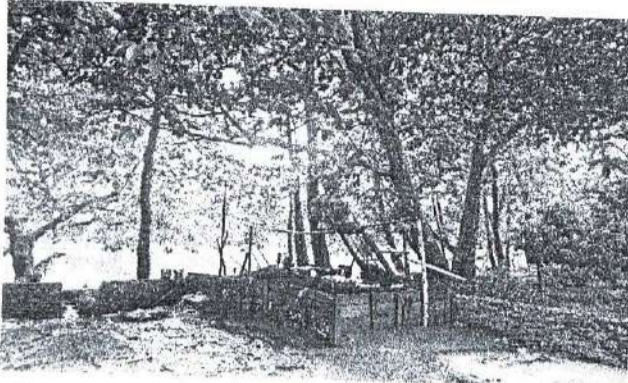
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. 2019. Kabupaten Bone Dalam Angka 2019. Kabupaten Bone: BPS Kabupaten Bone
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. 2020. Kabupaten Bone Dalam Angka 2020. Kabupaten Bone: BPS Kabupaten Bone
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone. 2021. Kabupaten Bone Dalam Angka 2021. Kabupaten Bone: BPS Kabupaten Bone
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017, 2018. Pemerintah Kabupaten Bone.
- Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018, 2018. Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2021. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone.
- Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Indikatif Ekoregion Sulawesi Berbasis Jasa Lingkungan. 2018. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Hugget, 1995. *Geoecology*. John Willey and Sons. New York.
- Kementerian Lingkungan Hidup RI, 2009. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*
- Laporan Akhir Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kabupaten Bone 2019-2024. 2019. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.
- Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Tahun 2020. Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Bone.



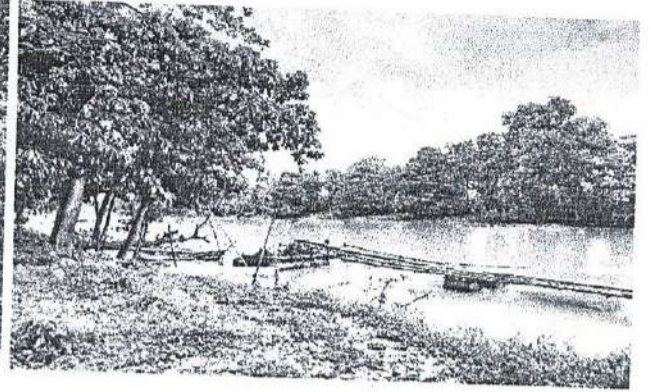
- Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023. 2021. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone.
- Millennium Ecosystem Assessment (MEA). 2005. *Ecosystems and Human Well-Being: Synthesis*, Island Press, Washington, USA
- Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2047. 2017. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Selatan.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- Strahler, N.A. dan Strahler, H.A., 1987. *Modern Physical Geography*. John Wiley and Sons. New York
- Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Thornbury, 1954. *Principles of Geomorphology*. John Wiley and Sons. London - New York
- Verstappen, H. Th., 1983. *Applied Geomorphology: Geomorphological Surveys for Environmental Development*. Elsevier: Amsterdam - Oxford - New York



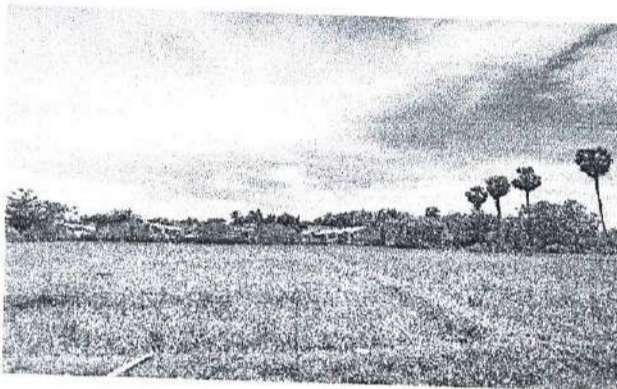
### DOKUMENTASI HASIL SURVEY LAPANGAN



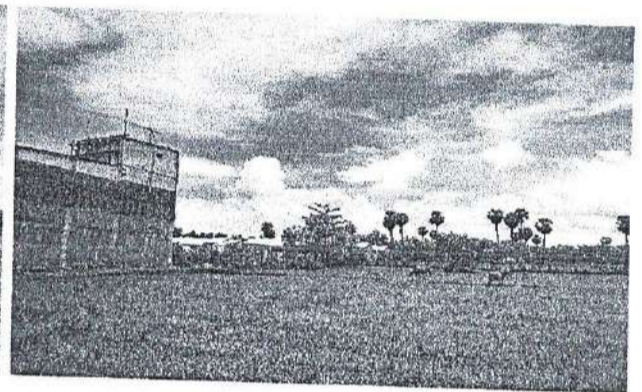
Kondisi Aktifitas Tambang Pasir



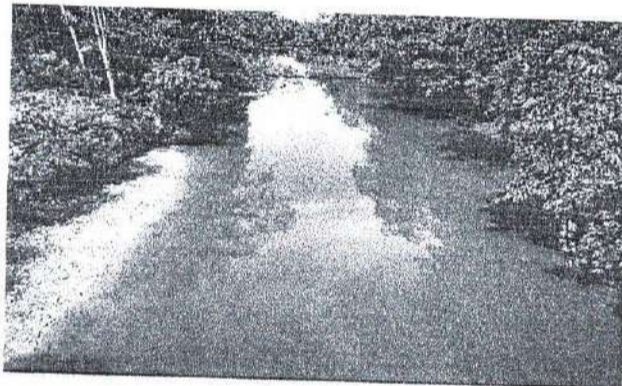
Kondisi Aktifitas Tambang Pasir



Kondisi Alih Fungsi Lahan Pertanian



Kondisi Alih Fungsi Lahan Pertanian

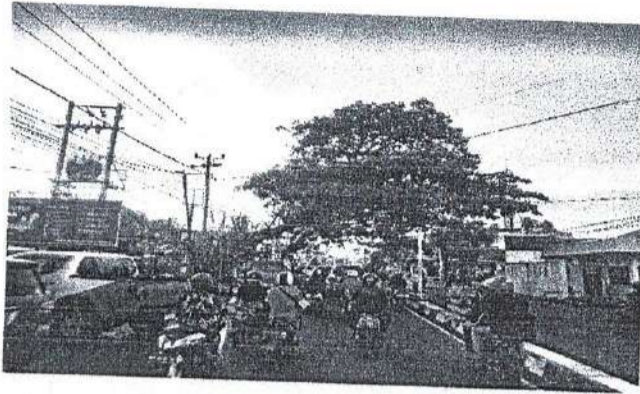


Kondisi Kualitas Air Sungai



Kondisi Kualitas Air Sungai





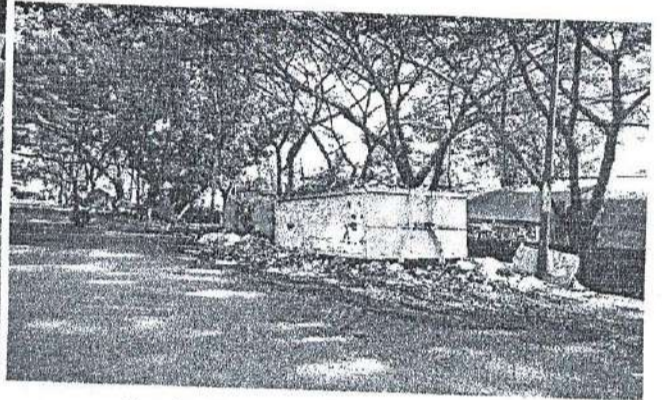
Kondisi Kepadatan Kendaraan



Kondisi Kepadatan Kendaraan



Kondisi Persampahan di Perkotaan



Kondisi Persampahan di Perkotaan



Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah



Kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

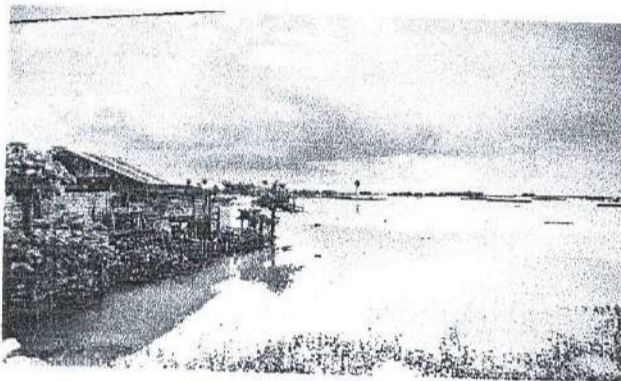




Kondisi Rawan Abrasi Pantai



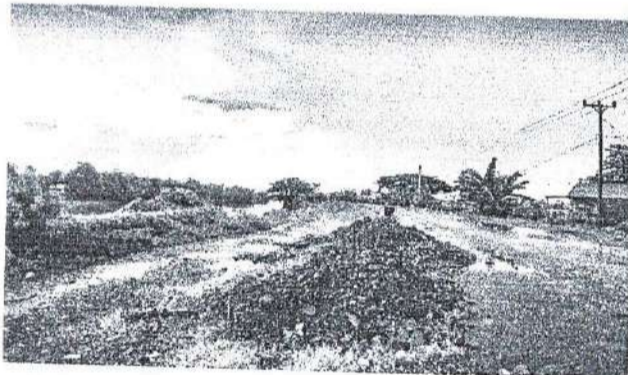
Kondisi Rawan Abrasi Pantai



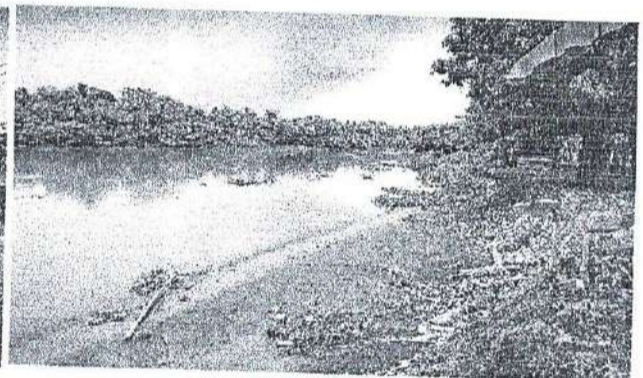
Kondisi lokasi rawan banjir



Kondisi lokasi rawan banjir

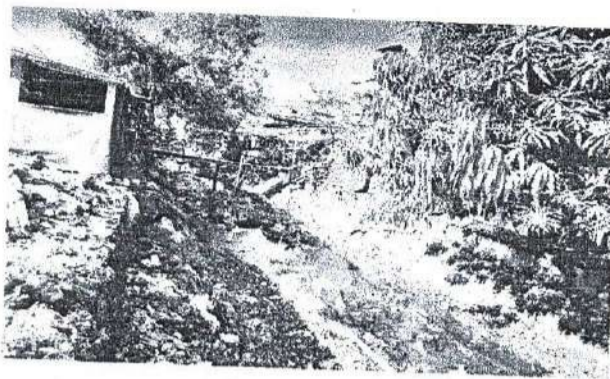


Kondisi Erosi Sungai

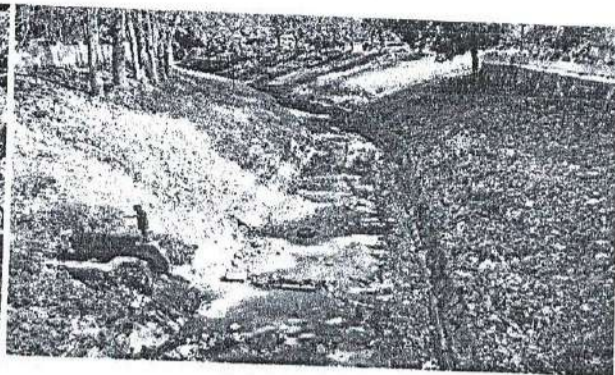


Kondisi Erosi Sungai





Kondisi Jaringan Drainase



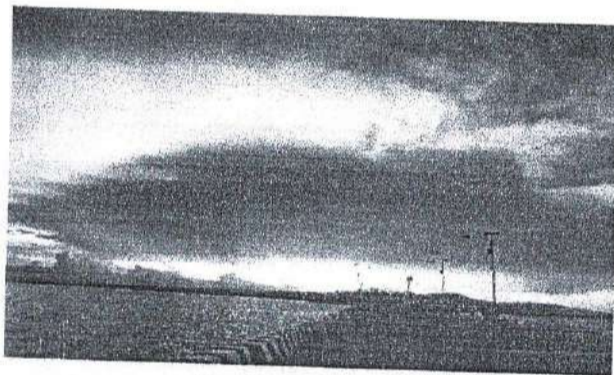
Kondisi Jaringan Drainase



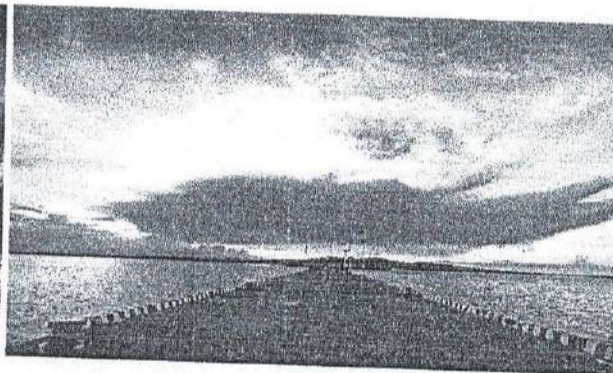
Kondisi Tambang Galian



Kondisi Tambang Galian



Kondisi Pelabuhan



Kondisi Pelabuhan



### KONDISI PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BONE

